



# BAB I

## PENDAHULUAN

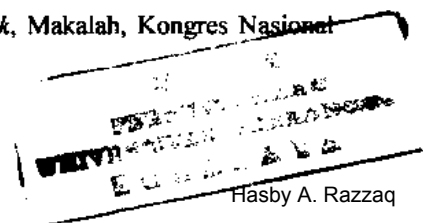
### I.1. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam pengertian yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran tentang arti pentingnya pencapaian tujuan otonomi daerah yang berdasar atas prinsip *Good Governance*.

Menurut Arie Soelendro, unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*<sup>1</sup>. Sedangkan Hadori Yunus berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*)<sup>2</sup>. Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

<sup>1</sup> Soelendro, Ari. 2000, *Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*, Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV, Jakarta, hal. 13

<sup>2</sup> Yunus, Hadori. 2000, *Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik*, Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV, Jakarta, hal 1





Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja Daerah.

Kritik yang muncul selama ini adalah Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, sentralisasi tersebut telah menimbulkan ketimpangan dan atau ketidakadilan, rendahnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat



pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah.<sup>3</sup>

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang juga pada akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis

---

<sup>3</sup> Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta, hal. 13



perekonomian daerah.<sup>4</sup> Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang- Undang ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya terlihat

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 96



pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, untuk melakukan pembaruan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus lebih terkonsentrasi pada kepentingan publik. Selama ini dalam pengelolaan keuangan sarat dengan korupsi dan penyelewengan keuangan negara. Budaya korupsi merupakan fenomena yang terjadi dalam pemerintahan telah berlangsung sejak orde lama dan hingga saat ini. Untuk memberantas praktek korupsi tersebut, maka pemerintah pada tiap-tiap orde pemerintahan telah melakukan berbagai upaya termasuk menerbitkan peraturan atau undang-undang, maupun pembentukan lembaga anti korupsi sebagai tindak lanjut dalam pemberantasan korupsi. Untuk menjelaskan banyaknya lembaga dan peraturan di masing-masing era pemerintahan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, ditunjukkan melalui tabel berikut:



**Tabel 1.1**  
**Peraturan Anti Korupsi Era Orde Lama Hingga Orde Reformasi**  
**Tahun (1960-2005)**

Era/Orde	Tahun	Nama Lembaga atau Jenis UU/Peraturan
Orde lama		PARAN ( Panitia Retooling Aparatur Negara )
	1963	Operasi Budhi ( Kepres No.275 Tahun 1963)
		KONTAR ( Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi )
Orde Baru	1967	TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi) dengan Kepres No. 228 tahun 1967
	1970-1977	Komisi empat dengan Kepres No.12 Tahun 1970
	1970	KAK ( Komisi Anti Korupsi )
	1977	Opstib ( Operasi Penertiban) dengan Inpres no. 9 tahun 1977
	1982-1999	TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi )
Orde Reformasi	Era Habibie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU. No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN</li> <li>- UU. No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi</li> <li>- Inpres No.30 Tahun 1998 tentang Komisi Pemeriksa harta pejabat negara</li> </ul>
	Era Gus Dur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepres No.44 tentang pembentukan Lembaga Ombudsman</li> <li>- Pembentukan TGPTPK (tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi) dengan dasar pasal 27 UU. No.31 Tahun 1999 dan PP. No 19 Tahun 2000</li> <li>- Pembentukan KPKPN (Komisi Pemeriksa kekayaan pejabat Negara)</li> </ul>
	Era Megawati	UU. No. 30 tahun 2002 tentang pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
	Era SBY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepres no. 11 tahun 2005 tentang pembentukan TIMTAS</li> <li>- TIPIKOR ( tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi )</li> <li>- Tim Pemburu koruptor</li> </ul>

Sumber : [www. Pemantau\\_peradilan.com.detail/detail.php?id=232&tipe=opini](http://www.Pemantau_peradilan.com.detail/detail.php?id=232&tipe=opini).<sup>5</sup>

Dengan adanya berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan praktek korupsi yang berlangsung sejak orde lama hingga sekarang ini menunjukkan korupsi masih terjadi walaupun telah banyak perangkat yang mengatur upaya dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian dapat dilihat pula pemaparan dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) terkait dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi selama kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2006. Kasus korupsi yang digambarkan oleh ICW ini berlangsung pada 3 tingkatan yaitu pada eksekutif, legislatif (DPRD) dan juga

<sup>5</sup> *Peraturan Anti Korupsi*, diakses pada tanggal 7 Agustus 2007, dalam [www.pemantau\\_peradilan.com.detail/detail.php?id=232&tipe=opini](http://www.pemantau_peradilan.com.detail/detail.php?id=232&tipe=opini).



Badan Usaha Milik Pemerintah. Untuk dapat melihat peningkatan yang signifikan terkait kasus korupsi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Kecenderungan Tren Korupsi Tahun 2004-2006

Tahun	Kasus			Total Kasus	Persentase	Besar Kerugian ( Trilyun Rp)	Persentase
	Eksekutif	DPRD	BUMN/D				
2004	48	48	13	109		4,3	
2005	47	31	8	86	Turun 21%	5,3	Naik 23%
2006	69	17	49	135	Naik 60%	14,4	Naik 171%

Sumber: Kecenderungan Korupsi: Eksekutif posisi teratas, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id),<sup>6</sup> diolah.

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilaporkan bahwa tren korupsi yang dilaporkan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) yang paling tinggi selalu terjadi pada tingkatan eksekutif. Kemudian jika dilihat dari tren jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2005 mengalami penurunan jumlah kasus dari yang sebelumnya pada tahun 2004 berjumlah 109 kasus, kini menjadi 86 kasus atau terjadi penurunan sebesar 21%. Kenyataan yang sangat memprihatinkan ketika dilihat jumlah kasus korupsi pada tahun 2006 melonjak menjadi 135 kasus atau naik sekitar 60% dari tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah kasus korupsi ini ternyata senada dengan besarnya jumlah kerugian yang diderita negara karena kasus korupsi yaitu sebesar Rp.14,4 trilyun rupiah. Angka ini sangat fantastis karena terjadi kenaikan sebesar 171% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp.5,3 trilyun. Selain itu, BPKP juga melaporkan temuan terbarunya berupa data kerugian negara akibat kasus yang terindikasi sebagai korupsi yang melibatkan pengelola keuangan negara sebesar Rp. 9,858 trilyun, dimana dari jumlah tersebut

<sup>6</sup> *Kecenderungan Korupsi: Eksekutif posisi teratas*, diakses tanggal 19 Februari 2007, dalam [www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=bi&task=view&id=276&dan=11&md=1](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=bi&task=view&id=276&dan=11&md=1).



60–70% di antaranya disebabkan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>7</sup> Berbagai fenomena terjadinya praktek korupsi dan kerugian negara yang terjadi selama ini, mengindikasikan tidak adanya nilai akuntabilitas di dalam proses pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas diperlukan, karena aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakannya dan kinerjanya kepada publik dan organisasi tempatnya bekerja. Menurut Ali Farazmand, akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian yang esensi untuk menciptakan pemerintah dan administrasi publik yang kuat, serta dapat mewujudkan perilaku yang etik dalam meningkatkan profesionalisme dengan kekuatan komprehensi dan efisiensi.<sup>8</sup>

Dalam upaya mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain melalui Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala LAN No.589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP dan kemudian disempurnakan melalui Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Dalam kedua dokumen tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja tersebut harus berdasarkan rencana kerja dan kegiatan yang berpedoman kepada rencana

<sup>7</sup> BPKP temukan kerugian Negara Rp. 9,8 trilyun, diakses tanggal 27 Juni 2007, dalam <http://kormonev.menpan.go.id>.

<sup>8</sup> Saraswati, Dhani. 2007, *Good Governance : Memahami konsep Akuntabilitas*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.VII No.2/Maret Agustus, hal. 575-589.





strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dari instansi yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang menandai pelaksanaan Otonomi daerah, maka butuh adanya pengelolaan keuangan yang lebih baik, Reformasi pengelolaan Keuangan daerah dimulai dengan dimunculkannya PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Peratnggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang kemmudian juga direvisi menjadi Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Melalui kedua peraturan tersebut, reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam bidang penyusunan anggaran mengalami perubahan yang mendasar baik dari segi struktur maupun mekanisme penyusunannya. Perubahan mekanisme penyusunannya yaitu berubah dari pendekatan *line item* menjadi pendekatan kinerja. Sedangkan secara struktur, yaitu berubahnya dari penggunaan anggaran bersifat tradisional menjadi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Anggaran tradisional merupakan proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan

<sup>9</sup> Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. *Pentingnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Majalah Usahawan No.12 Tahun XXXV, Desember, hal. 25-28



pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Selain itu, anggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui Anggaran kinerja maka pemerintah dapat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang rasional dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perubahan struktur anggaran dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dari pemerintah.

Dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ditekankan pada prinsip tertentu. Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Namun, berbagai kendala dalam penerapan anggaran kinerja pada dasarnya menunjukkan bahwa reformasi anggaran tidaklah secara otomatis mengubah proses penyusunan anggaran menjadi lebih berorientasi *output*. Apalagi bila penyusunannya tidak diimbangi dengan perubahan budaya di kalangan penyusun anggaran sehingga meskipun alokasi didasarkan pada program, namun tumpang tindih program masih terjadi. Dengan demikian, anggaran kinerja diharapkan juga dapat berperan dalam merasionalisasikan birokrasi pemerintah daerah sehingga jumlah aparat dapat disesuaikan dengan beban kerja dari setiap program. Upaya ini dapat membantu mengatasi kemungkinan defisit anggaran sehingga pertimbangan pengalokasian anggaran benar-benar didasarkan pada *value for money*, bukan sekadar bagi-bagi



anggaran bagi setiap unit kerja jika memang programnya tidak terlampaui signifikan dengan skala prioritas. Dengan adanya penganggaran berbasis kinerja tersebut dapat menjadikan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah menjadi semakin baik.

Masalahnya, walaupun sudah melaksanakan sistem penganggaran yang baru dengan menggunakan sistem anggaran kinerja tetap saja masih banyak kekurangan. Bisa dikatakan bahwa penggunaan anggaran berbasis kinerja masih sebatas teori saja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menkeu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja masih sebatas teori. Karena dalam praktiknya, penyusunan APBN dan APBD masih berorientasi menghabiskan anggaran.<sup>10</sup> Sementara itu, ekonom Sri Adiningsih menyatakan APBN berbasis kinerja akan sulit dicapai jika tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai tahapan yang ingin dicapai. Masih menurut Sri, tolok ukur itu bisa dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, kecilnya penyimpangan dan kebocoran anggaran, dan adanya kriteria kinerja yang ingin diraih.<sup>11</sup>

Sebenarnya, diharapkan dengan adanya anggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam menentukan perencanaan program/kegiatan secara tepat dan cermat sehingga akan dapat menghasilkan kinerja yang akuntabel dari instansi yang bersangkutan. Pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja,

<sup>10</sup> *APBN Berbasis Kinerja Sebatas Teori*, Media Indonesia, Jakarta, 07 Juni 2005

<sup>11</sup> Rahayu, Heni. 2005, *Ekonomi Makro : APBN Berbasis Kinerja Sulit Dicapai*, diakses tanggal 25 Juni 2007, dalam [//www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=136349](http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=136349).



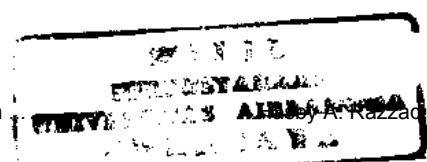
yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja dari instansi bisa dilihat dari daya serap anggaran selain juga dilihat pada besar kecilnya nilai kebocoran anggaran. Terkait dengan besar kecilnya kebocoran anggaran dapat dilihat dari temuan yang dilaporkan oleh BPK terkait dengan jumlah kerugian negara selama rentang waktu 2005 hingga 2006. Temuan tersebut meliputi jumlah kerugian negara terkait dengan kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan bendahara, kelalaian PNS bukan bendahara dan Kelalaian pihak ke tiga. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan berupa tabel kerugian Negara terkait dengan kerugian Negara yang disebabkan oleh kesalahan bendahara, kelalaian PNS bukan bendahara dan kelalaian pihak ke tiga.

Tabel 1.3  
Total Kerugian Negara Tahun 2005 dan 2006

No	Kelompok	Jumlah kasus dan Nilai Kerugian Negara				Persentase Kenaikan dan Penurunan (perbandingan th.2005 dan 2006)	
		2005		2006		Jml.kasus	Rp (juta)
		Jml.kasus	Rp (juta)	Jml.kasus	Rp (juta)		
1	Pemerintah Pusat	2297	4.666.804,06	2784	3.288.269,64	Naik 21 %	Turun 30 %
2	Pemerintah Daerah	5817	771.785,51	6603	1.231.492,31	Naik 14 %	Naik 60 %
3	BUMN	883	187.983,82	751	347.284,96	Turun 15 %	Naik 85 %
Total		8997	5.626.573,39	10138	4.867.046,91	Naik 13 %	Turun 13 %

Sumber: BPK ( [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) )<sup>12</sup>, diolah

<sup>12</sup> BPK, *Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara tahun anggaran 2005 dan 2006*, bagian V, diakses tanggal 27 Juni 2007, dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).





Berdasarkan temuan data oleh BPK terkait dengan total kerugian negara pada tahun 2005 dan 2006, dapat dilihat seperti pada tabel di atas, bahwa jumlah kasus yang menyebabkan kerugian pada negara yang terjadi pada pemerintah pusat pada tahun 2005 sejumlah 2.297 kasus, sedangkan pada tahun 2006, jumlah kasus kerugian negara pada instansi pemerintah pusat melonjak menjadi 2.784 kasus atau naik sekitar 21%. Untuk jumlah kasus kerugian Negara yang terjadi pada instansi pemerintah daerah pada tahun 2005 berjumlah 5.817 kasus dan naik menjadi 6.603 kasus pada tahun 2006 atau meningkat 14% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari Institusi BUMN, jumlah kasus kerugian Negara pada tahun 2005 berjumlah 883 kasus, dan turun menjadi 751 kasus pada tahun 2006. Penurunan ini berkisar pada nilai 15%. Selanjutnya jika dilihat dari nilai kerugian Negara dalam rupiah, yang terjadi pada pemerintah pusat pada tahun 2005 berjumlah Rp.4.666.804,06 trilyun dan nilai kerugian ini menurun pada tahun 2006 menjadi Rp.3.288.269,64 trilyun. Penurunan ini berkisar 30%. Pada instansi pemerintah daerah tahun 2005 terjadi kerugian sebesar Rp.771.85,51 milyar dan naik menjadi Rp.1.231.492,31 trilyun atau naik 60% pada tahun 2006. Sedangkan pada BUMN, nilai kerugian negara pada tahun 2005 berjumlah Rp.187.983,82 milyar dan naik menjadi Rp.347.284,96 milyar pada tahun 2006 atau naik sekitar 85%.

Jika dilakukan perbandingan secara total keseluruhan antara tahun 2005 dan 2006, maka jumlah kasus kerugian Negara yang terjadi pada tahun 2005 yang berjumlah 8.997 kasus, naik menjadi 10.138 pada tahun 2006. Peningkatan ini



mencapai 13%. Sedangkan dari sisi total kerugian yang diderita Negara dari aspek rupiah pada tahun 2005 berjumlah Rp.5.626.573,39 trilyun dan turun menjadi Rp.4.867.046,91 trilyun atau 13% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dari beberapa pemaparan terkait dengan kerugian yang diderita oleh negara bisa menjadi suatu indikasi belum baiknya kinerja instansi pemerintah dalam mengelola keuangan.

Selain laporan terkait besarnya kebocoran anggaran atau kerugian negara yang disampaikan oleh BPK tersebut, hasil audit yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara tahun 2004 hingga tahun 2007, jumlah kerugian negara akibat salah urus manajemen pengelolaan keuangan negara mencapai Rp 9 trilyun atau lebih dari 10 juta dolar AS.<sup>13</sup> Selanjutnya terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, berdasarkan opini BPK, memperlihatkan bahwa dari 82 entitas di tingkat pusat yang diaudit BPK, sebanyak enam entitas (7%) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 39 entitas (47%) mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 37 entitas (46%) dengan opini disclaimer. Selanjutnya terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dari 362 pemda yang diaudit BPK, sebanyak tiga pemda (1%) mendapat opini WTP, 282 pemda (79%) dengan opini WDP, 58 pemda (15%) dengan opini disclaimer, 19 pemda (5%) dengan opini tidak wajar.<sup>14</sup> Hal di atas tentu saja akan memengaruhi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah secara makro karena menggambarkan kondisi pemerintah

<sup>13</sup> *BPKP Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 9 Triliun*, diakses tanggal 10 November 2007, dalam <http://investigasi.korupsi.com/index.php>.

<sup>14</sup> *Ibid.*



yang belum menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain beberapa pemaparan diatas, ada indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah. Indikator tersebut dapat dilihat melalui besar kecilnya kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran. Selanjutnya akan diperlihatkan beberapa berita terkait dengan rendahnya kemampuan instansi pemerintah dalam hal penyerapan anggaran. Fenomena ini dapat dilihat dari pengelolaan APBD Pemprov Jawa Timur juga dipertanyakan. Ini tak terlepas dari minimnya tingkat serapan anggaran belanja. Hingga pertengahan tahun ini, instansi di lingkungan pemprov Jawa Timur baru bisa merealisasikan 27% dari total rencana belanja.<sup>15</sup> Dari laporan sementara semester I Tahun 2007, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5,046 trilyun. Namun, hingga semester kedua ini yang sudah direalisasikan baru Rp.1,402 trilyun saja. Sehingga sisanya sejumlah Rp.3,643 trilyun masih menganggur. Sebagian besar pos yang tingkat serapan anggarannya minim ternyata langsung berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk masyarakat. Pada dinas PU Binamarga dan Pengairan, anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp.477,74 milyar, namun yang terserap baru Rp.106,9 milyar atau sekitar 22,3%. Hal yang sama juga terjadi pada Dinas P dan K, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.186,2 milyar. Hingga kini, yang terserap baru Rp.46,04

---

<sup>15</sup> *Juga minim, serapan APBD Pemprov Jatim, tengah tahun baru 27%*, Jawa Pos, Sabtu 8 September 2007



milyar, atau baru sekitar 24,7%. Anggaran di Dinas Kesehatan yang berjumlah Rp.603,05 milyar, yang terserap baru Rp.179,5 milyar atau baru sekitar 29,7%.<sup>16</sup>

Terkait dengan fenomena minimnya penyerapan anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Wakil ketua DPRD Jatim Suhartono mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dia menilai, minimnya tingkat serapan anggaran Pemprov tahun ini, disebabkan panjangnya proses birokrasi yang terkait masalah anggaran itu sendiri. Sementara itu, pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur sendiri tidak menampik masalah tersebut, tapi mereka menyangkal bila minimnya penyerapan anggaran tersebut dikaitkan dengan buruknya kinerja mereka. Menurut asisten Administrasi pembangunan Pemprov Jatim Chusnul Djaelani, minimnya penyerapan anggaran pemerintah lebih banyak disebabkan molornya pengesahan APBD 2007.<sup>17</sup>

Realita yang sama juga terjadi pada kinerja Pemerintah kota Surabaya. Kinerja Pemkot Surabaya tahun ini sangat mengecewakan. Pasalnya, hingga akhir Agustus 2007, APBD Surabaya yang senilai Rp.2,1 trilyun hanya terserap 32,81%, atau baru terealisasi sebesar Rp.689 milyar, sisanya sejumlah Rp.1,4 trilyun atau 67,19%. Dari banyaknya satuan unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemkot Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas yang sejauh ini paling banyak menyerap anggaran. Hal ini terlihat dari jumlah alokasi anggaran untuk dinas ini yang berjumlah Rp.233 milyar, dan hingga saat ini sudah terserap sebesar Rp.93,2 milyar (40%). Sedangkan Dinas di lingkungan Pemkot Surabaya yang paling sedikit menyerap anggaran adalah Dinas Tata kota dan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid





Permukiman, karena dari total alokasi anggaran yang sejumlah Rp. 463 milyar, baru terserap Rp.83 milyar (18% saja). Kondisi ini menunjukkan Pemkot Surabaya tidak serius dalam mengelola APBD yang seharusnya maksimal diusahakan untuk kepentingan warga.<sup>18</sup> Terkait dengan buruknya kinerja pemkot Surabaya, anggota Komisi A DPRD kota Surabaya Krisnadi Nasution menilai, seharusnya sampai Agustus ini, pemkot Surabaya sudah bisa menyerap tiga per empat anggaran APBDnya.<sup>19</sup> Lain halnya dengan Walikota Surabaya Bambang D.H, yang mengakui bahwa anggaran yang diserap satuan kerja di Pemkot Surabaya memang belum maksimal karena disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keragu-raguan dinas dalam menjalankan programnya karena gerakan hukum yang mengincar para koruptor.<sup>20</sup>

Hal lainnya yang dapat dilihat terkait dengan fenomena belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dengan ditemukannya data mengenai masih banyaknya instansi pemerintah yang belum menyerahkan Laporan kinerja instansi pemerintah ( LAKIP ), padahal instansi tersebut telah diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansinya. Hal ini tergambar melalui data yang disampaikan oleh BPKP pada tahun 2003.

---

<sup>18</sup> *APBD Surabaya baru terserap 32%, pejabat Pemkot takut kena jerat hukum*, Jawa Pos, Minggu 9 September 2007

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid



Tabel 1.4  
Pelaporan LAKIP Instansi Pemerintah Tahun 2001

Instansi	wajib berLAKIP	menyerahkan LAKIP	Persentase
Departemen	30	20	66,67
LPND	25	17	68
Instansi Vertikal	405	309	76,3
Perwakilan RI di LN	119	10	8,4
Propinsi	27	10	37
Kabupaten	262	57	21,8
Kota	80	25	31,3
Dinas	7606	2348	30,9
Total	8554	2796	32,7

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2003.<sup>21</sup>

Dari tabel di atas yang merupakan data tahun 2001, menyebutkan secara total keseluruhan instansi pemerintahan yang berjumlah 8554 instansi yang wajib berLAKIP, namun pada kenyataannya hanya ada 2796 instansi saja yang menyerahkan LAKIP atau hanya berkisar 32,7% saja. Dari beberapa instansi yang tertera pada tabel tersebut, hanya Instansi Departemen saja yang mampu memperoleh hasil di atas 50% terkait dengan kewajiban dalam menyerahkan LAKIP. Hal ini tentu saja mengindikasikan belum adanya nilai akuntabilitas terkait dengan kewajiban melaporkan kinerja instansi pemerintahan tersebut. Hal lainnya yang dapat dilihat terkait dengan belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui pelaporan AKIP yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Tabel 1.5  
Perkembangan Instansi Pemerintah yang Telah Menyerahkan LAKIP  
Tahun 2001-2004

Penjelasan	Tahun			
	2001	2002	2003	2004
Populasi	484	484	484	515
Telah menyerahkan LAKIP	126	318	432	405
Persentase	26,03	65,7	89,2	78,7

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> BPKP, *AKIP 2003*, diakses tanggal 19 Februari 2007, dalam [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).



Dari tabel 1.6 di atas dapat dilihat bersama bahwa dalam rentang waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2001 hingga tahun 2003 selalu terjadi peningkatan dalam jumlah instansi pemerintah yang memberikan pelaporan AKIP. Tapi hal yang berbeda terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi penurunan jumlah instansi yang menyerahkan pelaporan AKIP. Hal ini menandakan belum adanya kesadaran yang penuh dari seluruh instansi pemerintah dalam menyerahkan pelaporan AKIP. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelaporan AKIP ini sudah pasti dipengaruhi dari profesionalisme sumber daya manusia aparat pelaksana. Pelaksanaan desentralisasi dan perwujudan otonomi daerah diperlukan peranan aparatur negara yang profesional dan memiliki kredibilitas dalam melayani masyarakat. Sehingga diharapkan ada peningkatan produktifitas kerja dalam pelayanan publik, sebagai upaya menuju pemerintahan yang baik.

Tumpuan dan harapan dalam menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu lebih tertuju pada aparatur pemerintah daerah mengingat mereka merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3

<sup>22</sup> *Kondisi Pendayagunaan Aparatur Negara saat ini*, diakses tanggal 9 Desember 2007, dalam [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id).



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa: "Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan."<sup>23</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bintoro bahwa keberhasilan pembangunan amat ditentukan oleh keberhasilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur negara, terutama segi kepegawaian, merekalah yang menjadi pelaksana-pelaksana kegiatan usaha pemerintahan.<sup>24</sup> Dalam melaksanakan tugas atau kegiatan pemerintahan, aparatur negara dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi. Dengan begitu, profesionalisme aparat dijadikan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain tuntutan terhadap profesionalisme aparat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tuntutan masyarakat juga banyak yang berhubungan dengan akuntabilitas publik terhadap permasalahan transparansi informasi terkait keuangan daerah. Salah satu sarana penunjang yang dapat mendukung terselenggaranya *good governance* adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemerintahan akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ini akan dapat memperbaiki pelaksanaan

<sup>23</sup> *Profesionalisme aparatur pemerintah*, diakses tanggal 9 Desember 2007, dalam <http://skripsihukum.com/06/15/profesionalisme.htm>.

<sup>24</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hal.122.



program pemerintah yang selama ini kurang efektif dan efisien sehingga ini akan membantu tercapainya kinerja birokrasi/instansi pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi saat ini adalah munculnya media internet (*global network*) atau dengan istilah dunia maya. Hampir seluruh bidang aktivitas masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari penggunaan *network global* ini. Mulai di bidang perekonomian dan perbankan, pertahanan, sosial dan kebudayaan, pendidikan dan tentunya digunakan sebagai media pembantu dalam aktivitas birokrasi dan pemerintahan. Dalam penggunaannya pada instansi pemerintahan media internet diarahkan dapat mendukung dalam pengolahan administrasi dan manajemen pemerintahan. Dengan *global network* sistem informasi birokrasi, sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan akan bersifat terbuka dan transparan serta dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga informasi dapat menyebar secara merata.<sup>25</sup> Esensi terpenting dari *e-government* adalah pemanfaatan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam konteks ini peningkatan kinerja diartikan sebagai terciptanya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelola internal maupun dalam pelayanan kepada publik.

Pemanfaatan *e-government* terkait dengan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya diwujudkan dengan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja instansi pemerintah dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 69



pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik ini, mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang lebih transparan terkait masalah keuangan kepada masyarakat. Pemberian informasi oleh pemerintah daerah ini bisa diaktualisasikan dalam bentuk Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sarana dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional yang bertujuan untuk (a) perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; (b) penyajian informasi keuangan daerah secara nasional; (c) perumusan kebijakan keuangan daerah; serta (d) sebagai pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah. Informasi keuangan tersebut dapat digunakan dalam menampilkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja instansi pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Terry bahwa sistem informasi tersebut akan menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh organisasi agar dapat memberikan bantuan maksimum dalam pencapaian tujuan.<sup>26</sup> Dengan begitu, SIKD memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi keuangan terkait kinerja instansi pemerintah. Untuk itu

<sup>26</sup> Gie, The Liang. 1988, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, hal.55



SIKD dijadikan sebagai variabel pengaruh kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan SIKD tersebut mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema penelitian terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wigit Indranto (2002) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur*".<sup>27</sup> Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Propinsi Jawa Timur masih belum optimal disebabkan belum banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang baik di pusat maupun daerah terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widhi Anggraeni (2005) yang mengambil judul "*Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)*".<sup>28</sup> Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tapi belum secara optimal. Hal ini disebabkan karena hambatan di dalam penerapannya.

Penelitian-penelitian di atas lebih menekankan pada bagaimana penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping juga bersifat

---

<sup>27</sup> Indranto, Wigit. 2002, *Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur*, Universitas Airlangga, Surabaya.

<sup>28</sup> Anggraeni, Widhi. 2005, *Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA)*. Universitas Airlangga, Surabaya..



menggambarkan apakah AKIP yang dilaksanakan oleh instansi yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan AKIP sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan antara profesionalisme aparat dan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta bagaimana pengaruhnya.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Apakah ada pengaruh tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Jika terdapat pengaruh, maka Seberapa besar pengaruh tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menerangkan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :





1. Mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus melakukan pengujian hipotesa.
2. Secara akademis diharapkan peneliti dapat memberikan wacana baru bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori yang diterima, dan dapat menambah kepekaan bagi mahasiswa dalam menjawab fenomena yang timbul di dalam masyarakat.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang obyektif dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta sebagai informasi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Hasil penelitian ini dapat pula memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi Badan Pengelola Keuangan, Pemerintah kota Surabaya, dan juga instansi-instansi terkait untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya dan selalu berupaya menerapkan nilai-nilai akuntabilitas terkait dengan kinerja, baik yang telah dilakukan oleh aparat maupun institusi terkait



## I.4 Kerangka Teori

### I. Keuangan Daerah

#### A. Pengertian Keuangan Daerah

Dengan munculnya reformasi, maka pelaksanaan otonomi daerah pun secara otomatis juga dimulai. Terkait dengan aspek otonomi daerah, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan yang luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Tuntutan itu juga berwujud pada keinginan daerah akan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara lebih rasional dan proporsional. Lebih lanjut, keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diatur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini juga ditegaskan oleh Mardiasmo yang menyatakan bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan dan anggaran daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah, yang merupakan bagian integral dari keuangan negara.<sup>29</sup>

Terkait dengan aspek keuangan daerah, terlebih dahulu sebaiknya kita harus mengetahui pengertian dari keuangan daerah itu sendiri. Suparmoko, menyatakan pengertian keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang ekonomi tersebut. Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>29</sup> Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta, hal. 11



stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta pencapaian kesempatan kerja.<sup>30</sup>

Kuangan Daerah menurut Dasril Munir, Henry Aris Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkiliasn adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>31</sup> Menurut Jaya, keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah<sup>32</sup>. Sedangkan menurut Mamesah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian terkait dengan keuangan daerah seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko, secara garis besar Suparmoko melihat keuangan daerah sebagai besarnya nilai pengaruh antara pendapatan dan belanja dari suatu anggaran terhadap tujuan kegiatan ekonomi secara makro. Sedangkan menurut H. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan keuangan daerah lebih ditekankan pada keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan serta kebijaksanaan terkait dengan pendapatan dan belanja. Tidak jauh beda dengan pendapat sebelumnya, Jaya pun memiliki pendapat yang sama terkait dengan pengertian keuangan daerah. Bisa dikatakan disini bahwa keuangan daerah

<sup>30</sup> Suparmoko, M., 1979, *Azas-azas ilmu Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta

<sup>31</sup> Munir, H. Dasril, Djuanda, Henry Arys dan Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, hal 96

<sup>32</sup> Jaya Kirana, Wihana. 1999, *Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro*, PPEB UGM Yogyakarta., hal. 11

<sup>33</sup> Mamesah, D. J. 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



menurut Dasril Munir, Henry Aris Djuanda, Hesssel Nogi. S dan juga Jaya tidak akan terlepas dari tatanan yang dapat berupa aturan, tata tertib serta sistem yang berlaku, perangkat kelembagaan yang bersifat mendukung fungsi utama dari lembaga dan berperan dalam pengalokasian pendapatan dan belanja daerah, juga tidak terlepas dari kebijaksanaan yang terkait dengan aturan hukum yang mengatur atau mendasari proses anggaran daerah yang dimaksud.

Berbeda dengan beberapa ahli sebelumnya, Mamesah memandang keuangan daerah sebagai hak dan kewajiban dari daerah yang bisa dinilai dengan uang, ataupun setiap barang maupun uang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan daerah. Terkait dengan pengertian ini, maka keuangan daerah menurut pandangan Mamesah dirumuskan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik itu uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Dengan demikian setelah melihat berbagai pemaparan terkait dengan pengertian keuangan daerah, maka batasan pengertian keuangan daerah dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

## **B. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Perkembangan *Good Governance* menjadi tema yang sentral sebagai reaksi terhadap tata pemerintahan yang cenderung korup dan tidak memperhatikan fungsinya yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Pemerintahan yang buruk cenderung terjebak ke dalam lingkaran elit



penguasa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Implikasi langsung dari fenomena tersebut adalah kualitas pelayanan pemerintah yang amat buruk. Padahal untuk kerja operasional pemerintah itu dibiayai langsung melalui uang rakyat.

Banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan berbagai tindak penyelewengan yang dilakukan oleh aparat, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan menunjukkan bagaimana buruknya pengelolaan keuangan pemerintah oleh pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan daerah menurut Devas dkk adalah mengurus dan mengatur keuangan daerah berdasarkan prinsip tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, prinsip kejujuran, prinsip hasil guna (*effectiveness*), dan daya guna (*efficiency*) serta prinsip pengendalian.<sup>34</sup>

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah<sup>35</sup>. Pengertian mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini

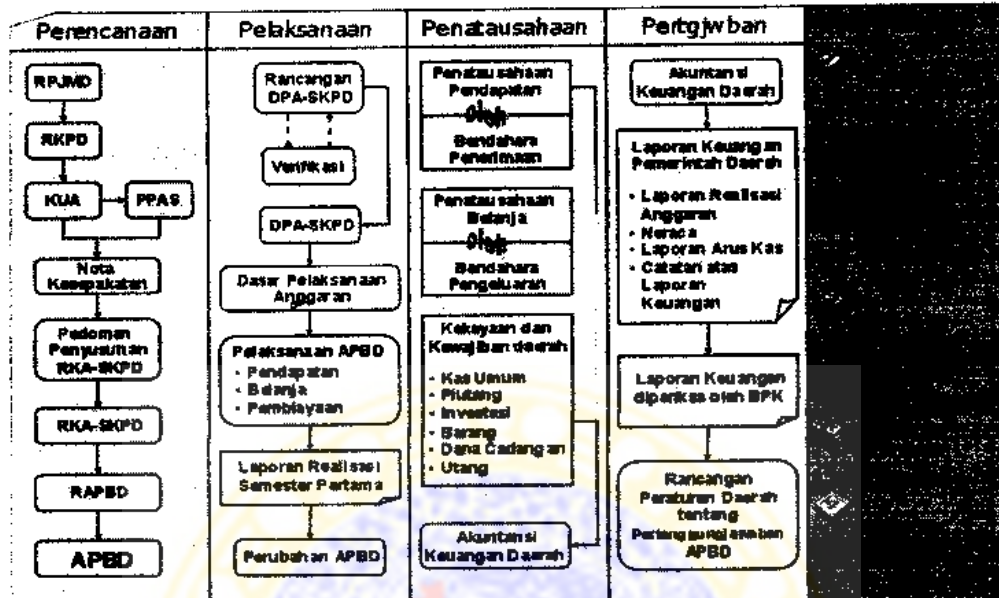
---

<sup>34</sup> Devas, Nick, dkk. 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan dari Masri Maris, UI Press, Jakarta., hal. 279-280

<sup>35</sup> Suhadak dan Nugroho, Trilaksono, 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi*, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 136



Bagan I.1  
Pengelolaan Keuangan Daerah



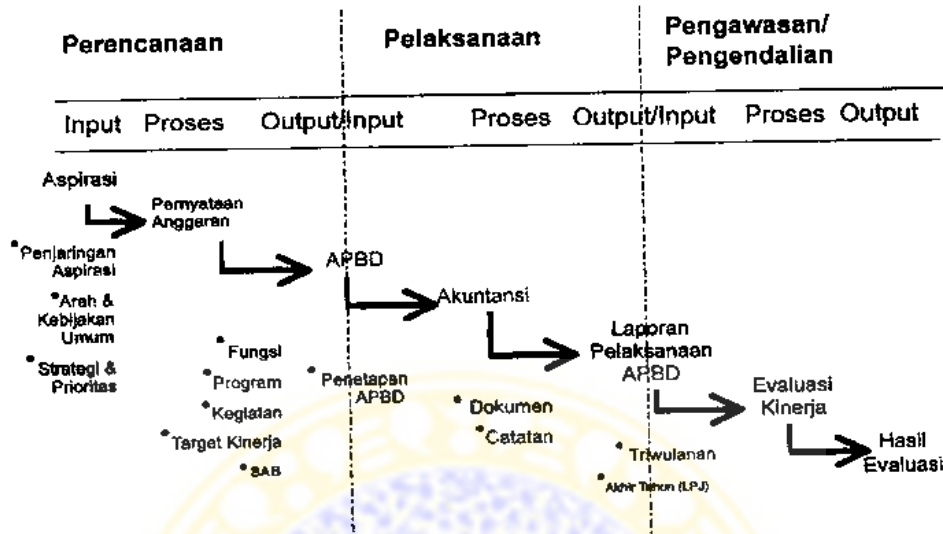
Sumber: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era otonomi, Malang : Bayu Media Publishing.

Pendapat lainnya mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan yang meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan.<sup>36</sup> Dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini, diawali melalui proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui bagan berikut ini.

<sup>36</sup> Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Magister Administrasi Publik UGM bekerjasama dengan ADEKSI, Yogyakarta, hal. 200



Bagan 1.2  
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*.<sup>37</sup>

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD dan pemerintah daerah. Usulan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada setiap unit kerja. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan dan sasaran serta hasil terukur yang disetarakan dengan usulan anggaran. Pengukuran anggaran masing-masing kegiatan diproses dengan SAB (standar analisis belanja) dan SB (standar belanja) yang mengandung nilai-nilai kewajaran. Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang telah ditetapkan oleh DPRD. Pengeluaran APBD dicatat melalui sistem akuntansi dan menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik laporan triwulan maupun tahunan sebagai bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kepala daerah. Disamping itu terdapat proses pengawasan dan pengendalian yang telah dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban. Proses

<sup>37</sup> Opcit. Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. 2005



ini diperlukan agar sejak awal dapat menghindari dan mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Seperti yang telah diketahui bersama di dalam proses perencanaan anggaran tersebut terdapat kegiatan penyusunan anggaran, dimana terdapat peran bersama antara eksekutif yaitu pemerintah daerah bersama legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD. Selain kegiatan penyusunan anggaran terdapat pula pembahasan anggaran yang merupakan kegiatan legislatif dalam mengkritisi usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, setelah melewati tahap pembahasan anggaran maka kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan anggaran adalah berupa pengesahan anggaran yang berupa sidang paripurna DPRD untuk menyetujui anggaran.

Setelah proses perencanaan anggaran telah disetujui, proses selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran yang merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun. Selama keseluruhan proses berlangsung, ada satu proses yang sangat penting yaitu pengawasan dan pengendalian anggaran, dalam proses ini dilakukan pengawasan dan pengendalian anggaran oleh aparat berwenang terhadap pelaksanaan anggaran agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah difariskan dan untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Selain beberapa proses yang telah disebutkan di atas, ada satu lagi proses yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pertanggungjawaban anggaran yang merupakan kegiatan dari eksekutif dalam menjelaskan dan





melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan terakait dengan pelaksanaan anggaran.

Dari beberapa pemaparan tentang pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kesimpulan pengertian pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka teori ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan Keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan pastinya dibutuhkan perangkat ketentuan guna mengatur seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pada :

- a. UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. UU RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- d. PP RI No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah berubah menjadi PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- e. PP RI No. 53 tahun 2005 tentang Perubahan atas penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>38</sup>

Kehadiran keenam paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara/daerah diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kuat dalam upaya

<sup>38</sup> Loc. Cit, Munir, H. Dasril, Djuanda, Henry Arys dan Tangkilisan, Hessel Nogi S, hal 81



mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan keuangan negara.

### C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam pengelolaan keuangan daerah yang berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan menggunakan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini digunakan sebagai dasar acuan bagi aparat pemerintah daerah di dalam mengelola keuangan daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas (1987 : 279-280) adalah sebagai berikut :

a) **Tanggungjawab (*accountability*)**

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang tersebut itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b) **Mampu memenuhi kewajiban keuangan**

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c) **Kejujuran**

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

d) **Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)**

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan diselenggarakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e) **Pengendalian**

Para aparat pengelolaan keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Mardiasmo, prinsip pengelolaan keuangan daerah ini diperlukan sebagai alat untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

---

<sup>39</sup>Op.Cit. Munir, H. Dasril, Djuanda, Henry Arys dan Tangkilisan, Hessel Nogi S, hal. 81



(a) Akuntabilitas yaitu mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal secara baik; (b) *Value for Money*, Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik; (c) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*) yaitu Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan; (d) Transparansi, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat; (e) Pengendalian yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi ke depan.<sup>40</sup>

Dari pemaparan terkait dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah baik yang disampaikan oleh Devas maupun Mardiasmo memiliki banyak persamaan. Untuk mencapai suatu tujuan yaitu *good governance*, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus bercirikan atas nilai akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban terkait pelaksanaan anggaran. Baik Devas maupun Mardiasmo sepakat dengan nilai akuntabilitas ini. Menurut Devas ada prinsip mampu memenuhi kewajiban keuangan terkait ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini bisa langsung dikaitkan ke dalam prinsip akuntabilitas karena terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah daerah terkait masalah keuangan. Prinsip lainnya adalah kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik, baik Devas maupun Mardiasmo mencantumkan prinsip ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan

<sup>40</sup> Loc.Cit. Mardiasmo, Hal. 29



daerah diperlukan untuk mencegah penyelewengan dan akan mempermudah proses akuntabilitas keuangan. Prinsip lainnya menurut Mardiasmo adalah *value for money*, sedangkan menurut Devas adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut peneliti, konsep efektivitas dan efisiensi merupakan bagian dari prinsip *value for money*. Prinsip yang terakhir, baik menurut Devas maupun Mardiasmo adalah pengendalian. Pengendalian dibutuhkan untuk menilai dan mengawal pelaksanaan anggaran apakah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi dalam tulisan ini, prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, kejujuran, *value for money* dan pengendalian.

#### **D. Penganggaran Berbasis Kinerja**

##### **1. Paradigma NPM (*New Public Management*)**

Pada abad ke-21 ini berbagai tantangan dihadapi oleh administrasi Publik. Menurut Philips J. Cooper di dalam bukunya yang berjudul: *Public Administration for Twenty First Century*, tantangan tersebut terdiri dari: *Diversity, Accountability, Privatization, Civil Society, Democracy, Decentralization, Reengineering, The Empowering Effect of High Technology*.<sup>41</sup>

Sedangkan bagi Hughes dalam *Management and Public Administration* menyetengahkan:

*"Challenges, Oppurtunities and Directions in a number issues on Public Administration as: The Culture Milieu of Public Administration, Crisis and Disaster Management, Strengthening of Local Level Institutions, Promoting Accountability in Public management, Human Resources Developemnt, The impact of Technology of Public Administration, Managing Economic and Technology Interdependencies"*.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Cooper, P. J. 1998. *Public Administration for the Twenty First Century*. Orlando, Florida: Harcourt Brace

<sup>42</sup> Hughes, O E. 1994. *Public Managemet and Administration*., Josey Bass Publisher, San Fransisco.



Dari tantangan, tuntutan dan harapan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dibutuhkan adanya suatu perubahan baik pada konsep maupun teori Administrasi Negara dan juga figur publik administrator. Berkaitan dengan perubahan yang diharapkan tersebut, maka berubah juga kompetensi yang selama ini terkait dengan "*Traditional Public Administration*" untuk diarahkan dalam bentuk "*New Public Management*". Selama ini Administrasi Publik digambarkan sebagai birokrasi yang bertitik tekan pada COP (*Control, Order dan Prediction*), *Rigidity*, terikat pada *political authority, tightening control, to be given and following the instruction* kemudian sejalan dengan perubahan yang terjadi maka Administrasi Publik dituntut sebagai Administrasi Publik baru yang berindikasikan ACE (*Alingment, Creativity and Empowering*), *flexible*, terikat oleh *political commitment*, memiliki *strategy*, berorientasi pada *output/results*, bernuansa *privatization* atau *contracting out*.<sup>43</sup>

Dari beberapa tinjauan singkat terlihat jelas adanya tuntutan untuk melepaskan diri dari konsep Administrasi Negara yang berbasis *ideological roots of Weberian bureaucracy* dan *democratic stage* atau *politics govern* kepada Administrasi Publik yang berbasis *market oriented public administration*. Perubahannya lebih kepada *Citizens as a Customer*.

Pada era tahun 80-an dan awal tahun 90-an muncul pendekatan *new managerial* di dalam *sector public* yang merupakan respon terhadap kelemahan atau kekurangan pada *traditional model of public administration*. Berbagai nama

---

<sup>43</sup> Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Program MAP UGM dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hal. 4



diperkenalkan untuk pendekatan managerial ini, antara lain: *Managerialism* (Pollit, 1990); *New Public Management* (Hood, 1991); *Entrepreneurial Government* (Osborne and Gaebler, 1992). Meskipun *New Public Management* (NPM) disebut dengan berbagai nama, akan tetapi memiliki kesamaan konsep dan tujuan: Pertama, lebih menitikberatkan pada *achievement of results* dan *the personal responsibility*; Kedua, penekanan kepada *performance indicators* sebagai ukuran baik untuk organisasi maupun personel, sehingga diperoleh 3ES: *economy, efficiency, effectiveness*; Ketiga, berusaha menghilangkan tendensi *classic bureaucracy* dengan membuat organisasi, personel dan kondisi yang ada menjadi lebih fleksibel; Keempat, lebih membuat para pejabat untuk *committed* terhadap politik/keputusan politik, tidak hanya sebagai pelaksana yang netral; Kelima, berusaha mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi; Keenam, orientasi dari *steering from rowing*.<sup>44</sup>

Terkait dengan konsep dan tujuan dari NPM (*New Public Management*) yang salah satunya berorientasi kepada hasil daripada masukan. Untuk dapat memfokuskan pada hasil, maka dibutuhkan adanya penilaian terhadap kinerja. Secara umum penilaian kinerja merupakan kunci penting menuju perbaikan dan kemajuan baik bagi suatu lembaga maupun individu. Hanya dengan penilaian kinerja, suatu lembaga atau individu dapat mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam mencapai tujuan, atau tidak. Selain itu, dengan melihat kesuksesan atau kegagalan maka seseorang pengambil keputusan atau lembaga dapat belajar dan menjadi sadar terhadap tingkat efektivitas dari cara yang ditempuh selamaini.

---

<sup>44</sup> Op.Cit. Utomo, Warsito, hal 5



Jadi, melakukan penilaian kinerja itu sendiri merupakan arena belajar yang sangat efektif bagi individu dan organisasi<sup>45</sup>

Di Indonesia, selama ini tradisi menilai kinerja pemerintahan masih didasarkan pada paradigma birokrasi klasik dimana kinerja diukur dari kemampuan lembaga pemerintahan mendanai *input*, dan dari sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan, tetapi sangat minim perhatian diberikan kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan. Tradisi ini dapat diamati dari upaya-upaya lembaga pemerintahan selama ini khususnya dalam penyediaan dana dan sarana serta fasilitas program atau proyek, kepatuhan suatu lembaga terhadap berbagai aturan dan prosedur formal, dan perluasan jangkauan kelompok sasaran atau penerima program atau proyek.

Salah satu kelemahan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah orientasi teoritis yang masih mengarah kepada birokrasi klasik dan mengutamakan cara daripada tujuan. Di masa mendatang, orientasi penilaian kinerja pemerintahan hendaknya mengikuti paradigma "*reinventing government*", yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi, dan bukan pada kemampuan mendanai *input* dan menjalankan proses. Dan pada saat ini tuntutan akan "*good governance*" menjadi semakin mendesak, sehingga nilai-nilai tersebut harus diakomodasikan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan.

Kinerja lembaga pemerintahan menggambarkan sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan telah mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan,

<sup>45</sup> Osborne, David dan Gaebler, Ted. 2005. *Mewirauahakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Birokrasi Publik*. Penerjemah: Abdul Rosyid, Penerbit PPM , Jakarta.



dengan memanfaatkan strategi yang telah dipilih lembaga tersebut. Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut, dibutuhkan dasar teori, sasaran dan parameter penilaian, metode penilaian yang jelas. Hal ini penting karena dapat diketahui dengan mudah mengapa orang melakukan penilaian, apa saja yang dinilai, bagaimana melakukan penilaian dan dalam kondisi apa mereka melakukan penilaian tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dasar teoritis dari penilaian kinerja pada saat sekarang adalah “*reinventing government*” yang menitik beratkan penilaian kinerja pada hasil.

Untuk dapat menilai kinerja pemerintahan dapat dikatakan berhasil ataupun gagal, maka dapat dilihat melalui anggaran. Dengan melihat sistem anggaran yang ada, lembaga pemerintahan yang berorientasi pada hasil harus mengembangkan penganggaran yang berorientasi pada hasil daripada berfokus pada masukan.

## **2. Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan variabel penting dalam mendukung kualitas kinerja pemerintah, mencerminkan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah. Karena itu anggaran sebagai salah satu diantara indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro di daerah, maka format anggaran mesti disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan yang objektif dari suatu daerah. Format anggaran yang disusun berdasarkan perhitungan yang tidak realistis akan berakibat pada pemborosan keuangan daerah. Sebab itu pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan suatu persoalan yang harus dikelola secara hati-hati.





Berbicara mengenai anggaran, Munandar mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan unit moneter dan berlaku dalam jangka waktu tertentu<sup>46</sup>. Anggaran menurut Ibnu Syamsi merupakan hasil perencanaan berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu<sup>47</sup>. Senada dengan kondisi itu, Mardiasmo memberikan pengertian anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial<sup>48</sup>. Anggaran Negara menurut John F. Due dalam Risnunu dan Sri Mastuti merupakan suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu.<sup>49</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan anggaran oleh Suparmoko adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang pendapatan dan belanja negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)<sup>50</sup>. Anggaran memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan daerah. Mardiasmo berpendapat bahwa arti penting anggaran pemda (anggaran daerah) dapat dilihat dari dua aspek berikut:

---

<sup>46</sup> Munandar, 1986. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengekoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*, BPFE Yogyakarta, hal. 1

<sup>47</sup> Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan, Pemrograman, dan penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Penerbit Rajawali, Jakarta, hal. 90

<sup>48</sup> Loc.Cit. Mardiasmo, hal. 61

<sup>49</sup> Risnunu dan Mastuti, Sri. 2003, *Panduan Praktis Mengontrol APBD, Civic Education and Budget Transparency Advocation (Ciba)* dan Friedrich Ebert Stiftung (FES). hal.1

<sup>50</sup> Suparmoko, 2000. *Kewangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta., hal.47



1. Anggaran merupakan alat bagi pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.<sup>51</sup>

Setelah melihat berbagai pemaparan dari para ahli baik dari pendapat Munandar, Ibnu Syamsi, John F. Due dalam Risnunu dan Sri Mastuti, Mardiasmo, maupun Suparmoko mengenai pengertian anggaran, terlihat tiga point penting terkait anggaran. Pertama adanya rencana keuangan. Rencana merupakan kegiatan yang berisikan pilihan dan estimasi terkait aspek keuangan dan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Semua ahli sepakat bahwa dalam anggaran harus ada rencana keuangan. Kedua, dalam rencana anggaran tersebut berisi berbagai aspek keuangan terkait dengan pendapatan, belanja dan seluruh aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga dalam anggaran ada yang dinamakan dengan periode waktu yang menjadi acuan. Jadi jelas, rencana keuangan yang telah digariskan tersebut diupayakan pencapaiannya selama kurun waktu tertentu.

### **3. Fungsi Anggaran**

Anggaran yang baik itu harus mampu memberikan penilaian kinerja berdasarkan banyaknya dana yang terserap dari setiap program dan kegiatan, selain juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, pemahaman tentang anggaran menurut Risnunu dan Sri Mastuti dapat diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya:

#### **1. Fungsi Alokasi**

Mengandung arti kegiatan penyusunan anggaran merupakan sarana untuk penyediaan barang dan jasa sosial dalam rangka pemenuhan pelayanan publik. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan alokasi untuk barang sosial dan

<sup>51</sup> Op.cit. Mardiasmo, 2002. Hal. 182



pelayanan publik karena keduanya memiliki karakter khusus yang tak tergantikan di pasar.

## 2. Fungsi distribusi

Merupakan penyusunan anggaran yang memiliki mekanisme pembagian secara merata dan berkeadilan atas berbagai sumber daya dan pemanfaatannya. Oleh karena itu diperlukan pola distribusi penyesuaian melalui mekanisme pembayaran pajak dan transfer agar terjadi pemerataan dalam menikmati sumber daya. Fungsi ini dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang tergolong mampu dengan masyarakat tidak mampu.

## 3. Fungsi stabilisasi

Pajak dan pengeluaran akan mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan pajak dan pengeluaran tersebut sangat penting artinya untuk menjaga stabilisasi ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian laju inflasi.<sup>52</sup>

Sementara itu, merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa anggaran atau APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran

<sup>52</sup> Op.Cit. Risnunu dan Mastuti, Sri, hal. 3



pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Tidak jauh berbeda dengan pemaparan mengenai fungsi anggaran menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Mardiasmo memaparkan beberapa fungsi dari anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.



#### 7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### 8. Anggaran Sebagai alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.<sup>53</sup>

### 4. Prinsip Anggaran

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, anggaran memiliki porsi yang penting. Anggaran disini terkait dengan pembiayaan aktivitas pemerintah yang dalam hal ini pendanaannya bersumber dari masyarakat. Agar anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka dibutuhkan prinsip-prinsip anggaran. Menurut Mardiasmo, prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

a) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

c) Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

d) *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalunan.

f) Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

<sup>53</sup> Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit CV. Andi, Yogyakarta, hal. 23-26



g) Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h) Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.<sup>54</sup>

Pemaparan dari Mardiasmo terkait dengan prinsip anggaran, dari sisi otorisasi oleh legislatif merupakan suatu hal yang mutlak karena bila tidak disetujui oleh legislatif maka tidak akan ada pelaksanaan anggaran seperti yang telah direncanakan. Kemudian pengertian komprehensif dan keutuhan anggaran menurut peneliti tidak jauh berbeda karena komprehensif sendiri bersifat lengkap dan menyeluruh dan ini sejalan dengan prinsip keutuhan anggaran. Selanjutnya anggaran itu bersifat periodik, ada jangka waktu pelaksanaannya, sehingga bisa jelas dalam hal pertanggungjawabannya. Anggaran juga harus akurat yaitu cermat, tepat dan teliti dalam melakukan estimasi anggaran sehingga akan mencegah inefisiensi. Anggaran juga harus jelas yaitu sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami masyarakat sehingga dalam hal ini setiap rupiah yang dibelanjakan jelas kemana muaranya. Terakhir anggaran harus diketahui oleh publik karena dalam penganggaran ini menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat sehingga anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat. Dalam tulisan ini prinsip anggaran yang digunakan sama dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo.

## 5. Teori Penganggaran

Anggaran sektor publik di dalam perkembangannya telah menjadi instrumen multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin dari komposisi dan besarnya anggaran yang

---

<sup>54</sup> Opcit. Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. hal. 67-68



secara langsung dapat merefleksikan arah dan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut harus diawali dengan perencanaan anggaran. Di dalam proses perencanaan anggaran ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga memunculkan berbagai jenis anggaran yang dapat diterapkan di dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa diantaranya adalah:

#### 1. Anggaran Tradisional (*Traditional Budgeting*)

Dikenal dengan sebutan *line budgeting*, yang menitikberatkan pada pelaksanaan anggaran serta pengawasan. Dalam pelaksanaan anggaran yang diutamakan adalah besarnya jatah masing-masing lembaga serta sejauh mana lembaga tersebut melaksanakan anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan.<sup>55</sup>

Anggaran tradisional adalah:

Jenis *budget* yang paling sederhana, dilandasi dengan pola pikir kemana sumber pendapatan yang tersedia itu akan digunakan, atau berorientasi pada objek pengeluaran, sehingga dalam pelaksanaannya menekankan pada prosedur format dan pertanggungjawaban atas setiap pelaksanaan anggaran, yang berarti pula peranan dan fungsi pengawasan sangat penting.<sup>56</sup>

Anggaran tradisional mengabaikan asas tujuan program, fungsi dan kegiatan yang ingin dicapai, yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Mekanisme penyusunannya, pertama ditentukan unit organisasinya, kedua ditentukan objek pengeluaran yang akan dibiayai seperti gaji dan upah pegawai, belanja barang, belanja modal, perlengkapan, pemeliharaan serta pengeluaran lainnya. Kemudian ditetapkan jumlah anggaran secara keseluruhan. Menurut Rosjidi, kebaikan dari anggaran tradisional adalah sederhana dan mudah disusun, penyusunan dan

<sup>55</sup> Loc.Cit. Suhadak dan Nugroho, Trilaksono, hal. 45

<sup>56</sup> *Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel* diakses tanggal 29 Agustus 2006 dalam .http [www.goodgovernance.or.id/NewsContentView.asp?mid=8 & newsmenu\\_id](http://www.goodgovernance.or.id/NewsContentView.asp?mid=8 & newsmenu_id)



klasifikasi informasi anggarannya sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban sehingga mudah diintegrasikan dengan sistem akuntansi pemerintah, untuk menyusun jenis *budget* ini tidak memerlukan keahlian khusus. Sedangkan kelemahannya adalah hubungan antara masukan dan keluaran tidak dirumuskan dengan kongkret sehingga sulit diukur, ada kecenderungan untuk menghabiskan anggaran, karena anggaran belanja yang tersedia merupakan batas tertinggi untuk dibelanjakan, tidak betorientasi pada program melainkan pada aspek pengawasan terhadap setiap objek pengeluaran.<sup>57</sup>

## 2. Anggaran PPBS (*Planning Programming Budgeting System*)

Menjelaskan mulai dari tahapan persiapan sebagai ukuran yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan.<sup>58</sup> Sistem ini didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah yang diikat dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang terpadu, bulat dan tak terpisahkan.<sup>59</sup> PPBS diharapkan menjadi sistem anggaran yang serba guna. Dalam sistem ini perhatiannya juga tidak lepas dari bidang pengawasan dan manajemen.

Dalam perkembangannya PPBS ini bisa diandalkan untuk mengembangkan suatu jaringan silang untuk merubah dari data perencanaan ke dalam kerangka pengawasan dan manajemen, demikian sebaliknya. Dengan demikian dari sekian banyak tujuan PPBS adalah merubah persiapan penganggaran tahunan yang

<sup>57</sup> Op.cit, *Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel*

<sup>58</sup> Op.cit..Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. hal. 45

<sup>59</sup> Op.cit, *Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel*





bersifat rutin ke dalam perumusan sasaran dan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Sistem ini memberikan perhatian lebih terhadap organisasi di bidang perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam bentuknya yang ideal, PPBS akan memusatkan perhatian pada fungsi perencanaan dan pendelegasian manajerial serta pengawasan tanggungjawab kepada tingkat operasional. PPBS sebagai suatu sistem memerlukan alat bantu yang terdiri dari analisis ekonomi mikro dan makro untuk menganalisa pengaruh kebijaksanaan pemerintah terhadap kehidupan ekonomi, dan pengaruh sosial, politik dan lain-lain dalam masyarakat. Kesemuanya ini dalam rangka membentuk kebijaksanaan fiskal dan penganggarannya, analisis lainnya yang bisa dipergunakan adalah efektifitas, efisiensi dan lain-lain, serta pengembangan teknologi informasi mutakhir.

Kelebihan dari PPBS ini dapat menggambarkan secara jelas tujuan organisasi, menghindarkan adanya program yang saling *overlapping* dan bertentangan satu sama lain, memungkinkan pemilihan lokasi sumber daya secara efisien berdasarkan analisa manfaat biaya. Sedangkan kelemahannya adalah sistem ini terlalu cangih untuk diterapkan pada kehidupan nyata, merupakan proses multi kompleks sehingga kecenderungan terlalu banyak memerlukan prosedur dan analisa, memerlukan kualitas pengelola yang tepat.<sup>60</sup>

### 3. Anggaran ZBB (*Zero Based Budgeting*)

Konsep anggaran ini menetapkan bahwa setiap awal tahun anggaran dimulai dengan 0 (nol) rupiah. Dengan begitu, akan timbul kehati-hatian dalam

<sup>60</sup> Op.cit, *Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel*



perencanaan dan pelaksanaan anggaran.<sup>61</sup> Sistem ini didefinisikan sebagai sistem penyusunan anggaran dimana kegiatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan dianggap sebagai kegiatan yang berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lain.<sup>62</sup> Dasar pemikiran dari sistem ini, bahwa anggaran tidak selalu didasarkan pada apa yang dilakukan pada masa/tahun lalu. Oleh karena itu anggaran ini harus diciptkan berdasarkan kondisi yang sedang dan akan berjalan dan setiap kegiatannya dapat diformulasikan ke dalam paket keputusan. Sistem ini memberikan perhatian lebih pada sasarannya untuk memperbaiki manajemen melalui perbaikan pengawasan manajerial dengan menekankan penilaian atas permintaan pendanaan unit pelaksana.

Langkah-langkah dalam penyusunan *zero based budgeting* ini melalui penentuan keputusan manajemen, pembentukan paket keputusan, konsolidasi skala prioritas, dan alokasi dana. Kelebihan dari *zero based budgeting* yaitu proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang bermanfaat bagi kepentingan manajemen, dana dapat dialokasikan lebih efisien karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif bagi pelaksanaan keputusan tersebut, setiap program dan kegiatan harus *direview*, pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan apa saja yang dianggap kritis dan mendesak. Sedangkan kelemahannya adalah sistem ini tidak mudah diterapkan karena tidak semua kegiatan dapat disusun rangking keputusannya secara konsisten dari tahu ke tahun, terlalu mahal dan memakan banyak waktu, memerlukan *skill* khusus terutama dalam menganalisa dan

<sup>61</sup> Opcit..Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007, hal. 45

<sup>62</sup> Opcit. *Membangun sistem penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel*.



menentukan prioritas, perlu data lebih banyak dan dukungan analisis yang ketat, kadang sulit untuk memutuskan kegiatan yang satu lebih sulit dari kegiatan yang lainnya.<sup>63</sup>

#### 4. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

Ditekankan pada berbagai segi yang akan dicapai (*output*). Selain fokus pada output juga pada segi fungsional, pengelompokan kegiatan atau proyek yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan menekankan pada efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan.<sup>64</sup> UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara berprinsip pada akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan yang bebas dan mandiri.

Penetapan asas akuntabilitas berorientasi hasil dan keterbukaan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara, menjadi landasan penting dalam memperbaiki proses penganggaran di sektor publik yakni dengan menerapkan anggaran berbasis prestasi kerja atau anggaran berbasis kinerja (*performace based budgeting*). Anggaran kinerja merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional yang bersumber pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan penyusunan bentuk kegiatan dan tujuan yang akan dicapai serta pengalokasian dana yang akan dibiayai oleh anggaran secara efektif dan efisien. Sehingga tolok

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Opcit. Suhadak dan Nugroho, Trilaksono, hal. 45



ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien.<sup>65</sup>

Anggaran kinerja merupakan anggaran yang bertumpu pada kemampuan sumber daya daerah dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep penganggarannya bersifat *integratif* dan *komprehensif* dengan memberikan kesempatan pengelolaan kepada unit kerja secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.<sup>66</sup> Dengan pengertian tersebut konsekuensinya adalah bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur hasil yang hendak dicapai dari input yang telah ditetapkan, sehingga keberhasilan pelaksanaan anggaran berdasarkan pencapaian target kinerja yang terukur bukan pada penyerapan dana dalam pelaksanaan suatu program seperti yang selama ini terjadi.

Anggaran kinerja merupakan amanah pemerintah yang dijabarkan dalam PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002. PP No.105 Tahun 2000 disebutkan bahwa pemerintah daerah menggunakan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD, tata cara penyusunan anggaran berbasis kinerja sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menyusun APBD dengan menggunakan pendekatan tersebut. Secara sederhana, batasan dari penganggaran kinerja adalah sebagai

<sup>65</sup> Loc.Cit. Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus, hal. 10

<sup>66</sup> Penjelasan pasal 8 PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah



“Teknik penyusunan anggaran yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja dan unit cost dari setiap kegiatan, atau sering dikatakan sebagai anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian alokasi biaya atau input yang ditetapkan“.<sup>67</sup>

Beberapa pengertian mengenai anggaran kinerja juga disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Marc and Jim, Anggaran berbasis kinerja adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak) dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Joyce and Sieg, 2000, Anggaran Berbasis Kinerja adalah “*a continuum that involves the availability and use of performance information at each of the various stages of the budget process—budget preparation, budget approval, budget execution, and audit and evaluation.*”<sup>69</sup>

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka secara garis besar pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atau kinerja *output*. Sistem yang juga perlu diubah adalah sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Jika

<sup>67</sup> Loc.Cit.Risnunu dan Mastuti, Sri, hal.16

<sup>68</sup> Purwanto, Direktorat Anggaran I. 2006. *Performance Based Budgeting*, slide power point pada Diskusi intern DJAOK, diakses tanggal 20 November 2007 dalam <http://www.djapk.depkeu.go.id/artikel/06-09-06,%20Performance-based%20Budgeting.ppt>

<sup>69</sup> Ibid.



selama ini pertanggungjawaban ditujukan kepada pemerintah yang lebih tinggi levelnya, maka dengan anggaran kinerja pertanggungjawabannya lebih ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Dengan demikian audit yang dilakukan terhadap anggaran tidak hanya berupa audit keuangan tapi juga meliputi audit kinerja. Esensi utama anggaran berbasis kinerja adalah dimasukkannya elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran sehingga setiap program/kegiatan harus mempunyai tujuan dan sasaran yang terukur mulai dari masukan, aktifitas, keluaran, hasil dan dampak. Indikator efisiensi dan efektifitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur capaian suatu program/kegiatan.

## **2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **A. Pengertian Akuntabilitas**

Fenomena saat ini yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah adanya akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dibutuhkan karena aparat pemerintah harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Birokrasi publik atau aparat sebagai pelaku kebijakan dan pelayanan publik harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjangnya terhadap publik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya selama ini.

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "*accountability*", yang berarti pertanggung jawaban. Akuntabilitas menuntut dan memberikan kesempatan



kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan yang telah dilakukan dan hasil upayanya untuk melaksanakan tugas atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>70</sup> Akuntabilitas menurut Barbara S. Romzek and Patricia Wallace Ingraham, dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*), untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Chandler dan Plano mengartikan akuntabilitas sebagai “*refers to the institution of checks and balances in an administrative system*”. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.<sup>72</sup>

Berbicara mengenai akuntabilitas, tidak bisa dihilangkan dari konteks pemerintah karena dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai aktor atau pelaku kebijakan. Pemahaman tentang akuntabilitas pemerintah dapat dipahami dengan melihat pada *Governmental Accounting Standards Boards: concept statements no: 1*, yang berbunyi:

<sup>70</sup> Muntoro, Ronny Kusuma, 2006 : 26. *Pentingnya akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Majalah Usahawan No.12 Tahun XXXV. Hal. 25 - 28

<sup>71</sup> Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.*, BPFE, Yogyakarta, hal. 83

<sup>72</sup> Widodo, Joko. 2001. *Good Governance. Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan OTODA*, Insan Cendikia, Surabaya



*“Accountability requires governments to answer the citizens-to justify reasing of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizens has a ‘right to know’, a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the cityzens and they elected representativeness”.*<sup>73</sup>

Pernyataan di atas menekankan bahwa dasar dari akuntabilitas pemerintah adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Masyarakat memiliki hak tersebut karena masyarakat memberi mandat kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, adalah pantas apabila publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang direncanakan pemerintah dan bagaimana kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Dilihat dari berbagai pengertian mengenai definisi akuntabilitas dari para ahli, misalnya definisi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ronny Kusuma Muntoro, akuntabilitas menuntut pihak tertentu untuk bertanggung jawab menjelaskan tindakan yang dilakukan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Barbara S. Romzek and Patricia Wallace Ingraham, bahwa akuntabilitas merupakan suatu kondisi yang memberikan jawaban terkait kinerja yang diharapkan.

Tidak jauh beda dengan pernyataan sebelumnya, Mohamad Mahsun mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban agent dalam memberikan pertanggung jawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan kepada principal. Beda dari dua pernyataan sebelumnya, definisi dari Mohamad Mahsun mencantumkan kepada siapa pertanggung jawaban itu

---

<sup>73</sup> Op.cit. Muntoro, Kusuma Ronny, hal. 25





diberikan. Sedangkan Chandler dan Plano dalam mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya dan kewenangan yang digunakan. Terakhir, pengertian akuntabilitas yang dikemukakan oleh *Governmental Accounting Standards Boards* lebih menekankan pada hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Dari beberapa pengertian mengenai akuntabilitas seperti yang telah diterangkan pada beberapa paragraf sebelumnya, maka pengertian akuntabilitas dalam tulisan ini adalah sebagai suatu kewajiban untuk memberikan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban.

## **B. Jenis Akuntabilitas**

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pada pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas yang dilakukan oleh organisasi publik itu dapat dilihat melalui beberapa jenis pembagiannya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara membedakan jenis akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.



2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan-kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan.

Menurut Chandler and Plano akuntabilitas dibedakan dalam lima macam yaitu:

1. *Fiscal accountability*, merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan.
2. *Legal accountability*, merupakan tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. *Program accountability*, merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan program.
4. *Process Accountability*, adalah tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur.
5. *Outcome accountability*, tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas.<sup>74</sup>

Kemudian jika dilihat berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, Yongo dalam modul 1 AKIP LAN dan BPKP (2000) membedakan jenis akuntabilitas menjadi:

1. Akuntabilitas Tradisional atau Reguler (*traditional/regularity accountability*)  
Yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada transaksi reguler dan fiskal
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)  
Yaitu akuntabilitas yang mengutamakan pada penghematan dan efisiensi sumber dana dan sumber biaya.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)  
Yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada pencapaian hasil usaha pemerintah.
4. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)  
Yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada proses pelaksanaan dan aktifitas organisasi sesuai dengan koridor moral dan aktifitas politis.
5. Akuntabilitas hasil dan dampak (*outcome accountability*)

---

<sup>74</sup> Op.cit. Widodo, Joko.



Yaitu akuntabilitas yang memfokuskan pada hasil dan dampak kegiatan dan aktifitas organisasi publik pada masyarakat.<sup>75</sup>

Setelah memahami jenis dari akuntabilitas, seperti pada pengertian akuntabilitas manfaat yang dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara, *outcome accountability* yang dijelaskan oleh Chandler dan Plano, serta akuntabilitas hasil dan dampak yang dijelaskan oleh Yongo. Dari penjelasan ketiga sumber terkait pengertian akuntabilitas manfaat, akuntabilitas hasil dan dampak serta *outcome accountability* mengarah pada satu kesamaan arti yaitu bentuk pertanggungjawaban terkait dengan hasil kegiatan/aktivitas atau bisa juga dikatakan sebagai kinerja yang dilakukan pemerintah serta dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Kemudian bila dikaitkan dengan akuntabilitas prosedural yang dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara maka memiliki pengertian yang sama dengan *Legal accountability* yang dijelaskan oleh Chandler dan Plano yaitu sebagai bentuk tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya jika diarahkan kepada pengertian *program accountability* yang dijelaskan oleh Chandler dan Plano maupun akuntabilitas program yang dijelaskan oleh Yongo, maka tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah disini mengarah kepada hasil pelaksanaan atas rancangan kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Untuk pengertian *process accountability* yang dikemukakan baik oleh Chandler dan Plano maupun yang dikemukakan oleh Yongo pada intinya memiliki kesamaan dalam menjelaskan tanggungjawab pemerintah terkait dengan urutan

---

<sup>75</sup> LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta, LAN



perubahan peristiwa dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan/aktivitas pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Konsep akuntabilitas telah memberikan pengertian kepada kita bahwa pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat luas atau publik karena dalam kenyataannya masyarakat/publik memiliki andil berupa kewajiban dalam membayar setiap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berupa dana dari masyarakat ini digunakan oleh pemerintah dalam membiayai setiap program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dana dari masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan nilai keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Dari beberapa pemaparan tentang jenis akuntabilitas didapat beberapa pengertian tentang akuntabilitas keuangan, Menurut Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan<sup>76</sup>. Sedangkan menurut Chandler and Plano, *Fiscal accountability* merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan<sup>77</sup>. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya, akuntabilitas keuangan adalah akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi<sup>78</sup>. Ini menandakan bahwa pengertian akuntabilitas keuangan dalam konteks tulisan ini adalah kewajiban aparat terkait untuk

---

<sup>76</sup> LAN

<sup>77</sup> Op.Cit. Widodo, Joko.

<sup>78</sup> Loc.Cit. Kumorotomo. Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus, hal. 85



mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja aparat yang terkait dengan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

### **C. Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Melalui otonomi daerah memiliki otonomi yang didasarkan pada desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pelaporan dan evaluasi. Konsekuensi logis dari adanya desentralisasi tersebut, akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal penggunaan dana, baik yang berasal dari pusat maupun yang bersumber dari daerah itu sendiri. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah ini diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian laporan terkait segala aktivitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas Keuangan Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
2. Pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah dengan baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.



Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan aspek keuangan daerah maka dibutuhkan suatu dasar atau acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah menurut Mardiasmo, meliputi:

1. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.<sup>79</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah bertanggungjawab melaporkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban publik. Bentuk laporan pertanggungjawaban publik ini adalah berupa anggaran dan laporan realisasi anggaran. Pelaporan anggaran ini sebagai upaya membangun kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran maka diharapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dapat lebih akuntabel sehingga mendapat dukungan publik.

Dalam upaya menciptakan anggaran yang akuntabel, sangat ditentukan dari pelaporan yang dibuat, yaitu seberapa efektif informasi yang disajikan dalam memenuhi kebutuhan publik terkait perihal keuangan. Selain itu, pelaporan keuangan juga dibuat secara detail dan lengkap, tentang bagaimana tentang uang yang digunakan dan dibelanjakan. Tentu saja laporan keuangan tersebut harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui dan menilai

---

<sup>79</sup> Loc.Cit. Munir, H. Dasril, Djuanda, Henry Arys dan Tangkilisan, Hessel Nogi S, hal. 96



pengelolaan keuangan oleh pemerintah.<sup>80</sup> Dari pemaparan terkait dengan pengertian akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana yang telah disebutkan pada pernyataan sebelumnya, maka pengertian akuntabilitas keuangan daerah dalam tulisan ini adalah Kewajiban Pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan keuangan daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

#### **D. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Selain aspek *financial* atau keuangan, akuntabilitas publik juga menekankan pada *outcomes* atau kualitas dari manajemen keuangan. Masyarakat berhak mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang telah dicapai dari proyek yang selama ini didanai secara tidak langsung oleh masyarakat melalui pajak. Pada era otonomi daerah saat ini, setiap pejabat publik diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang yang diamanatkan kepadanya. Menurut Joko Widodo, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya dan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Akuntabilitas kinerja diterapkan di Indonesia berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres

<sup>80</sup> Loc.Cit.Mahsun, Mohamad, hal. 102

<sup>81</sup> Widodo, Joko.2006. *Membangun birokrasi berbasis kinerja*, Malang : Bayu Media Publishing, Hal. 78



tersebut diatur tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem ini tidak lain merupakan suatu tatanan, instrumen metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi secara periodik dan berkelanjutan.<sup>82</sup> Masih menurut Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi baik pemerintah pusat, daerah propinsi, maupun kabupaten dan kota sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing di tiap lembaga, lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya pada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan itu menggambarkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.<sup>83</sup>

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah diteatpkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

<sup>82</sup> *Efektifitas kebijakan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Setiawan. Yasin, dalam jurnal berdaya Vol II, No 11 November 2004 Hal 39. Diakses tanggal 13 Juli 2007 dalam [http:// www.siaksoft.net /index.php ?option=com\\_content&task =view&id=2386&Itemid=104 &limit=1&limitstart=10..](http://www.siaksoft.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2386&Itemid=104&limit=1&limitstart=10..)

<sup>83</sup> Op.cit. Widodo, Joko. hal. 99





(SAKIP) diartikan sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi. SAKIP tersebut terdiri atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.<sup>84</sup>

Secara garis besar, pelaksanaan Sistem AKIP dilakukan dengan:

- a. Merumuskan rencana strategis yang terdiri dari permusan visi, misi, faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran.
- b. Merumuskan seperangkat indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintahan tersebut.
- c. Menyusun rencana kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Rencana kinerja ini akan menyajikan berbagai target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu satu tahun. Kemudian atas dasar rencana kinerja yang ada, para instansi pemerintahan menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budget*). Anggaran berbasis kinerja ini merepresentasikan gambaran aspek keuangan dari seluruh program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam rencana kinerja dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi.
- d. Instansi pemerintah selanjutnya melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kinerja dan anggaran berbasis kinerja yang telah disepakati/disetujui oleh para pemberi amanat serta memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama.
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
  - i. membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target kinerja yang ditetapkan.
  - ii. membandingkan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya.
  - iii. membandingkan kinerja aktual dengan standar yang diterima umum.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).
- g. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
  - i. menganalisis hasil pengukuran kinerja,
  - ii. mengintepretasikan data yang diperoleh<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> Ibid. Hal. 105

<sup>85</sup> Op.Cit. *Efektifitas kebijakan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*



Dalam melakukan penilaian dan kontrol terhadap kinerja dari pemerintah, paling tidak ada tiga parameter standar yang telah diterima secara konsensus oleh berbagai kalangan yang harus dipenuhi dalam sebuah penganggaran yang baik, yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Sementara itu, *Civil Education and Budget Transparency Advocacy* berpandangan, dalam pengelolaan APBD, yang dalam hal ini terkait langsung dengan keuangan daerah yang baik, hendaknya harus mengacu pada beberapa parameter :

1. Standard informasi

Informasi tentang pengelolaan anggaran daerah merupakan informasi yang terbuka bagi publik. Anggaran ditetapkan dengan Perda, sehingga setiap orang memungkinkan untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang disampaikan mencakup semua aspek penganggaran.

2. Proses penganggaran terbuka

Proses penganggaran yang mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilaksanakan secara terbuka.

3. Standar ukuran kerja

Anggaran yang disusun harus berorientasi pada hasil capaian dengan mempertimbangkan rasionalitas antara masukan dalam perencanaan dengan keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Semua hasil capaian tersebut dapat diukur dengan indikator yang jelas.

4. Sistem evaluasi terbuka

Sistem evaluasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan secara jelas berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara periodik dan bila ada penyimpangan anggaran dilaporkan secepatnya.

5. Standar penetapan harga

Penetapan harga barang dan jasa yang dibiayai oleh APBD harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.<sup>86</sup>

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki para *stakeholders* yang berkepentingan dengan

<sup>86</sup> Loc.cit. Risnunu dan Mastuti, Sri, hal. 75-77



pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator yang menjamin akuntabilitas publik adalah:
  - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - b. Harus memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip administrasi yang benar maupun nilai yang berlaku di *stakeholders*.
  - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
  - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
  - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, maupun media komunikasi personal.
  - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
  - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.<sup>87</sup>

### 3. Profesionalisme aparat

#### A. Pengertian Profesionalisme aparat

Reformasi telah membawa bangsa Indonesia pada suasana kehidupan yang sarat dengan harapan. Pada tingkat pertama, tuntutan reformasi tertuju pada aparat pemerintah. Dalam konteks ini, penataan sumber daya aparatur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam manajemen otonomi daerah merupakan suatu yang harus diprioritaskan.

---

<sup>87</sup>Loc.Cit. Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus, hal. 195.



Berkaitan dengan upaya penyediaan aparat profesional tersebut, ada baiknya terlebih dahulu untuk mengetahui makna dari profesionalisme tersebut.

Istilah profesi itu didapat sebagian terbesar dari mereka, orang-orang yang mengajarkan atau "to profess" ( menyatakan ). Awalnya, ini dari perintah agama, tetapi pada abad ke 17, definisi dari perkataan ini dialihkan kedalam masalah duniawi yang berarti "proses pencapaian hak kualifikasi"<sup>88</sup>. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan menurut Dessler ( 1984 : 426 ), pegawai profesional adalah pegawai yang pekerjaannya melibatkan aplikasi pengetahuan yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Siagian (2002:141), para tenaga profesional dalam manajemen sumber daya manusia boleh saja berpikir idealistik. Akan tetapi apa yang terjadi dalam dunia kenyataan tidak boleh dilupakannya. Misalnya, tersedia tidaknya tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Profesionalisme menurut Wignjosoebroto adalah

"suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan."<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Evolusi Historis dari Profesi* Diakses tanggal 20 November 2007 dalam <http://www.ipai.info/profesionalisme.htm>.

<sup>89</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. 1999. *Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi*. Materi kuliah Teori Administrasi pada Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Menurut Badudu dan Zaini (1988) dalam Sedarmayanti, profesionalisme adalah :

1. Berasal dari kata “profesi” yang artinya :
  - a. Pekerjaan daripadanya didapatkan nafkah untuk hidup
  - b. Pekerjaan yang dikuasai karena pendidikan keahlian
2. Profesionalisme artinya :
  - a. Bersifat profesi.
  - b. Memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan
  - c. Memperoleh bayaran dari pekerjaan itu.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut Legge dan Exley, profesionalisme adalah :

- a. Keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
- b. Diperoleh dengan pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui oleh rekan sejawatnya.
- c. Punya organisasi profesi yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut, yaitu ketaatan pada kode etik profesi.
- d. Ada nilai khusus yang harus diabdikan pada kemusiaan.<sup>91</sup>

Berikut ini, Semana (1995) dalam Sedarmayanti menyatakan bahwa profesionalisme adalah:

1. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja.
2. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.<sup>92</sup>

Dalam organisasi pemerintahan, secara umum profesionalisme adalah kualitas aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Korten, eksistensi profesionalisme adalah karena adanya *fitness* (kesesuaian, kecocokan) antar

---

<sup>90</sup>Sedarmayanti. 2004. *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” : Membenagun Sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance.*, bagian kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 76

<sup>91</sup> Ibid. hal. 77

<sup>92</sup> Ibid. hal. 77-78



*bureaucratic competence* dengan *task requirement* orang maupun pembangunan.<sup>93</sup>

Effendi mengatakan bahwa profesionalisme aparatur adalah kemampuan aparatatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam organisasinya.<sup>94</sup>

Selain itu, masih menurut Effendi, kapasitas kemampuan profesional aparat sangat ditentukan oleh kompetensi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan/pekerjaan.<sup>95</sup>

Berbicara mengenai profesionalisme dalam kaitannya dengan upaya perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pastinya tidak terlepas dari peran aparat sebagai salah satu sumber daya yang menentukan dalam pelaksanaan nilai akuntabilitas publik. Pengertian aparat menurut Purwadarminta adalah alat, aparatur berarti alat-alat negara (pegawai-pegawai dan sebagainya).<sup>96</sup> Sedangkan yang dimaksud aparat yang notabeneanya pegawai negeri menurut UU No.8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya”. Sedangkan Menurut Mariun, aparat diartikan sebagai berikut:

<sup>93</sup> Korten D, Gaebler, 1994. *Pembangunan yang memihak rakyat*. Cetakan kedua. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, hal. 82

<sup>94</sup> Effendi, S. 1992. *Alternatif Perencanaan Kebijakan Administrasi*. Fisipol UGM, Yogyakarta. hal. 70

<sup>95</sup> Ibid. hal 25

<sup>96</sup> WJS Purwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hal.628.



- a. Pemerintahan dalam arti luas, menunjuk pada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara (aparatur seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas.
- b. Pemerintahan dalam arti sempit, menunjuk pada aparatur organisasi atau alat perlengkapan negara atau pemerintahan dalam arti sempit.<sup>97</sup>

Berdasarkan beberapa definisi terkait dengan profesionalisme, secara garis besar baik menurut Dessler, Wignjosoebroto, Badudu dan Zaini, Legge dan Exley, serta Semana dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu mutlak dimiliki oleh setiap aparat sebagai nilai penting yang menunjang eksistensi kinerja aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme tersebut bisa dilihat dari pengetahuan seseorang, keahlian dan keterampilan seseorang baik yang didapat melalui jalur pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang non formal atau pengalaman. Selain keterampilan atau keahlian, nilai profesionalisme itu juga bisa dilihat dari aspek moral atau perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan kepadanya.

### **B. Nilai-nilai yang terkandung dalam Profesionalisme**

Dalam mengemban tugas yang diamanahkan kepadanya, sudah sewajarnya aparat pelaksana berupaya untuk selalu bertanggungjawab dan bersikap profesional. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa profesionalisme mutlak dibutuhkan oleh aparat. Profesionalisme itu sendiri memiliki dasar-dasar nilai yang dapat dijadikan suatu acuan terkait profesional atau tidaknya kinerja aparat.

---

<sup>97</sup> Mariun, 1970. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta, hal.3.



Menurut Wignjosoebroto, untuk dapat mewujudkan nilai profesionalisme tersebut maka seseorang setidaknya harus memiliki tiga watak kerja profesionalisme. Tiga watak kerja profesionalisme itu terdiri dari:

1. Kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil;
2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat;
3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.<sup>98</sup>

Menurut Supardi, Kepala Bagian Umum Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya ada enam konsep dasar yang harus dipahami aparatur pemerintah terkait dengan upaya peningkatan profesionalisme birokrasi, diantaranya adalah:

Pertama, *knowledge work* artinya, setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada keahlian yang dimiliki, karena secara prinsip ke depan pekerjaan aparat akan dijadikan sebagai tumpuan harapan bagi setiap masyarakat.  
Kedua, *innovation and caring* artinya, pekerjaan harus atas dasar kebutuhan dan selalu tanggap untuk mencari cara baru serta memiliki tingkat kepedulian.  
Ketiga, *team work* artinya, berkerja dengan mengutamakan kerjasama baik secara intern maupun antar sektor.  
Keempat, *project based work* artinya, setiap pekerjaan harus berbasis pada proyek atau anggaran kinerja.  
Kelima, *multishield* artinya, guna meningkatkan mutu pekerjaan diperlukan beraneka ragam keahlian sebagai pemacu hasil  
Keenam, *power of customer/public/stakeholder* artinya, selalu meningkatkan koordinasi antar rekan kerja.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Opcit. Wignjosoebroto, Soetandyo.

<sup>99</sup> *Guna Mendorong Terwujudnya Good Governance, Aparatur Pemerintah Harus Pahami Enam Konsep Dasarnya* Rabu, 23 Maret 2005. diakses tanggal 25 november 2007 dalam <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=3579>.





Sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya terkait dengan nilai dari profesionalisme, menurut Semana (1995) dalam Sedarmayanti menyatakan bahwa ciri profesionalisme adalah:

1. Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus
2. Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang
3. Mendapat pengakuan masyarakat atau negara
4. Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan dan jenis jabatannya.
5. Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara secara efektif dan efisien dan tolok ukur yang berstandar.
6. Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya serta bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
7. Memiliki kode etik yang harus dipenuhi.
8. Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu meningkatkan diri serta karyanya.<sup>100</sup>

Inisiatif pemerintahan daerah untuk mengupayakan tersedianya aparat yang profesional, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti integritas, moralitas dan etika yang tinggi merupakan keharusan. Kebijakan yang demikian ini setidaknya-tidaknya perlu mencerminkan dua aspek utama, yakni aspek substansial dan aspek prosedural.<sup>101</sup> Pada aspek substansial, kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional memerlukan analisis dan pedoman yang jelas tentang kualifikasi profesionalisme yang ingin dicapai pada berbagai bidang tugas. Umumnya kualifikasi ini berkenaan dengan aspek keahlian dan aspek perilaku.

Pada aspek keahlian, sumber daya yang disiapkan jelas pertimbangan penentuan formasinya serta jelas pula prospek pengembangan dan pendaaygunaannya. Pada aspek perilaku, pengaturan mengenai penyiapan sumber

<sup>100</sup> Loc.Cit. Sedarmayanti, hal. 77-78

<sup>101</sup> Mulyadi, Dedy. *Profesionalisme Aparatur di Era Otda*, diakses tanggal 20 November 2007 dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/02/0802.htm>.



daya aparatur yang profesional perlu semakin diarahkan pada internalisasi prinsip-prinsip moral dan imtak serta etika aparat, yang kemudian akan menjadi landasan terbangunnya akuntabilitas mereka. Untuk hal yang terakhir ini, setiap aparat pemerintah perlu terus didorong kemampuannya dalam memahami dan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dan pemerintah secara bersamaan. Pada aspek prosedural, kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional akan berkaitan dengan jenis dan sifat pendidikan serta pelatihan (diklat) yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan substansial tadi.

#### **4. Electronic Government (*e-government*)**

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengelolaan data dan informasi adalah sebagai sarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya, seperti halnya sumber daya manusia, keuangan, waktu dan lainnya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Sebelum menerapkan berbagai perencanaan terkait dengan teknologi informasi atau yang selanjutnya akan disebut dengan *e-government*, ada baiknya terlebih dahulu dipahami mengenai definisi dari *e-government* itu sendiri.

*E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.



<sup>102</sup> *E-government* didefinisikan oleh Rogers Okut Uma dan Larry Caffrey sebagai sarana yang merupakan sebuah proses dan struktur dalam pelayanan elektrik oleh pemerintah guna memberikan kemudahan dalam melayani publik.<sup>103</sup> Sementara itu, kementerian Kominfo berpendapat bahwa *e-government* adalah aplikasi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara *online*.<sup>104</sup> *World Bank* mendefinisikan *electric government* atau *e-government* sebagai:

“sarana yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah yang selanjutnya mendukung transformasi hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya, dengan maksud memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan bisnis dan industri, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan efisiensi manajemen pemerintahan. Keuntungan lain juga berupa mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, peningkatan pendapatan, dan pengurangan biaya”.<sup>105</sup>

Definisi *e-government* yang dikemukakan oleh Rogers Okut Uma dan Larry Caffrey yang menyebut *e-government* sebagai sarana pelayanan elektrik untuk kemudahan pelayanan bagi publik. Sedangkan menurut kementerian Kominfo, *e-government* didefinisikan sebagai suatu aplikasi teknologi berbasis internet untuk keperluan penyampaian informasi kepada masyarakat, mitra bisnis, maupun lembaga pemerintah lainnya. Pada penjelasan menurut *World Bank* yang

---

<sup>102</sup> *Revitalisasi E-government pada Depdagri dan Pemda*, diakses tanggal 20 november 2007 dalam [http://novallabz.blogspot.com/2007/10/revitalisasi-e-government-pada-depdagri\\_04.html](http://novallabz.blogspot.com/2007/10/revitalisasi-e-government-pada-depdagri_04.html).

<sup>103</sup> Harjono, Budi. *E-government: antara konsep, tantangan dan harapan*, diakses pada tanggal 20 november 2007 dalam <http://gerbang.jabar.go.id/kabkarawang/index.php?index=15&idartikel=2>.

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Harjono, Budi. *Membangun e-government*, diakses tanggal 20 Januari 2006 dalam <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc>



tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari kementerian Kominfo bahwa *e-government* disini sebagai sarana penerapan teknologi informasi yang diupayakan oleh pemerintah guna transformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dengan mitra bisnis dan industri serta sesama institusi pemerintahan. Antara pengertian *e-government* yang diungkapkan baik dari para ahli, maupun dari kementerian Kominfo dan juga *World Bank*, ada satu kesamaan nilai yang saling berhubungan, yaitu *e-government* sebagai sarana yang berbasis teknologi informasi, digunakan atau diaplikasikan sebagai media untuk penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis ataupun sesama institusi pemerintah, dan yang paling penting dengan adanya *e-government* ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dalam bentuk baru yaitu:<sup>106</sup> (a)G2C (*Government to Citizen*); (b)G2B (*Government to Business Enterprise*); (c)G2G (*Inter Agency Relationship*), atau dikenal juga dengan sebutan *Government to Government*

Bentuk-bentuk diatas dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintahan mampu menjembatani hubungan pemerintah dengan warga negara, pemerintah dengan pelaku bisnis dan hubungan intern pemerintah itu sendiri. Maka dengan demikian teknologi informasi akan membantu perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pasar

---

<sup>106</sup> Indrajit, Richardus Eko.2002, *Electronic Government*, Andi press, Yogyakarta, hal 30



atau pelaku bisnis dan dapat memberdayakan masyarakat melalui informasi sehingga membentuk manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Informasi terkait aktivitas pemerintah baik dari sisi pelaporan kinerja aparat maupun kinerja keuangannya yang ditampilkan di dalam sarana berbasis teknologi informasi akan mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Setelah melihat beberapa pemaparan terkait dengan *e-government*, maka *E-government* adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

#### **A. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

Dalam upaya menciptakan *good governance* di dalam tata kelola keuangan daerah maka segala bentuk informasi terkait keuangan daerah menjadi hal yang paling penting. Informasi tersebut sudah selayaknya diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi rasa keingintahuan dan tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terkait penggunaan dana publik dalam setiap aktivitas/kegiatan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang



sangat pesat, akhirnya membawa kita semua kepada suatu situasi yang lebih *intens* dengan teknologi informasi..

Dengan kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pengelolaan sistem informasi didukung dengan jaringan koneksi *intranet dan internet*, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi, komunikasi data keuangan dan penyajian informasi melalui *website*. Informasi yang ditampilkan secara umum meliputi informasi umum yaitu informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat serta informasi khusus yaitu informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan.

Menurut Mcleod sistem diartikan sebagai: "*A system is a group of element that are integrated with the common purpose of achieving objective.*"<sup>107</sup> Selanjutnya Burch dan Strater mendefinisikan sistem sebagai: "Suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu."<sup>108</sup> Sistem mempunyai tiga komponen, yaitu: *input*, transformasi dan *output*. *Input* merupakan elemen sumber daya yang menjadi masukan dalam sebuah sistem yang kemudian diproses lebih lanjut. Proses merupakan transformasi yang merubah input menjadi *output*. *Output* merupakan hasil dari elemen yang telah diproses melalui sistem transformasi. Konsep sistem akan lebih berguna dengan adanya dua konsep

<sup>107</sup> Mcleod, Raymond dan Schell, Goerge, 2002. *Management Information System*, Prentice Hall, New Jersey, hal.9.

<sup>108</sup> Moekijat, 1991. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.3.



tambahan yaitu umpan balik (*feedback*) dan mekanisme kontrol. Umpan balik merupakan tampilan data dari suatu sistem, sedangkan mekanisme kontrol meliputi kegiatan memantau, mengevaluasi umpan balik terhadap sistem yang telah dijalankan guna mencapai tujuan.

Selanjutnya berbicara mengenai informasi tidak terlepas dari bahasan mengenai data. Menurut Murdick “informasi adalah terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan.”<sup>109</sup> Suatu informasi bagi seseorang, mungkin merupakan data bagi orang lain yang diolah lagi menjadi informasi. Hubungan antara data dan informasi tersebut menurut Mcleod adalah: “*Data consist of facts and figures that are relatively meaningless to the user. Information is processed data or meaningfull data*”.<sup>110</sup>

Informasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Informasi akan berguna bagi *manager* bila memiliki kualitas atau memenuhi dimensi dasar atas informasi, yaitu:

- a. Relevan; informasi dikatakan relevan bila informasi yang didapat berkaitan dengan permasalahan yang ada.
- b. Akurat; informasi harus akurat karena dapat mengarahkan pada keputusan yang benar juga sebaliknya.
- c. Tepat waktu; informasi berguna bila tersedia pada saat yang tepat, yaitu pada saat dibutuhkan.
- d. Lengkap; informasi atas suatu permasalahan harus lengkap karena jika hanya sebagian informasi yang diperoleh maka *manager* akan memandang suatu permasalahan tidak dari semua sudut pandang.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Murdick, Robert, 1986. *Sistem Informasi Untuk Manajemen*, Erlangga, Jakarta, hal.6.

<sup>110</sup> Op Cit, Mcleod, Raymond dan Schell, Goerge, hal.12.

<sup>111</sup> Ibid, hal.32.



Menurut Laudon dan Laudon, Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.<sup>112</sup> Aktivitas dalam sistem informasi menurut O'Brien terbagi:

1. *Input of data resources*. Umumnya *input* dilakukan dalam bentuk aktivitas *entry* data seperti *recording* dan *editing*. Dalam aktivitas ini *recording* dan *editing* harus dipastikan bahwa telah dilakukan dengan tepat.
2. *Processing of data into information*. Aktivitas ini mengorganisir, menganalisa, memanipulasi dan menjadikan data menjadi informasi yang dibutuhkan *end users*.
3. *Output for information process*. Yang dimaksud dalam aktivitas *output* disini adalah informasi dalam berbagai bentuk yang dapat didistribusikan dan tersedia bagi *end users*.
4. *Storage of data resources*. *Storage* adalah suatu aktivitas sistem informasi dimana data dan informasi disimpan untuk menggunakan dikemudian hari.<sup>113</sup>

McLeod menyatakan bahwa sumber daya informasi perusahaan terdiri dari *computer hardware, computer software, information specialist, users, facilities, database* dan *information*.<sup>114</sup> Sedangkan menurut O'Brien sumber daya sistem informasi terdiri dari:

1. *People resource*. Sumber daya terpenting yang dibutuhkan dalam setiap sistem informasi adalah manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah *end users* dan *information system specialist*. *End users* adalah sumber daya manusia yang digunakan sistem informasi atau informasi yang digunakan sistem tersebut. Sedangkan *information system specialist* adalah sumber daya manusia yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi.

<sup>112</sup>Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P., 2000. "Organization and Technology in The Networked Enterprise" *Management Information System*, Six Edition, International Edition. [www.prenhall.com/laudon](http://www.prenhall.com/laudon).

<sup>113</sup>O'Brien, James, 1999. *Managing Information System: Managing Information Technology in the Internetworked Enterprise*, The McGraw Hill, New York, hal.48.

<sup>114</sup>Op Cit. McLeod, Raymond dan Schell, Goerge, hal.32.





2. *Hardware resource*. Konsep *hardware resources* meliputi secara fisik dan materi yang digunakan dalam proses informasi. Sumber daya ini tidak hanya berhubungan dengan mesin tetapi juga dengan segala macam bentuk media yang digunakan untuk menyimpan data yang tampak secara fisik.
3. *Software resource*. Konsep dari *software resources* ini adalah keseluruhan instruksi proses pengolahan informasi. Sumber daya ini tidak hanya berupa keseluruhan instruksi dari proses pengolahan informasi yang diarahkan dan mengendalikan *hardware* komputer, yang dinamakan program, tetapi juga meliputi keseluruhan instruksi proses pengolahan informasi yang dibutuhkan oleh *users*, yang dinamakan prosedur.
4. *Data resource*. *Data resources* pada sistem informasi pada umumnya dikelompokkan menjadi *database* dan *knowledge base*. *Database* melakukan proses dan mengorganisasikan data. Sedangkan *knowledge base* menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk.
5. *Network resource*. Konsep ini meliputi *communication media* dan *network support*.<sup>115</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sub informasi yang terdiri dari data yang kemudian diolah dan menghasilkan suatu informasi untuk tujuan tertentu. Pengertian sistem informasi keuangan daerah itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

---

<sup>115</sup> Ibid, hal.44.



## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

Sistem Informasi Keuangan Daerah sangat dibutuhkan sebagai sarana dalam mewujudkan nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah bersama-sama diketahui mengenai pengertian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah, disini terlihat jelas bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga berhak tahu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain beberapa tujuan utama yang perlu dicapai dalam penerapan *e-government* yang merupakan basis awal dari munculnya Sistem Informasi Keuangan Daerah, maka sudah pasti keberhasilan penerapannya menjadi harapan semua pihak, baik itu pemerintah sendiri, masyarakat maupun mitra bisnis yang berada dalam lingkup penerapan *e-government* itu sendiri.

Nilai keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu sistem yang dalam hal ini merupakan sistem informasi terkait erat dengan nilai efektif tidaknya sistem dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sistem informasi yang efektif akan membawa keberhasilan penerapan sistem tersebut. Tingkat keefektifan sistem informasi menurut Davis dapat dilihat dari: (1) informasi dan nilai informasi, (2) manusia sebagai pengelola informasi, dan (3) mesin atau peralatan yang dipakai dalam sistem.<sup>116</sup> Sedangkan menurut Anthony dan Scott sistem informasi yang efektif adalah sistem informasi organisasi yang dapat memberikan berbagai jenis

---

<sup>116</sup> Gordon, Davis. 1983. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Pustaka Binaan Presindo, Jakarta, hal.73.



informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan yang mempunyai tingkat tanggung jawab yang berlainan; pengendalian informasi, pengendalian manajemen dan perencanaan strategis.<sup>117</sup>

Selanjutnya Weber mengemukakan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan efektivitas sistem tersebut, diantaranya:

1. Evaluasi kegunaan sistem yang dirasakan (*perceived usefulness*). Evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegunaan sistem dari sudut pandang *users*, apakah mereka merasakan kegunaan dari sistem dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa ukuran yang dipakai:
  - a. *Users* merasakan bahwa sistem informasi membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka secara lebih cepat
  - b. *Users* merasakan bahwa sistem informasi memungkinkan mereka untuk meningkatkan prestasi kerja mereka
  - c. *Users* merasa bahwa sistem informasi memberi kemampuan bagi mereka untuk bekerja lebih efektif
2. Evaluasi Kualitas Informasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat membantu *user* dapat membantu *users* dalam menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Berikut beberapa atribut sistem yang memiliki kualitas informasi;
  - a. *Accuracy*, yaitu jika *users* merasakan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi

---

<sup>117</sup> Stoner, James A.F. 1994. *Manajemen II*, Erlangga, Jakarta, hal.113.



- b. *Timeless*, informasi harus tepat waktu, artinya tidak daluarsa dan dapat diperoleh setiap saat pada saat *users* membutuhkan informasi
  - c. *Relevance*, informasi yang dihasilkan sesuai (relevan) dengan kebutuhan manajemen berdasarkan fungsi dari sistem informasi tersebut.
  - d. *Comprehensibility*, informasi yang dihasilkan dapat dimengeti oleh *users*.
  - e. *Informativeness*, informasi yang disajikan didesain sesuai dengan kebutuhan *users* sehingga mudah dalam menjalankan fungsinya.
3. Evaluasi kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan (*perceived ease of use*). Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang ada mudah digunakan *users*. Beberapa elemen yang digunakan:
- a. *Users* merasakan kemudahan dalam mempelajari cara mengoperasikan sistem informasi
  - b. *Users* merasakan kemudahan dalam membuat/memerintahkan sistem informasi memerintahkan apa yang diinginkannya
  - c. *Users* merasa dapat dengan cepat menjadi terampil (*skillfull*) dengan adanya sistem informasi
4. Evaluasi kemampuan menggunakan komputer (*computer self efficacy*). Merupakan evaluasi atas kemampuan *users* dalam mengoperasikan komputer. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi sistem informasi dapat membantu *users* dalam menyelesaikan tugas mereka dengan



baik dan apakah *users* yakin dengan keputusan yang diambil dalam menyelesaikan tugasnya dengan sistem informasi tersebut.<sup>118</sup>

Selanjutnya dalam usaha untuk mengukur keefektifan sistem informasi, menurut De Lone dan Mc Lone (1992) adalah:

### 1. Variabel Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna (DeLone dan McLean, 1992). Indikator yang digunakan adalah 4 dari 8 indikator yang digunakan oleh Hamilton dan Chervany (1981) yaitu kemudahan untuk digunakan (*ease of use*), kemudahan untuk diakses (*system flexibility*), kecepatan akses (*response time*), dan ketahanan dari kerusakan (*reliability*). Selain itu juga digunakan indikator lain yaitu keamanan sistem (*security*).

### 2. Variabel Kualitas Informasi (*Information Quality*)

*Information Quality* merujuk pada *output* dari sistem informasi, menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan (Pitt dan Watson, 1997). Variabel ini menggambarkan kualitas informasi yang dipersepsikan oleh pengguna yang diukur dengan 4 indikator yang digunakan Bailey dan Pearson (1983) yaitu keakuratan

<sup>118</sup> Weber, Ron, 1999. *Information System Control and Audit*, Prentice Hall New Jersey, hal.893.



informasi (*accuracy*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), kelengkapan informasi (*completeness*) dan penyajian informasi (*format*).

### 3. Variabel Intensitas Penggunaan Sistem Informasi

Intensitas penggunaan informasi mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau sukarela. Variabel ini diukur melalui *frequency of use*.

### 4. Variabel *User Satisfaction*

Kepuasan Pengguna sistem (*User satisfaction*) merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Variabel ini diukur dengan indikator McGill et al. (2003) yang terdiri atas 3 item, yaitu efisiensi (*efficiency*), keefektifan (*effectiveness*), dan kepuasan (*satisfaction*), ditambah dengan indikator lain yaitu kebanggaan menggunakan sistem (*proudness*).

### 5. Variabel *Individual Impact*

*Individual impact* merupakan pengaruh keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual termasuk di dalamnya produktivitas, efisiensi dan efektivitas kinerja. Dalam penelitian ini, variabel *individual impact* diukur dengan *single item* berupa persepsi pengguna atas pengaruh sistem terhadap kualitas kinerja individual pengguna.



## 6. Variabel *Organizational Impact*

*Organizational impact* merupakan pengaruh keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara organisasi dalam hal ini institusi yang mengembangkan sistem informasi, termasuk di dalamnya produktivitas, efisiensi dan efektivitas kinerja. Dalam penelitian ini, variabel *organizational impact* diukur dengan *single item* berupa persepsi pengguna atas pengaruh sistem terhadap kualitas kinerja organisasi.<sup>119</sup>

## 5. Hubungan Tingkat Profesionalisme Aparat dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Seiring pelaksanaan otonomi daerah sejak awal mula reformasi, maka prinsip akuntabilitas mulai menjadi tema sentral dalam upaya perwujudan *good governance*. Berbicara mengenai otonomi daerah pastinya tidak akan dapat dipisahkan dari masalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini diperlukan akuntabilitas karena menyangkut penggunaan dana publik oleh pemerintah. Dalam setiap aktivitas/kegiatannya maka pemerintah memiliki aparat sebagai pelaksanaan aktivitas/kegiatan tersebut.

Dalam upaya pendayagunaan aparatur negara seharusnya dimulai dengan adanya kesesuaian antara peningkatan kesejahteraan aparatur dan kualitas aparatur. Menurut T. B. Silalahi, bahwa dengan adanya aparatur yang profesional dan berkarakter serta berbudaya kerja mempunyai motivasi yang tinggi dalam

---

<sup>119</sup>DeLone, W.H. and E.R.Mc Lean. 1992. " Information System Success: The Quest for the Dependent Variable" *Information System Research* 3



melayani kebutuhan masyarakat.<sup>120</sup> Masih menurut Silalahi, dengan kondisi aparat yang profesional, maka baik langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan akuntabilitas publik, karena aparatur negara mampu menerapkan kebijakan publik yang semakin transparan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Nainggolan mengatakan: “pada umumnya, pelaksanaan tugas seorang pegawai negeri antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan pegawai negeri yang bersangkutan”.<sup>121</sup>

Joko Widodo menjelaskan akan pentingnya nilai profesionalisme bagi aparat: “Untuk mewujudkan administrasi negara yang bertanggungjawab dalam artian ‘*capable to do or professionalism*’, menuntut birokrat publik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan kepadanya”.<sup>122</sup> Berkaitan dengan upaya mewujudkan *good governance* yang salah satunya merujuk kepada nilai akuntabilitas, maka profesionalisme merupakan salah satu elemen penting di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dari Bintoro Tjokroamidjodjo. Tjokroamidjodjo, mengemukakan upaya ke arah *good public sector governance* yang juga merupakan upaya reformasi birokrasi, sebagai berikut:

<sup>120</sup>T.B. Silalahi. 1998. *Membangun sosok aparatur profesional dalam kompetisi global*, Pustaka Sinar Harapan, anggota IKAPI bekerjasama dengan Yayasan Wahana Dharma Nusa, Jakarta, hal. 57

<sup>121</sup> Nainggolan, 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Depdagri, Jakarta, hal.123.

<sup>122</sup> Loc.Cit. Widodo, Joko, hal. 66





1. Birokrasi yang netral.
2. Meningkatkan terus profesionalisme birokrasi.
3. Manajemen Kebijakan.
4. *Get rid of KKN*
5. *Material reward*
6. *Public service*, pelayanan publik
7. *Integrating factor* dari Negara Kesatuan RI bersama TNI dan Polri.<sup>123</sup>

Penjelasan di atas terlihat bahwa salah satu upaya menuju *good public sector governance* menurut Bintoro Tjokroamidjodjo adalah melalui profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen otonomi daerah yang luas dan utuh memerlukan berbagai kemampuan dari para pelaksananya. Berdasarkan pemaparan teori pada paragraf sebelumnya dapat diketahui bahwa aparat pemerintah daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam upaya menciptakan *good governance*. Salah satu pilar dari penciptaan *good governance* adalah melalui nilai akuntabilitas, yang dalam penelitian ini terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **6. Hubungan Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

*E-government* adalah suatu sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pemerintahan. Dimana bila selama ini proses pemerintahan dilakukan secara konvensional, maka kalau dengan menggunakan sistem *e-government*, berarti sudah memanfaatkan secara optimal keuntungan ataupun keunggulan dari teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan *e-government* tujuannya adalah tidak lain agar pemerintahan

<sup>123</sup> Tjokroamidjodjo, Bintoro. 2002. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, LAN RI, Jakarta, hal. 111-118



khususnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat, lebih cepat, lebih transparan, adil, dan akuntabel.<sup>124</sup> Dalam *e-government* terdapat pemanfaatan teknologi informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang sudah diolah dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.<sup>125</sup> Manajemen organisasi dalam konteks tulisan ini adalah pemerintahan daerah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah adalah terciptanya *good governance*.

Markus dan Keil, menyatakan bahwa sebuah kesuksesan sistem akan berdampak pada individu dan organisasi penggunaannya, dan pada selanjutnya dampak individual tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasional.<sup>126</sup> Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, *e-government* diimplementasikan dalam sistem informasi. Penerapan Sistem Informasi pada instansi pemerintahan akan menunjang pelaksanaan Pemerintah di daerah, sehingga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal ini ditegaskan melalui melalui Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* , penjelasan mengenai penerapan *e-government* secara rinci dapat dilihat pada pasal 20, yaitu: "Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara

<sup>124</sup> *E-government mendukung terciptanya good governance dan clean governance*(06. Agustus 2007 jam 08:13) diakses tanggal 22 Nonember 2007 dalam <http://www.kotajambi.go.id/i>

<sup>125</sup> Amsyah, Zulk ifli, 1997. *Manajemen Sistem Informasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.5

<sup>126</sup> Markus, M.Lynne, and Mark Keil. 1994. "If We Build It, They Will Come: Designing Information Systems That People Want To Use." *Sloan Management Review*



terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran”.<sup>127</sup>

Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Setiap instansi pemerintah dalam melakukan laporan keuangan daerah harus akuntabel. Seluruh laporan, baik laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas (kekayaan bersih) maupun laporan kinerja keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar kepada publik.<sup>128</sup> Demikian dikatakan Dosen Pengelolaan Keuangan Daerah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Departemen Keuangan RI, Agus Joko Purnomo, Ak. Agus menambahkan, akuntabilitas efektif memiliki enam ciri. Pertama, harus utuh dan menyeluruh serta menyangkut semua aspek tugas pokok dan fungsi. Kedua, harus mencakup aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, efektif dan prosedural. Ketiga, akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kerja individu maupun unit organisasi. Keempat, akuntabilitas harus di bangun berdasarkan sistem informasi yang handal guna menjamin keabsahan, akurasi, serta obyektifitas ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Kelima harus ada penilaian secara obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu

<sup>127</sup> *Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan*. Diakses tanggal 20 november 2007 dalam [http://www.sumutprov.go.id/unitkerja/kantorpde/index.php?option=com\\_content&task=view&id=56&Itemid=35](http://www.sumutprov.go.id/unitkerja/kantorpde/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=35).

<sup>128</sup> *Laporan Keuangan Daerah harus akuntabel*. Kamis, 12 Mei 2005 14:30:18 diakses tanggal 18 agustus 2007 dalam <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=3981>



instansi. Dan keenam, harus ada tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Dari beberapa pernyataan dari Agus Joko Purnomo tersebut, pada point ketiga juga disebutkan bahwa sistem informasi yang digunakan sebagai media penerapan akuntabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yang dalam penelitian ini merupakan kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada *point* ke empat semakin memperjelas pentingnya nilai informasi yang handal dalam upaya penciptaan nilai akuntabilitas.

Sistem manajemen informasi yang terintegrasi akan memperbaiki akuntabilitas dan membangun transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan proses pelayanan publik, karena dengan didukung jaringan komunikasi dan informasi yang komprehensif sehingga warga masyarakat mampu mengakses data, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja setiap satuan kerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan.

## **7. Hubungan antara Tingkat Profesionalisme Aparat dan Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengembangan *e-government* yang dalam hal ini merupakan Sistem Informasi Keuangan Daerah itu sendiri juga tak mudah, selain dipengaruhi oleh kesiapan dalam penerapan teknologi informasi juga dipengaruhi oleh mental birokrasi. *E-government* juga memerlukan *skill* dan kemauan kuat untuk mengembangkannya, sehingga sumber daya manusia berkualitas memang sangat diperlukan. Sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi



memegang peran penting, sehingga suatu organisasi harus mengubah struktur maupun kebijakan operasionalnya. Dinamika organisasi sangat berpengaruh terhadap sistem informasi yang dikembangkannya. Perubahan kebijakan atau struktur organisasi berdampak terhadap kebutuhan sistem informasi. Dengan demikian suatu sistem informasi tidak akan pernah statis. Sistem informasi senantiasa berubah, berkembang dan disesuaikan, yang sejalan dengan perubahan kondisi lingkungan organisasi.<sup>129</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *E-Government* di Indonesia, diantaranya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi. Sumber daya manusia yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan sumber daya manusia ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-government*.<sup>130</sup> Dari pernyataan M. Arsyad Sanusi ini bisa dikatakan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam penerapan sistem informasi dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional. Sumber daya manusia dalam konteks tulisan ini terkait dengan profesionalisme aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki.

Nainggolan mengatakan “pada umumnya, pelaksanaan tugas seorang pegawai negeri antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman

---

<sup>129</sup> *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB, 3-4 Mei 2005*

<sup>130</sup> Sanusi., M. Arsyad. *Penerapan E-Government menuju Good Governance di Indonesia*. Diakses tanggal 29 agustus 2007 dalam <http://pt-makassar.go.id/artikel/e-government.doc>



dan kesungguhan pegawai negeri yang bersangkutan.”<sup>131</sup> Sondang mengatakan: “memang harus diakui bahwa pada umumnya organisasi dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemampuan untuk bekerja keras, malahan salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.”<sup>132</sup> Beberapa teori yang disampaikan oleh Nainggolan dan Sondang menegaskan pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dalam hal ini berkaitan dengan peran dari aparat dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah.

Dari berbagai pemaparan sebelumnya, untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan tersinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi. Standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Menurut pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Untuk mewujudkan Sistem informasi yang handal maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia yang handal dalam bentuk aktualisasi nilai-nilai profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Dengan tercapainya profesionalisme aparat dan adanya pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah maka akan terbentuk suatu bentuk

<sup>131</sup> Nainggolan, 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Depdagri, Jakarta, hal.123.

<sup>132</sup> Siagian, Sondang P, 1982. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 5



pertanggungjawaban pemerintah dalam menyampaikan kinerja keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki.

### **1.5 Perumusan Hipotesa**

Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesa telah dibuktikan kebenarannya, namanya bukan lagi hipotesa melainkan suatu tesa. Suatu hipotesa akan diterima kalau bahan-bahan penyelidikan membenarkan pernyataan itu. Dan akan ditolak bilamana kenyataan menyangkalnya. Pada gilirannya suatu tesa dapat dipandang sebagai hipotesa kalau oleh suatu alasan penyelidikan masih menginginkan mengujinya kembali.<sup>133</sup> Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesa Kerja (  $H_1$  )

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Hipotesa Nol (  $H_0$  )

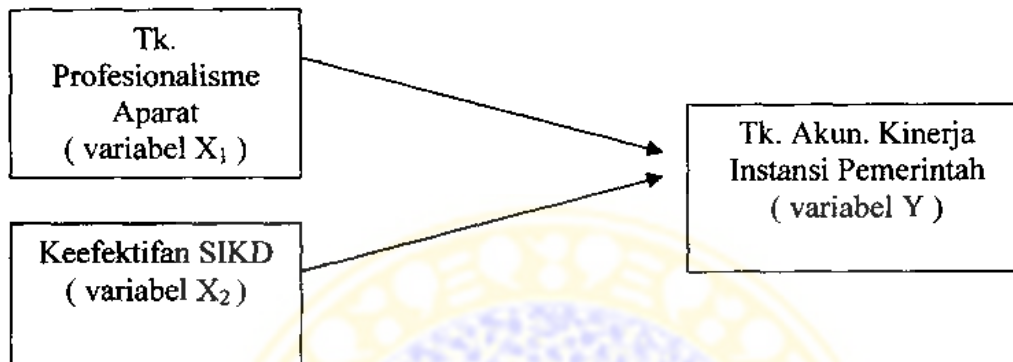
Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

---

<sup>133</sup> Hadi, Soetrisno, 1996. *Statistik 2*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 257.



**Bagan I.3**  
**Korelasi antara Tingkat Profesionalisme Aparat dan Keefektifan Sistem Informasi Keuangan daerah terhadap Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**



## **I.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional**

### **1. Definisi Konsep**

- Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

- Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

- Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah Teknik penyusunan anggaran yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja dan unit cost dari setiap kegiatan, atau sering dikatakan sebagai anggaran yang





menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

- **Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Akuntabilitas Keuangan Daerah adalah Kewajiban Pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan keuangan daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

- **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kewajiban Pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kinerja dari instansi pemerintah daerah terkait keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

- **Profesionalisme Aparat**

Profesionalisme aparat adalah kemampuan aparatatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam organisasinya.

- **E- Government**

E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara *online*.



- **Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

## **2. Definisi Operasional**

### **A. Tingkat Profesionalisme Aparat diukur dengan:**

#### **a. Pengetahuan**

- Tingkat kesesuaian pendidikan formal aparat dengan pekerjaan
- Tingkat pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan

#### **b. Keahlian**

- Tingkat penguasaan teknologi alat kerja
- Intensitas pelatihan
- Tingkat pengalaman Kerja

#### **c. Kemampuan**

- Tingkat kemampuan berkomunikasi
- Tingkat kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

#### **d. Perilaku**

- Tingkat kedisiplinan
- Tingkat komitmen pelaksanaan tugas



**B. Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah diukur dengan:**

**a. Kualitas Sistem**

- Tingkat kemudahan untuk digunakan
- Tingkat kemudahan untuk diakses
- Tingkat kecepatan akses
- Tingkat keamanan sistem

**b. Kualitas Informasi**

- Tingkat keakuratan informasi
- Tingkat ketepatanwaktuan
- Tingkat kelengkapan informasi
- format penyajian informasi

**c. Intensitas Penggunaan Sistem Informasi**

- Intensitas penggunaan

**C. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan:**

**a. Penyusunan rencana strategis**

- Tingkat keterlibatan di dalam penyusunan visi dan misi organisasi
- Tingkat keterlibatan di dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis
- Tingkat ketrkibatan dalam penetapan strategi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- Tingkat keterlibatan di dalam perumusan indikator kinerja.

**b. Pengukuran kinerja**

- Tingkat perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target



- Tingkat perbandingan kinerja aktual dengan kinerja tahun sebelumnya
- c. Pelaporan kinerja
  - Intensitas pelaporan
  - Tingkat ketepatan waktu dalam pelaporan.

## **I.7. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang sesuai adalah tipe penelitian eksplanasi. Dimana penelitian eksplanasi adalah suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.<sup>134</sup> Dengan kata lain tidak hanya memberikan gambaran (deskripsi), namun juga menjelaskan hubungan antara variabel pengaruh (variabel profesionalisme aparat dan sistem informasi keuangan daerah) dengan variabel terpengaruh (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Adapun objek kajian penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antar dua variabel atau lebih untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya, atau apakah suatu variabel dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya.

---

<sup>134</sup> Singarimbun, Masri, 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta. Hal. 5



## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei. Menurut Masri Singarimbun yang dimaksud dengan penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>135</sup> Data pokok dalam hal ini diartikan sebagai data primer yang dijadikan dasar analisa atau kajian dalam penelitian kali ini. Meskipun demikian tidak mengabaikan informasi yang diperoleh diluar kuisioner tersebut (misalnya melalui data sekunder, yang ada ataupun lewat observasi). Bentuk pertanyaan atau item-item pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner sifatnya tertutup (kuantitatif).

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya. Adapun pertimbangan pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah:

- a. Kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti dengan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian serta variabel-variabel yang telah dikemukakan sebelumnya
- b. Karena Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dalam upaya mencapai nilai-nilai akuntabilitas publik yang terkait dengan pencapaian akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hal.5



c. Terkait dengan upaya penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan daerah, sehingga ada penggabungan fungsi dari beberapa organisasi menjadi satu organisasi saja. Dalam hal ini terkait dengan pelembagaan organisasi pengelola keuangan dalam pemerintah kota Surabaya, yang sebelumnya memiliki tiga organisasi dalam pengelolaan keuangan yaitu Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah), Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya, dan juga bagian keuangan pada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi tersebut seharusnya pengelolaan keuangan pemerintah kota Surabaya hanya memiliki satu lembaga saja, tapi hingga kini dalam pelaksanaannya masih terdapat dua lembaga yang mengatur pengelolaan keuangan kota Surabaya, yaitu Dipenda dan juga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

#### 4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian, sehingga objek penelitian tersebut dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dibedakan pula antara populasi sampling dan populasi sasaran.<sup>136</sup> Sebagai populasi sasaran dalam penelitian ini adalah semua aparat di Badan Pengelolaan Keuangan dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebutlah yang memiliki peranan sesuai dengan maksud penelitian.

<sup>136</sup> Op Cit. Masri Singarimbun, hal.152.



Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling*. Berdasarkan Golongan Kepegawaian. Untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat populasi yang sebelumnya heterogen, maka populasi yang ada harus dibagi ke dalam lapisan/strata yang seragam.. Untuk itu harus diketahui dengan tepat jumlah satuan elementer dari tiap lapisan dalam populasi. Responden tersebut tercakup dalam bagian-bagian sebagai berikut: bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan dan verifikasi serta bidang kas dan akuntansi. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel seperti berikut:

Tabel 1.6  
Komposisi dan Jumlah Pegawai sebelum dilakukan Proses penentuan Besar Sampling

Gol	Ka.BPKD & TU		Peng. Angg		Perbnd & Verif		Kas & Akun		Jum
	Umum	Peg	Pncrima	Belanja	Perbend	Verif	Kas	Akun	
IV	2			1					3
III	6	4	4	5	23	9	9	6	56
II	1		1	2	14	3	6	3	29
I	-		-	-	-	1	-	1	2
Honor	5	1	1	2	9	5	3	3	29
Jum	19		16		64		31		130

Sumber: Sub. Bag Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Seperti yang terlihat pada tabel di atas yang di blok, pada ketiga bidang tersebut populasi keseluruhan berjumlah 89 orang. Jumlah populasi 89 orang tersebut berasal dari Golongan IV sejumlah 2 orang (1 orang merupakan Ka. BPKD dan 1 orang Ka. Bid Pengelolaan Anggaran). Golongan III sejumlah 56 orang (9 orang berasal dari PNS di bidang Pengelolaan Anggaran, 32 orang berasal dari PNS di bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta 15 orang PNS dari bidang Kas dan Akuntansi), Golongan II sejumlah 29 orang (3 orang berasal dari Bidang Pengelolaan Anggaran, 17 Orang berasal dari bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta 9 orang berasal dari bidang Kas dan Akuntansi) dan Golongan



I berjumlah 2 orang (1 orang berasal dari Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta 1 orang berasal dari Bidang Kas dan Akuntansi).

Dengan menggunakan penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu seperti yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael<sup>137</sup>, dengan taraf kesalahan 5%, seperti dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7  
Penentuan Jumlah sampel dan Populasi Tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5% dan 10 % Menurut Isaac dan Michael

N	s			N	s			N	s		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	155	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
75	67	62	59	550	301	213	182	30000	649	344	268
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	653	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	91	81	76	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	95	84	78	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	99	87	81	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	103	90	83	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	107	93	85	1100	414	265	217	400000	662	348	270
160	109	95	87	1200	427	270	221	450000	663	348	270
170	115	101	91	1300	440	275	224	500000	663	348	270
180	119	104	94	1400	450	279	227	550000	663	348	270
190	123	107	97	1500	460	283	229	600000	663	348	270
200	127	110	100	1600	469	286	232	650000	663	348	270
210	131	113	103	1700	477	289	234	700000	663	348	270
220	135	116	106	1800	485	292	235	750000	663	348	270
230	139	119	109	1900	492	294	237	800000	663	348	271
240	142	122	112	2000	498	297	238	850000	663	348	271
250	146	125	115	2200	510	301	241	900000	663	348	271
260	149	128	118	2400	520	304	243	950000	663	348	271
270	152	131	121	2600	529	307	245	1000000	663	348	271
									664	349	272

Sumber: Metode Penelitian Administrasi.<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Sugiono, 2006. Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung.. hal. 99

<sup>138</sup> Ibid





Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS dengan Gol. IV =  $2 \text{ org}/89 \times 72 = 1,61 = 2 \text{ org}$
2. Jumlah PNS dengan Gol. III =  $56 \text{ org}/89 \times 72 = 45,3 = 45 \text{ org}$
3. Jumlah PNS dengan Gol. II =  $29 \text{ org}/89 \times 72 = 23,4 = 23 \text{ org}$
4. Jumlah PNS dengan Gol. I =  $2 \text{ org}/89 \times 72 = 1,61 = 2 \text{ org}$

Sehingga dengan perhitungan seperti di atas di dapat jumlah sampel sebanyak 72 orang dengan alokasi jumlah responden Gol.IV sebanyak 2 orang, Gol.III sebanyak 45 orang, Gol.II sebanyak 23 orang dan Gol.I sebanyak 2 orang. Secara lebih jelas terkait jumlah PNS pada tiap golongan yang dijadikan sebagai responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8  
Komposisi dan Jumlah Pegawai setelah dilakukan Proses penentuan Besar Sampling

Gol	Ka.BPKD & TU		Peng. Angg		Perbnd & Verif		Kas & Akun		Jum
	Umum	Peg	Pnerima	Belanja	Perbend	Verif	Kas	Akun	
IV	2			1					2
III	6	4	3	3	20	8	7	4	45
II	1		1	1	10	3	5	3	23
I	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Honor	5	1	1	2	9	5	3	3	29
Jum	19		16		64		31		130

Sumber: Sub. Bag Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah

Dari hasil perhitungan didapat responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari Gol.IV sebanyak 2 orang berasal dari Ka.BPKD dan Ka.Sub.Bid Pembelanjaan, kemudian responden dari Gol. III berjumlah 45 orang didapat dari 6 PNS Bid. Pengelolaan Anggaran (3 orang dari Sub.Bid Penerimaan, 3 orang dari Sub.Bid Pembelanjaan), 28 PNS dari Bid. Perbendaharaan dan Verifikasi (20 orang dari Sub.Bid Perbendaharaan dan 8 orang dari Sub.Bid Pembelanjaan), 11 PNS dari Bid. Kas dan Akuntansi (7 orang dari Sub.Bid Kas dan 4 Orang dari Sub.Bid Akuntansi), kemudian responden dari Gol. II berjumlah



23 orang didapat dari 2 PNS Bid. Pengelolaan Anggaran (1 orang dari Sub.Bid Penerimaan dan 1 Orang dari Sub.Bid Pembelanjaan), 13 PNS dari Bid. Perbendaharaan dan Verifikasi (10 orang dari Sub.Bid Perbendaharaan dan 3 orang dari Sub.Bid Verifikasi), 8 PNS dari Bid. Kas dan Akuntansi (5 orang dari Sub.Bid Kas dan 3 orang dari Sub.Bid Akuntansi), terakhir dari responden Gol. 1 sebanyak 2 orang berasal dari pegawai di Sub.Bid verifikasi dan 1 orang berasal dari Sub.Bid Akuntansi.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pembuktian hipotesa diperlukan data empiris dari berbagai sumber. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Akumulasi data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner terhadap responden yang dipilih sebagai sampel. Kuisioner sendiri adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis.
- Pengumpulan data sekunder dan dokumentasi yakni pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap data-data tertulis yang ada pada lokasi penelitian.
- Disamping teknik tersebut diatas, juga digunakan pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi sebagai bahan pembandingan dan penunjang data terdahulu.



## 6. Validitas dan Realibilitas Alat Ukur

Dalam suatu penelitian, validitas dan reliabilitas yang tidak diketahui akan berakibat fatal dalam memberikan kesimpulan ataupun dalam memberi alasan terhadap hubungan-hubungan antar variabel dan oleh karena itu keberadaan validitas dan reliabilitas terhadap alat ukur penelitian sangatlah penting.

Validitas mempersoalkan apakah benar-benar kita mengukur apa yang kita pikirkan sedang kita ukur. Dalam penelitian ini validitas yang dipakai adalah validitas konstrak yaitu tipe validitas yang dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur apa yang menjadi bagian dari konstrak tersebut, dimana yang dimaksud konstrak adalah suatu abstraksi dan generalisasi khusus dan merupakan suatu konsep yang diciptakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan mempunyai pengertian terbatas, konstrak tersebut diberi definisi sehingga dapat diamati dan diukur.<sup>139</sup>

Perhitungan validitas ini dibantu dengan program SPSS dimana suatu butir pernyataan dikatakan valid atau tidak harus menggunakan patokan tertentu.

Berikut ini adalah patokan yang digunakan<sup>140</sup>

- $r$  (korelasi antara skor butir dengan skor total seluruh butir) harus positif (+).
- $r$  hitung harus lebih besar atau sama dengan  $r$  tabel.

Dari hasil perhitungan validitas dengan bantuan SPSS versi 13 diperoleh hasil dari 44 butir item pertanyaan diperoleh 36 butir item valid dan 8 butir item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dengan rincian sebagai berikut;

<sup>139</sup> Nazir, M., 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, hal.148

<sup>140</sup> Hadi, Sutrisno, 2000. *Paket SPSS Paket Midi*, UGM Pres, Yogyakarta, hal.89.



- variabel tingkat profesionalisme aparat, dari 15 item pertanyaan diperoleh 4 item pertanyaan nilai  $r$  korelasinya lebih kecil dari  $r$  tabel yaitu 0,228 sehingga item tersebut digugurkan, kemudian 11 item diuji lagi dan diperoleh  $r$  korelasi tiap butir lebih besar dari 0,228 Sehingga 11 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. (lihat lampiran)
- variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah, dari 15 item pertanyaan diperoleh 4 item pertanyaan nilai  $r$  korelasinya lebih kecil dari  $r$  tabel yaitu 0,228 sehingga item tersebut digugurkan, kemudian 11 item diuji lagi dan diperoleh  $r$  korelasi tiap butir lebih besar dari 0,228, sehingga 11 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari 13 item pertanyaan nilai  $r$  korelasinya lebih besar dari  $r$  tabel yaitu 0,228 sehingga seluruh item tersebut dinyatakan valid.

Sedangkan reliabilitas adalah menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, maka alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua adalah sebagai berikut:

- Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden, kemudian dihitung validitas itemnya. Item-item yang valid dikumpulkan jadi satu dan yang tidak valid dibuang



- Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan. Untuk membelah alat ukur menjadi dua dapat dilakukan dengan cara;
- Membagi item dengan cara acak (random), separuh masuk belahan pertama dan separuh masuk belahan kedua
- Membagi item berdasarkan nomor genap-ganjil. Item yang bernomor ganjil dimasukkan dalam belahan pertama, sedangkan yang bernomor genap dikelompokkan dalam belahan kedua atau sebaliknya.
- Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yakni skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua
- Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun rumus yang digunakan setelah dilakukan langkah-langkah yang telah disebutkan diatas, untuk mengetahui reliabilitas item-item yang ada adalah:

$$r_{\text{total}} = \frac{2(r_{.tt})}{1 + r_{.tt}}$$

Keterangan :

$r_{\text{total}}$  : Angka reliabilitas keseluruhan item

$r_{.tt}$  : Angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua.



Kemudian hasilnya dibandingkan dengan angka kritik nilai  $r$ , jika  $r_{\text{total}} >$  nilai  $r$  kritik maka dapat dikatakan reliabel. Dan untuk pengujian reliabilitas ini dibantu dengan program SPSS versi 13, dimana hasil perhitungan akan dibandingkan dengan angka kritik nilai  $r$  ( $df : N-2$  pada taraf signifikansi 5%). Untuk menentukan apakah suatu alat ukur reliabel atau tidak maka standar yang digunakan sama dengan pengujian validitas, yaitu :

- $r$  (korelasi antara skor butir dengan skor total seluruh butir) harus positif (+), dan
- $r$  hitung harus lebih besar atau sama dengan  $r$  tabel *product moment*.

Untuk  $N=72$ , pada taraf signifikansi 5% one tail,  $r_{\text{tabel}}$  adalah 0,232. Berarti nilai  $r_{\text{hitung}}$  harus  $\geq 0,232$ . Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa:

- Dari perhitungan variabel tingkat profesionalisme aparat diperoleh nilai  $r_{\text{hitung}}$  sebesar 0,464. Karena nilai  $r_{\text{hitung}} > 0,232$  maka variabel tingkat profesionalisme aparat dinyatakan reliabel.
- Dari perhitungan variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah diperoleh nilai  $r_{\text{hitung}}$  sebesar 0,598. Karena nilai  $r_{\text{hitung}} > 0,232$  maka variabel sistem informasi keuangan daerah dinyatakan reliabel.
- Dari perhitungan variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh nilai  $r_{\text{hitung}}$  sebesar 0,298. Karena nilai  $r_{\text{hitung}} > 0,232$  maka variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinyatakan reliabel.



## 7. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini teknik statistik yang digunakan adalah teknik analisa regresi ganda dan korelasi parsial. Penelitian ini menggunakan analisa regresi ganda atau majemuk, sebab akan menguji signifikansi korelasi antara dua ubahan bebas atau prediktor ( $x$ ) dengan sebuah ubahan taut atau kriterium ( $y$ ). Sedangkan uji statistik korelasi parsial bermaksud untuk mengetahui murni tidaknya hubungan  $x_1$  (tingkat profesionalisme aparat) terhadap  $y$  (tingkat akuntabilitas kinerja instasni pemerintah) dengan dikontrol prediktor  $x_2$  (keefektifan sistem informasi keuangan daerah) dan untuk mengetahui murni tidaknya hubungan prediktor  $x_2$  (keefektifan sistem informasi keuangan daerah) terhadap  $y$  (tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dengan dikontrol prediktor  $x_1$  (tingkat profesionalisme aparat). Karena korelasi parsial merupakan pengembangan dari korelasi *product moment* maka asumsi yang mendasari penggunaan teknik ini juga berasal dari asumsi korelasi *product moment*, adapun rumus perhitungan korelasi parsial antara variabel kriterium dengan variabel prediktor dengan dikontrol prediktor lain adalah sebagai berikut:

$$r_{y1.2} = \frac{r_{y1} - (r_{y2})(r_{12})}{\sqrt{(1 - r_{y2}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

Keterangan :

$r_{y1.2}$  = Koefisien Korelasi Parsial antara variabel kriterium ( $y$ ) dan variabel prediktor  $x_1$  dengan dikontrol oleh variabel prediktor  $x_2$

$r_{1.2}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel kriterium ( $y$ ) dan variabel prediktor  $x_1$  dengan dikontrol oleh variabel prediktor  $x_2$



$r_{y_1}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel y dan variabel  $x_1$

$r_{y_2}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel y dan variabel  $x_2$

Sementara untuk menghitung  $x_2$  dan y dengan  $x_1$  dikontrol adalah sebagai berikut:

$$r_{y_{2.1}} = \frac{r_{y_2} - (r_{y_1})(r_{12})}{\sqrt{(1 - r_{y_1}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

Keterangan :

$r_{y_{2.1}}$  = Koefisien Korelasi Parsial antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor  $x_2$  dengan dikontrol oleh variabel prediktor  $x_1$

$r_{2.1}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel kriterium (y) dan variabel prediktor  $x_2$  dengan dikontrol oleh variabel prediktor  $x_1$

$r_{y_2}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel y dan variabel  $x_2$

$r_{y_1}$  = Koefisien Korelasi *Product Moment* antara variabel y dan variabel  $x_1$

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi parsial digunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r_{y_{1.2}}}{\sqrt{(1 - r_{y_{1.2}}^2) : (N-2)}}$$

Kemudian nilai t dicocokkan dengan nilai t tabel, dengan  $df = (N-2)$ , taraf signifikansi 5% pada pengujian satu ekor karena hipotesis yang akan diuji telah menunjukkan arah.<sup>141</sup> Pada perhitungan uji korelasi parsial ini dibantu dengan program SPSS versi 13.

Uji statistik analisa regresi ganda dilakukan untuk menguji hipotesa. Pada umumnya pemakaian model-model analisis statistik untuk menguji data penelitian

<sup>141</sup> Ferguson, 1981, *Statistical Analysis in Psychology and Education*, Mc Graw Hill , Tokyo hal.485.





$$\sum x_2^2 = \sum x_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{N}$$

$$\sum y^2 = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}$$

$$\sum x_1 x_2 = \sum x_1 x_2 - \frac{(\sum x_1)(\sum x_2)}{N}$$

Persamaan garis regresi dalam skor deviasi yang kita cari adalah :

$$y = x_1 x_2 + a_2 x_2$$

$$y - y_1 = a_1(x_1 - x_1) + a_2(x_2 - y_2)$$

$$y = a_1(x_1 - x_1) + a_2(x_2 - x_2) + y$$

$$\text{Dengan : } x_1 = \frac{\sum x_1}{N}, \quad x_2 = \frac{\sum x_2}{N}, \quad y = \frac{\sum y}{N}$$

II. Koefisien Korelasi antara kriterium y dengan prediktor  $x_1$  dan prediktor  $x_2$  dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$R_{y(12)} = \sqrt{1 - \{1 - r_{y1.2}^2\} \{1 - r_{y2.1}^2\}}$$

Keterangan :

$R_{y(12)}$  : Koefisien Korelasi antara Y dan X1 dan X2

$r_{y1.2}$  : Koefisien korelasi antara y dan x1 dengan dikontrol variabel x2

$r_{y2.1}$  : Koefisien korelasi antara y dan x2 dengan dikontrol variabel x1

III. Untuk mencari apakah  $R_y (12)$  tersebut signifikan atau tidak dilakukan analisis regresi. Dari analisis regresi akan ditemukan harga F garis regresi yang kemudian dapat diuji apakah harga F itu signifikan atau tidak. Adapun rumus F regresi adalah sebagai berikut :



Tabel 1.9  
Tabel Rangkuman Analisis Regresi / Anova

Sumber Variasi	db	Sum of Squares	Mean Square	F
Regresi ( Reg )	m	$R^2 ( \sum y^2 )$	$\frac{R^2 ( \sum y^2 )}{m}$ $\frac{(1-R^2)(\sum y^2)}{N-m-1}$	$\frac{RK \text{ reg}}{RK \text{ res}}$
Total	$N - 1$	$\sum y^2$		

Keterangan :

F reg : harga F garis regresi

N : cacah kasus

m : cacah prediktor

R : koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor

db : derajat kebebasan

JK : jumlah kuadrat

RK : rerata kuadrat

II. Kemudian dari tabel Anova diatas, berikutnya untuk melihat sumbangan variabel-variabel bebas terhadap kriterium lihat pada coefficients (beta). Pada uji regresi ganda ini juga dibantu dengan komputer program SPSS versi 13

**BAB II****GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN****II.1. Perkembangan Ekonomi Kota Surabaya**

Perkembangan kondisi umum ekonomi kota Surabaya yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk kota Surabaya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto / nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

**Tabel 2.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya**  
**Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2003-2006**

No	Sektor	2003	2004	2005	2006 <sup>1)</sup>
1	<b>Sektor Primer</b>	<b>99,21</b>	<b>98,03</b>	<b>95,27</b>	<b>95,96</b>
	Pertanian	89,93	89,57	88,07	89,37
	Pertambangan dan Peggalian	6,28	8,46	7,20	6,59
2	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>22.254,05</b>	<b>23.061,05</b>	<b>23.968,09</b>	<b>25.088,91</b>
	Indstr. Pengolahan	16.851,83	17.294,29	17.893,93	18.958,41
	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.229,67	1.322,46	1.364,91	1.463,57
	Konstruksi	4.172,55	4.444,30	4.709,25	4.666,93
3	<b>Sektor Tersier</b>	<b>30.608,14</b>	<b>32.861,47</b>	<b>35.131,92</b>	<b>37.286,01</b>
	Perdag. Hotel dan Restoran	17.998,60	19.499,74	20.944,55	22.518,39
	Pengangkutan dan Komunikasi	5.250,63	5.586,79	6.065,66	6.390,00
	Kew., Persewaan dan Jasa Persh.	3.386,99	3.685,48	3.907,43	4.117,80
	Jasa-Jasa	3.971,92	4.089,46	4.214,28	4.259,82
	<b>PDRB – ADHK</b>	<b>52.960,39</b>	<b>56.020,54</b>	<b>59.195,27</b>	<b>62.470,89</b>

Sumber Data : BPS Kota Surabaya & Bappeko, 2006, diolah  
 Keterangan : <sup>1)</sup> = angka sementara

**Tabel 2.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2003-2006**

No	Sektor	2003	2004	2005	2006
1	<b>Sektor Primer</b>	<b>120,650</b>	<b>121,980</b>	<b>132,260</b>	<b>141,478</b>
	Pertanian	111,180	112,050	122,940	132,629
	Pertambangan dan Peggalian	9,470	9,930	9,320	8,849
2	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>29.699,580</b>	<b>33.116,590</b>	<b>39.185,440</b>	<b>45.326,644</b>
	Indstr. Pengolahan	22.654,290	25.047,780	29.321.170	33.915,554
	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.694,930	2.032,620	2.456,970	2.984,347
	Konstruksi	5.350,360	6.036,190	7.407,300	8.426,743
3	<b>Sektor Tersier</b>	<b>38.731,610</b>	<b>44.355,230</b>	<b>51.872,740</b>	<b>58.608,241</b>
	Perdag. Hotel dan Restoran	23.732,120	27.346,400	32.475,890	37.355,742
	Pengangkutan dan Komunikasi	6.080,680	6.873,700	8.371,420	9.602,131
	Kew., Persewaan dan Jasa Persh.	4.257,940	5.026,200	5.577,530	6.001,415
	Jasa-Jasa	4.660,870	5.108,930	5,447,900	5.648,953
	<b>PDRB Total</b>	<b>68,551,840</b>	<b>77,593,800</b>	<b>91,190,440</b>	<b>104,076,362</b>

Sumber Data : BPS Kota Surabaya & Bappeko, 2006, diolah  
 Keterangan : <sup>1)</sup> = angka sementara

---

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

---



Perkembangan kondisi makro ekonomi kota Surabaya selama periode 2003 – 2006 cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi tahun 2003 – 2006. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya melambat 5,53 % dari tahun 2005 yang mencapai 5,67 %. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya dampak kebijakan Pemerintah terhadap 2 kali kenaikan harga Bahan Bakar minyak pada bulan Maret 2005 dan bulan Oktober 2005 serta timbulnya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya selama periode 2003 – 2006 relatif lebih didorong oleh sektor tersier dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,37 % pada tahun 2003; 7,36 % pada tahun 2004; 6,91 % pada tahun 2005 dan 6,13% diperkirakan akan dicapai pada tahun 2006, dan diikuti oleh sektor sekunder dengan tingkat pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 2,75 % pada tahun 2003; 3,63 % pada tahun 2004; 3,93 % pada tahun 2005 dan 4,68 % diperkirakan akan dicapai pada tahun 2006. Sedangkan yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi adalah sektor primer dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar -4,90 % pada tahun 2003; -0,18 % pada tahun 2004; -2,82 % pada tahun 2005 dan 0,73 % pada tahun 2006.



## **II.2. Gambaran Umum Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

### **A. Aspek Kelembagaan**

#### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum di dalam penetapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bersumber pada Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No: 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No: 239/IX/6/82003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. Pokok Bahasan Kebijakan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**

#### **1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan.

---

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

---



seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban<sup>1</sup>

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jakarta. 2003. Hal. 3

## BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian

Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana semua organisasi pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sayangnya konsep akuntabilitas publik seperti tersebut di atas belum memasyarakat di Indonesia. Banyak pihak mengartikan bahwa akuntabilitas publik hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja yang hanya mencakup pertanggungjawaban anggaran saja tanpa melakukan penilaian terhadap hasil, manfaat atau *outcome* yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Konsekuensinya, suatu penyelenggara pemerintah yang telah melaporkan alokasi dana yang digunakan sudah dianggap memadai pertanggungjawabannya terlepas apakah dana yang digunakan dapat bermanfaat atau tidak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini pada gilirannya telah membuka peluang yang besar akan praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana dan sumber daya lainnya selama ini.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah mulai mendapatkan penegasan secara hukum sejak dikeluarkannya Inpres no. 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut yang pada intinya



## ***BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian***

---

berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun kedepan serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam sistem manajemen kinerja diharapkan bahwa kinerja individu dan kelompok akan diselaraskan dengan kinerja unit atau instansi sehingga diharapkan bahwa apabila tujuan organisasi/instansi tercapai maka tujuan individu dan kelompok juga akan dapat dicapai. Peningkatan kinerja pelayanan terhadap masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pelayanan yang diberikan oleh individu atau kelompok. Dalam hal ini sistem manajemen kinerja pada level atau tingkatan organisasi harus dapat diturunkan kepada sistem manajemen kinerja individu atau kelompok sehingga terdapat keselarasan diantara keduanya. Organisasi atau instansi pemerintah dapat menggunakan sistem manajemen kinerja individu atau kelompok guna membantu dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kepada publik sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategik-nya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.



## **2. Konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

### **Menurut Inpres No. 7/1999**

Menurut Inpres No. 7/1999, pelaksanaan penyusunan Sistem AKIP

dilakukan dengan:

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik;
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah;
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah;
- d. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama;
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
  - 1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;
  - 2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya;
  - 3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standar internasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
  - 1) Menganalisis hasil pengukuran kinerja;

## BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian

- 2) Menginterpretasikan data yang diperoleh;
- 3) Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program;
- 4) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem AKIP di Indonesia setidaknya akan terdiri dari 4 fase utama yakni: (1) penyusunan rencana strategik, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) evaluasi kinerja. Berikut akan ditampilkan bagan yang menjelaskan siklus AKIP.

Bagan 2.1  
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber: Modul Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Tim Studi Pengembangan SAKIP. *Modul Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta. 2005

## BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian

---

Inpres 7 tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa perencanaan stratejik yang diinginkan merupakan perencanaan yang mampu memberikan manfaat yang dapat disajikan organisasi kepada masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin akan terjadi. Pada sebagian dokumen perencanaan stratejik yang ada, kondisi yang diinginkan oleh Inpres 7 tahun 1999 tersebut dapat disajikan dengan baik. Perencanaan stratejik tersebut mampu mengidentifikasi perubahan yang mungkin akan terjadi dan strategi mengantisipasinya serta mampu menyajikan manfaat nyata yang dapat diberikan organisasi kepada masyarakat dan *stakeholdernya*. Hal ini terutama terlihat pada perumusan visi, tujuan dan kegiatan organisasi.

Pada tahap berikutnya, setiap tahun perencanaan stratejik ini hendaknya dapat dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, di dalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (*strategic performance indicators*) yang relevan. Indikator kinerja strategis ini merupakan indikator kinerja dari hasil kegiatan-kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi nasional. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

Pada dua fase berikutnya, penyelenggaraan pemerintahan menetapkan pengukuran kinerja bagi implementasi perencanaan strategik tersebut. Selama melaksanakan kegiatan seluruh data kinerja dikumpulkan dan diakumulasikan. Data kinerja ini merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja yang diperoleh selama penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode pelaksanaan tertentu. Untuk dapat memperoleh dan memelihara data kinerja yang demikian, penyelenggara pemerintahan harus mengembangkan Sistem Pengumpulan Data Kinerja, yakni tatanan, instrumen, metode pengumpulan data kinerja yang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan untuk memperoleh data mengenai realisasi capaian kinerja untuk suatu periode pelaksanaan tertentu. Pada setiap akhir periode, capaian kinerja dibandingkan dengan rencana kinerja untuk kemudian dilaporkan kepada publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**3. Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di****Indonesia**

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

## ***BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian***

---

Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya *good governance*. UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting *dalam good governance*.

Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenanya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah.

## ***BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian***

---

Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja, seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* atau kondisi yang harus ada .

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah

## **BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

(APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik tersebut.

Namun demikian, implemementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi. Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral individu pelaksana untuk menjalankan pemerintahan secara amanah.<sup>1</sup>

### **4. Penerapan AKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2006**

#### **1. Akuntabilitas Kinerja Kegiatan/Program**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta

<sup>1</sup>Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia.  
[http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel\\_itjen&view=1&id=BRT070511110601](http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601)  
 diakses tanggal 23 Juli 2007



**BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban tersebut, maka tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disusun menjadi LAKIP KOTA. LAKIP yang disusun mengandung prinsip-prinsip :

- a. Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan adalah harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan ;
- b. Prinsip Prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya ;
- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran

**BABII. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

kinerja yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam analisis ini dijelaskan pula proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari pengukuran masing-masing indikator kinerja yang dituangkan dalam kerangka pengukuran kinerja berupa formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) untuk memperoleh capaian kinerja kegiatannya dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Lihat Lampiran di belakang.

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui kemajuan dan kendala dari pencapaian realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan akan diuraikan lebih lanjut pada bagian ini :

Sasaran I :Terwujudnya peningkatan PAD dan Penerimaan Dacrah Lainnya. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya  
Tahun 2006

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD	Input : Dana (Rp)	378.441.670,-	239.693.750,-	63.34
	<i>Output :</i> Jumlah hasil monitoring dan evaluasi PAD	120 Buku	120 Buku	100%
	<i>Outcome :</i> Prosentase realisasi pendapatan sesuai dengan target	100%	107,97%	107,97%

Sasaran II :Terwujudnya Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya  
Tahun 2006

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana (Rp)	942.642.560,-	725.123.350,-	76.92
	<i>Output :</i> Jumlah laporan fasilitas teknologi informasi yang sempurna	3 sistem (ABK, SAKD, SAPA)	3 sistem (ABK, SAKD, SAPA)	100%
	<i>Outcome :</i> Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	90%	90%	100%

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran kas	Input : Dana (Rp)	825.821.405,-	568.858.570,-	68.88
	Output : Jumlah laporan posisi kas yang ditertibkan	246 lembar	246 lembar	100%
	Outcome : Prosentase ketersediaan dana APBD dibanding belanja APBD	100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3. Pembinaan Perusahaan Daerah	Input : Dana (Rp)	184.990.840,-	57.364.900,-	31.01
	Output : Jumlah fasilitas pertemuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah dalam upaya tertib administrasi	12 kali pertemuan	12 kali pertemuan	100%
	Outcome : Terkoordinasinya antara Badan Pengawas dan Perusahaan Daerah dalam rangka tertib administrasi	100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4. Penelitian, Penilaian dan Pengesahan SPJ (PK) dari SKPD	Input : Dana (Rp)	721.761.815,-	396.058.505,-	54.87
	Output : Jumlah SPJ pemegang kas di SKPD yang diteliti	864/th lembar pengesahan PK	864/th lembar pengesahan PK	100%
	Outcome : Prosentase SPJ SKPD yang disahkan	100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Input : Dana (Rp)	123.500.840,-	34.204.100,-	27.70
	Output : Jumlah pemegang kas yang dibina	73 Pemegang Kas	73 Pemegang Kas	100%

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

	<i>Outcome :</i> Prosentase tingkat kecepatan dan ketepatan untuk mengelola keuangan	90%	90%	100%
--	---	-----	-----	------

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6. Pengujian SPP dan Penerbitan SPMU	Input : Dana (Rp)	2.267.044.555,-	1.466.919.260,-	64.71
	<i>Output :</i> Jumlah SPP yang sudah diteliti kebenarannya & SPM yang diterbitkan	20.412 lembar SPP non Gaji & Gaji + Suplisi, 20.412 lembar SPM Non Gaji & Gaji + Suplisi	20.412 lembar SPP non Gaji & Gaji + Suplisi, 20.412 lembar SPM Non Gaji & Gaji + Suplisi	100%
	<i>Outcome :</i> Prosentase SPM yang diterbitkan	100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7. Penyiapan Petunjuk Teknis dan Bahan Penyusunan APBD serta Perubahan APBD	Input : Dana (Rp)	2.044.621.006,-	1.466.822.700,-	71.74
	<i>Output :</i> Jumlah jenis buku penyusunan APBD, RAPBD & APBD yang tersusun	8 jenis buku	8 jenis buku	100%
	<i>Output :</i> Jumlah jenis buku penyusunan APBD, RAPBD & APBD yang tersusun	8 jenis buku	8 jenis buku	100%
	<i>Outcome :</i> Prosentase SKPD yang berpedoman pada buku APBD	100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8. Penyusunan Perhitungan dan Laporan Pertanggungjawaban Walikota atas Pelaksanaan APBD	Input : Dana (Rp)	1.364.820.555,-	804.301.345,-	58.93
	<i>Output :</i> Jumlah laporan perhitungan akhir yang diterbitkan	9 jenis buku	9 jenis buku	100%

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

	<i>Outcome :</i> Prosentase laporan perhitungan akhir yang diterbitkan	100%	100%	100%
--	---	------	------	------

Sumber : LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2006

Berdasarkan data yang diligat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 yang menggambarkan tentang capaian kinerja kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pada tahun 2006, dimana pada tabel 2.3 menggambarkan capaian kinerja kegiatan berdasarkan sasaran pertama dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu Upaya terwujudnya peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya membuat satu kegiatan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi PAD. Dari jumlah target alokasi dana sebesar Rp. 378.441.670 juta pada rencana awal, hanya dengan dana sejumlah Rp. 239.693.750 juta maka kegiatan ini tercapai 100 % sesuai dengan rencana awal. Disini dapat dilihat perbandingan antara realisasi dana dengan rencana awala adalah 63,34 %.

Selanjutnya beralih pada tabel 2.4 yang menggambarkan capaian kinerja kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berdasarkan sasaran kedua yaitu Upaya terwujudnya peningkatan tertib administrasi kegiatan. Terkait dengan sasaran kedua ini, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memiliki delapan kegiatan/program. Dapat dilihat pada tabel 2.4 point pertama, pada deskripsi kegiatan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, dari rencana alokasi dana sebesar Rp. 942.642.560 juta namun dalam realisasinya tercatat hanya dengan dana sebesar Rp. 725.123.350 juta saja semua kegiatan pada point pertama ini dapat terealisasi

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

secara 100 %. Disini dapat dilihat perbandingan antara realisasi dana pelaksanaan kegiatan dengan rencana/target awal berkisar 76,92 %.

Kemudian pada point kedua pada deskripsi kegiatan pelayanan penerimaan dan pengeluaran kas dengan target awal sebesar Rp. 825.821.405 juta, tapi pada realisasinya hanya dengan dana sebesar Rp. 568.858.570 juta saja semua item kegiatan pada point kedua ini dapat terlaksana 100%. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara capaian realisasi dengan target awal alokasi dana sebesar 68,88 %.

Pada point ketiga, kegiatan pembinaan perusahaan daerah. Rencana awal alokasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar Rp. 184.990.840 juta. Tapi hanya dengan dana sejumlah Rp. 57.364.900 juta seluruh kegiatan dapat berhasil 100 %. Perbandingan antara capaian realisasi dengan target awal sebesar 31,01 %. Kemudian pada point keempat pada kegiatan Penelitian, Penilaian dan Pengesahan SPJ (PK) dari SKPD dari rencana semula alokasi dana sebesar Rp. 721.761.815 juta, ternyata semua kegiatan ini mencapai target 100 % hanya dengan dana sebesar Rp. 396.058.505 juta. Perbandingan realisasi anggaran dengan target anggaran adalah 54,87 %. Selanjutnya pada point kelima, kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa rencana awal alokasi dana sebesar Rp. 123.500.840 juta, tapi hanya dengan dana sebesar Rp. 34.204.100 juta semua kegiatan dapat terealisasi 100 %. Perbandingan capaian realisasi anggaran yang dipakai dengan target awal adalah sebesar 28,70 %.

Pada point keenam kegiatan Pengujian SPP dan Penerbitan SPMU. Target awal yang sebesar Rp. 2.267.044.555 milyar, ternyata hanya dengan dana sebesar Rp. 1.466.919.260 milyar semua kegiatan dapat terlaksana secara 100 %. Dapat dilihat disini bahwa perbandingan antara realisasi alokasi dana yang terpakai habis guna tercapainya kegiatan dengan target awal alokasi dana adalah sebesar 64,71 %. Kemudian pada point ketujuh kegiatan penyiapan petunjuk teknis dan bahan penyusunan APBD serta perubahan APBD, dari target awal alokasi dana sebesar Rp. 2.044.621.006 milyar, hanya dengan Rp. 1.466.822.700 milyar maka semua kegiatan pada point ini dapat terealisasi 100 %. Persentase perbandingan antara capaian realisasi alokasi dana yang terpakai dengan target awal adalah sebesar 71,74 %. Terakhir pada point kedelapan, kegiatan penyusunan perhitungan dan laporan pertanggungjawaban walikota atas pelaksanaan APBD, dari target awal sebesar Rp. 1.364.820.555 milyar, ternyata hanya dengan Rp. 804.301.345 juta maka kegiatan ini dapat teralisasi 100 %. Disini dapat dilihat perbandingan antara realisasi capaian dana yang terpakai dengan target awal alokasi dana sebesar 58,93 %.

## **2. Akuntabilitas Keuangan**

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2006 adalah sebagai berikut :



**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

Tabel 2.5  
Akuntabilitas Keuangan  
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya  
Tahun 2006

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD	378.441.670,-	239.693.750,-	63.34
2.	Penyiapan Petunjuk Teknis dan Bahan Penyusunan APBD serta Perubahan APBD	2.044.621.006,-	1.466.822.700,-	71.74
3.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	942.642.560,-	725.123.350,-	76.92
4.	Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran kas.	825.821.405,-	568.858.570,-	68.88
5.	Pembinaan Perusahaan Daerah	184.990.840,-	57.364.900,-	31.01
6.	Penyusunan Perhitungan dan Laporan Pertanggungjawaban Walikota atas Pelaksanaan APBD	1.364.820.555,-	804.301.345,-	58.93
7.	Penelitian, Penilaian dan Pengesahan SPJ (PK) dari SKPD	721.761.815,-	396.058.505,-	54.87
8.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan	123.500.840,-	34.204.100,-	27.70
9.	Pengujian SPP dan Penerbitan SPMU	2.267.044.555,-	1.466.919.260,-	64.71
	TOTAL	8.853.645.246,-	5.759.346.480,-	65.05

Sumber : LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2006

Dari tabel 2.5 di atas dapat dilihat total rencana awal atau target alokasi dana yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk melaksanakan kinerja kegiatan sebesar Rp. 8.853.645.246 milyar, tapi hanya sejumlah Rp. 5.759.346.480 milyar saja. Dari hasil perhitungan antara rencana dan realisasi anggaran tersebut terlihat bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.094.298.766 milyar. Disini terlihat jelas jika dilakukan perbandingan antara total realisasi anggaran yang habis digunakan dengan rencana awal alokasi anggaran adalah sebesar 65,05 %. Dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengalami inefisiensi penggunaan anggaran.



Hal ini disebabkan tidak adanya perencanaan anggaran yang matang dan efektif sehingga dapat dilihat bahwa dari total target awal yang direncanakan, jumlah anggaran tersebut masih ada sisa walaupun semua target kegiatan yang direncanakan terealisasi 100 %.

### **II.3. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Sebagai satuan kerja yang mengelola keuangan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah menetapkan visinya yaitu :

*“Pengelola Keuangan Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel “*

Adapun maksud dari Visi tersebut tercermin dari 3 kata kunci yaitu :

*Profesional* yang berarti selalu mengembangkan (mengupdate) diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

*Transparan* sebagai satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan Daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan Informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan.

*Akuntabel* yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Visi tersebut sejalan dengan Visi Kota yang telah ditetapkan di Rancangan Awal RPJM yaitu “Surabaya Cerdas & Peduli“. Adanya unsur kecerdasan dalam visi kota akan selalu berdampak pada sikap yang Profesional

## **2. Misi**

Dalam upaya mencapai visi tersebut ditetapkanlah misi Badan Pengelolaan Keuangan yaitu :

*“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efisien dan Efektif“*

Misi tersebut mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel Badan Pengelolaan Keuangan tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif. Pengelolaan yang efisien mengandung makna bahwa pelaksanaan program dan kegiatan harus benar-benar mampu meminimalisasikan ketersediaan anggaran yang ada, sedangkan pengelolaan yang efektif disini mengandung makna bahwa program dan kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan harus mampu mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, maka Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan yaitu melaksanakan tugas kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah provinsi.



Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Keuangan daerah
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pembinaan terhadap Unit pelaksanaan Teknis Badan
- d. Pengelolaan ketatausahaan badan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya terdiri dari 1 (Satu) Bagian, 2 (Dua) Sub Bagian dan 3 (Tiga) Bidang serta 6 Sub Bidang dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

#### **I. Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan Badan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

## ***BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian***

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **(1) Sub Bagian Umum**

Mempunyai tugas pokok :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Umum;menyiapkan bahan pengawasan dan instansi lain dibidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawsan dan pengendalian di bidang umum
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. melaksnakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(2). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengawsan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## **II. Bidang Pengelolaan Anggaran**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pengelolaan anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan anggaran;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan anggaran;



- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan anggaran;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan anggaran;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan penerimaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan penerimaan;
- c. pelaksanaan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan penerimaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penerimaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Sub Bidang Pengelolaan Pembelanjaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pembelanjaan;



- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pembelanjaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan pembelanjaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan pembelanjaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **III. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perbendaharaan dan verifikasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perbendaharaan dan verifikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perbendaharaan dan verifikasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan dan verifikasi;





- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- e. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya

(1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perbendaharaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan verifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang verifikasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang verifikasi;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang verifikasi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang verifikasi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan verifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **IV. Bidang Kas dan Akuntansi**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Kas dan Akuntansi ;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang mempunyai fungsi Kas dan Akuntansi:

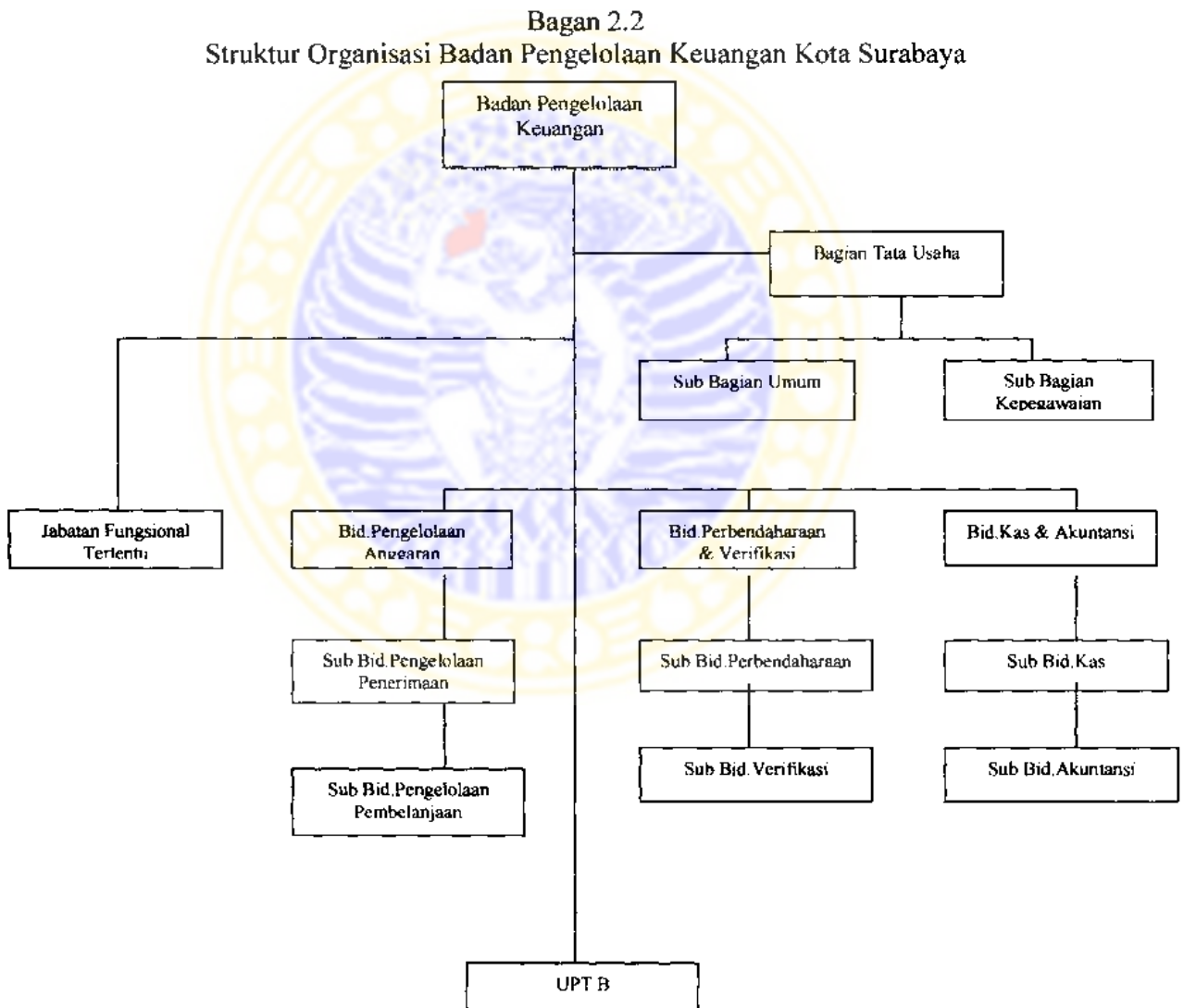
- (1) Sub Bidang Kas mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang kas;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang Kas;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kas
  - d. menyiapkan bahan pengawsan dan pengendalian di bidang kas;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksaaan tugas;



- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, maka Badan Pengelolaan Keuangan terdiri dari terdiri dari 1 (Satu) Bagian, 2 (Dua) Sub Bagian dan 3 (Tiga) Bidang serta 6 Sub Bidang.





#### D. Struktur Kepegawaian dan Perlengkapan

Badan Pengelolaan Keuangan memiliki 1 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 1 Kepala Bagian, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 6 Kepala Sub Bidang. Adapun secara rinci jumlah personil menurut tingkat pendidikan dan golongan terlihat dalam daftar tabel berikut ini.

Tabel 2.6  
Komposisi dan Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	STATUS KEPEg/ PEND. AKHIR	1 Ka. BPKD, 1 Ka. TU, 3Ka. Bidang	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN								TOT
			TU		Pengelolaan Angg.		PrbBendahra &Verifikasi		Kas &Akuntansi		
			Umum	Kepeg	Penerimaan	Belanja	Perben dahara an	Verifi	Kas	Akun	
A	PNS										
1	S-2	3	-	1	-	1	1	-	2	-	
2	S-1	2	5	2	5	4	13	7	5	7	
3	D-3 / D-1		-	-	-	-	4	-	-	-	
4	SLTA		2	1	-	2	18	4	4	2	
5	SLTP		-	-	-	-	-	-	3	-	
6	SD		-	-	-	-	2	-	-	1	
	JUMLAH (A)	5	7	4	5	7	38	11	14	10	101
B	HONDA										
1	S-2		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	S-1		1	1	-	2	6	1	1	1	
3	D-3 / D-1		-	-	-	1	-	-	-	1	
4	SLTA		2		-	-	4	2	1	2	
5	SLTP		2		-	-	-	1	-	-	
6	SD		-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH (B)		5	1	-	3	10	4	2	4	29
	JUMLAH A + B	5	12	5	5	10	48	15	16	14	130

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

**BAB II. Gambaran Umum Kajian Penelitian**

**Tabel.2.7**  
**Komposisi dan Jumlah Pegaai Badan Pengelola Keuangan Berdasarkan Golongan**

URAIAN GOLONGAN	KA, BPKD & BAGIAN TATA USAHA	BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	BIDANG KAS DAN AKUNTANSI	JUMLAH
Gol. IV	2	1	-	-	3
Gol. III	10	9	32	15	66
Gol. II	1	3	17	9	30
Gol. I	-	-	1	1	2
HONORER	6	3	14	6	29
JUMLAH	19	16	64	31	130

Sumber: Sub. Bagian Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dengan melihat tabel kepegawaian diatas, terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan memiliki jumlah SDM yang proposional. Jumlah ini sangat mendukung bagi pelaksanaan program-program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan. Namun hal ini perlu dievaluasi secara berkesinambungan terkait dengan adanya pegawai yang pensiun setiap tahunnya, sehingga tidak mengganggu kinerja Badan Pengelolaan Keuangan



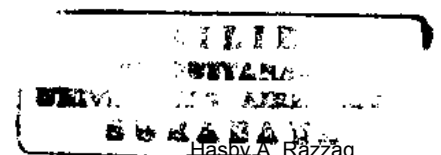
## BAB III

### PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 72 responden. Secara fungsional, penyajian data ini digunakan untuk melihat gejala masing-masing variabel sekaligus sebagai dasar untuk mengkorelasikan variabel penelitian. Selain berisi tentang penyajian data, bab ini juga akan disajikan analisa data. Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan dilakukan analisa adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah disebutkan ditolak atau diterima. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa tingkat profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### III.1 Penyajian data

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa penelitian ini terdiri dari dua variabel pengaruh yakni tingkat profesionalisme aparat (variabel  $x_1$ ) dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah (variabel  $x_2$ ) serta satu variabel terpengaruh yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel  $y$ ). Adapun uraian-uraian dari masing-masing variabel tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang bersangkutan.





## 1. Variabel Pengaruh (X)

### A. Tingkat Profesionalisme Aparat (Variabel X1)

Berbicara mengenai profesionalisme dalam kaitannya dengan upaya perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pastinya tidak terlepas dari peran aparat sebagai salah satu sumber daya yang menentukan dalam pelaksanaan nilai akuntabilitas publik. dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu mutlak dimiliki oleh setiap aparat sebagai nilai penting yang menunjang eksistensi kinerja aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme tersebut bisa dilihat dari pengetahuan seseorang, keahlian dan keterampilan seseorang baik yang didapat melalui jalur pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang non formal atau pengalaman. Selain keterampilan atau keahlian, nilai profesionalisme itu juga bisa dilihat dari aspek moral atau perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan kepadanya.

#### 1. Tingkat Pengetahuan Aparat

Profesionalisme aparat tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang dimiliki oleh aparat. Dengan pengetahuan yang dimiliki akan memudahkan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Pengetahuan memiliki kaitan erat dengan kepandaian yang dimiliki oleh aparat. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimiliki oleh aparat berkaitan dengan segala sesuatu yang diketahui aparat berkenaan dengan Tupoksi suatu instansi yang harus dijalankan oleh aparat. Dengan pengetahuan yang dimiliki, akan meningkatkan pemberian layanan kepada para pengguna layanan. Tingkat





pengetahuan aparat dapat diukur melalui kesesuaian pendidikan aparat dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga melalui pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan.

### 1.1 Tingkat Kesesuaian Pendidikan aparat dengan Pekerjaan

Dalam upaya menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan adanya kesesuaian antara pendidikan yang dimiliki aparat dengan pekerjaan yang menjadi Tupoksi. Dengan adanya kesesuaian antara pendidikan aparat dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakannya maka akan memudahkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan.

Kaitan antara pendidikan yang dimiliki aparat dengan pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui melalui pendidikan formal yang selama ini telah ditempuh dengan kemampuan di dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Pendidikan formal yang dimiliki oleh aparat terkait dengan pendidikan yang selama ini telah ditempuh melalui sekolah formal.

Tabel 3.1  
Jenjang Pendidikan Formal dalam Membantu menyelesaikan Tugas Sehari-hari

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak membantu	0	-
Kurang membantu	13	18,1%
Cukup membantu	52	72,2%
Sangat Membantu	7	9,7%
Total	72	100%

Sumber data : kuesuoner no.1



Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 72,2% responden menyatakan bahwa pendidikan formal yang telah ditempuh selama ini dinilai cukup membantu aparat dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sebanyak 18,1% responden menyatakan bahwa dalam penyelesaian tugas sehari-hari kurang terbantu oleh pendidikan formal yang dimiliki. Selain itu sebanyak 9,7% responden menyatakan pendidikan formal yang ditempuh sangat membantu dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hampir sebagian besar aparat menganggap dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, dirasa cukup terbantu oleh pendidikan formal yang dimilikinya.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah formal. Pekerjaan atau jabatan yang diterima oleh aparat merupakan tanggungjawab dan wewenang yang dipercayakan kepada aparat dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kesesuaian antara pendidikan formal yang dimiliki dengan pekerjaan atau jabatan yang ada akan memudahkan aparat dalam melaksanakan kinerja secara profesional.

Tabel 3.2  
Tingkat Kesesuaian Pendidikan Formal dengan Pekerjaan atau Jabatan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak sesuai	0	-
Kurang sesuai	9	12,5%
Cukup sesuai	55	76,4%
Sangat sesuai	8	11,1%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.2



Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 76,4% responden menyatakan pekerjaan yang dijalankannya selama ini dinilai cukup sesuai dengan pendidikan formal yang dimiliki. Sebanyak 12,5% responden menyatakan tingkat pendidikan yang ditempuh kurang sesuai dengan pekerjaan saat ini. Selain itu sebanyak 11,1% responden menyatakan tingkat pendidikan yang ditempuh sangat sesuai dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hampir sebagian besar aparat menganggap pekerjaan yang dijalani saat ini dirasa cukup sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang dimilikinya.

### 1.2 Tingkat Pengetahuan dalam Menyelesaikan Pekerjaan

Pengetahuan yang dimiliki oleh aparat berkaitan dengan nilai-nilai profesionalisme aparat. Dengan pengetahuan yang dimiliki tentunya akan mendukung kinerja aparat menjadi lebih profesional dan akuntabel di dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki aparat diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada aparat untuk dapat menyelesaikan tugas yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

Tabel 3.3  
Pengetahuan dalam Membantu Menyelesaikan Tugas Sehari-hari

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak membantu	0	-
Kurang membantu	5	7%
Cukup membantu	50	69,4%
Sangat Membantu	17	23,6%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.3



Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat sebanyak 69,4% responden menyatakan pengetahuan yaang dimiliki selama ini dinilai cukup membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sebanyak 23,6% responden menyatakan pengetahuannyang dimiliki selama ini sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada saat ini. Selain itu sebanyak 7% responden menyatakan pengetahuan yang dimiliki kurang membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hampir sebagian besar aparat menganggap pengetahuan yang dimiliki selama ini cukup membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

## **2. Tingkat Keahlian Aparat**

Untuk mengetahui tingkat profesionalisme aparat bisa dilihat melalui tingkat keahlian yang dimiliki oleh aparat. Kata ahli merupakan pengertian dari seseorang yang mahir atau paham akan sesuatu hal. Keahlian aparat merupakan kemahiran yang dimiliki aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat. Dengan keahlian yang dimiliki maka akan menunjang kinerja dari aparat. Kinerja yang optimal dapat ditunjukkan melalui profesionalisme aparat. Seperti yng diungkapkan oleh Wignjosoebroto bahwa dalam mewujudkan nilai profesionalisme dibutuhkan suatu watak kerja yang memiliki kemahiran teknis yang berkualitas.

### **2.1 Tingkat Penguasaan Teknologi alat Kerja**

Saat ini dalam era teknologi yang sangat pesat, dimana teknologi terus mengalami perkembangan dan selalu muncul teknologi baru yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia. Kemunculan komputer sebagai media dan



sarana di dalam memudahkan kerja dan aktivitas manusia. Sebagai aparat yang profesional maka sudah sewajarnya untuk dituntut mampu dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi sehingga dapat memudahkan kinerja.

Dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi komputer ini ditunjukkan melalui kemampuan aparat dalam mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi sebagai media dan sarana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan juga sebagai pertanggungjawaban kinerja aparat di dalam mengelola pemerintahan.

Tabel 3.4  
Kemampuan Mengoperasikan Komputer Aplikasi Sistem Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak mampu	0	-
Kurang mampu	7	9,7%
Cukup mampu	51	70,8%
Sangat Mampu	14	19,4%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.4

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui sebanyak 70,8% responden cukup mampu dalam mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi. Sebanyak 19,4% responden mengaku sangat mampu dalam mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi. Disamping itu sebanyak 9,7% responden menyatakan kurang mampu dalam mengoperasikan komputer. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar aparat cukup mampu dalam mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi.



Setelah mengetahui kemampuan aparat yang cukup mampu di dalam mengoperasikan komputer, maka untuk dapat mengetahui tingkat profesionalisme aparat terkait dengan keahlian aparat dapat dilihat lebih dalam terkait dengan kemampuan mengoperasikan komputer yang dimiliki apakah mampu memudahkan kinerja aparat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Tabel 3.5  
Kemampuan Mengoperasikan Komputer dalam Membantu Menyelesaikan Tugas Sehari-hari

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak membantu	0	-
Kurang membantu	9	12,5%
Cukup membantu	48	66,7%
Sangat Membantu	15	20,8%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.5

Dari tabel 3.5 di atas diketahui sejumlah 66,7% responden mengatakan dengan kemampuan operasionalisasi komputer aplikasi sistem informasi dirasa cukup membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sedangkan 20,8% responden merasa kemampuan operasionalisasi komputer yang dimiliki sangat membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sisanya sebanyak 12,5% responden merasa dengan kemampuan operasionalisasi komputer kurang membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat merasa cukup terbantu dengan kemampuan operasionalisasi komputer yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.



## 2.2 Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan meningkatkan kinerja aparat dibutuhkan adanya pelatihan. Pelatihan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat terkait dengan bidang tugas yang diamanahkan kepadanya. Pelatihan sangat dibutuhkan dalam penyiapan aparat yang profesional. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas yang dijalankannya maka aparat akan mudah dalam mengaplikasikannya ke dalam tugas sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Pelatihan disini terkait dengan pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh aparat dalam rentang waktu tertentu. Dengan beragamnya pendidikan non formal atau pelatihan yang diikuti oleh aparat dan banyaknya pelatihan yang diikuti akan menunjukkan tingkat pengetahuan, keahlian dan pemahaman terhadap bidang tugas yang dimiliki akan semakin baik.

Tabel 3.6  
Frekuensi Pendidikan Non Formal yang Diikuti dalam Setahun

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	0	-
1-4 kali setahun	6	8,3%
5-8 kali setahun	45	62,5%
>9 kali setahun	21	29,2%
Total	72	100 %

Sumber data : kuesioner no.6



Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa 62,5% responden mengikuti pendidikan non formal dalam rangka pembinaan dan pengembangan sebanyak 5-8 kali dalam setahun. Sebanyak 29,2% responden mengikuti pendidikan non formal sebanyak >9 kali dalam setahun. Selanjutnya 8,3% responden 1-4 kali mengikuti pendidikan non formal dalam setahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar aparat mengikuti pendidikan non formal sebanyak 5-8 kali dalam setahun.

Dari berbagai pelatihan yang telah diikuti pastinya memperoleh tambahan pengetahuan dan materi yang baru kepada aparat sehingga dengan peningkatan kemampuan serta pengetahuan yang baru akan dapat memudahkan kinerja aparat dan meningkatkan profesionalisme aparat. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelatihan ataupun pendidikan non formal yang telah diikuti dapat diketahui melalui kesesuaian antara materi pelatihan yang diberikan dengan bidang tugas yang dilaksanakan.

Tabel 3.7  
Kesesuaian Materi yang Diberikan dengan Tugas yang Dilaksanakan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak sesuai	0	-
Kurang sesuai	6	8,3%
Cukup sesuai	50	69,4%
Sangat sesuai	16	22,3%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.7





Berdasarkan tabel 3.7 di atas 69,4 % responden menyatakan antara materi yang diberikan dalam pelatihan yang telah diikuti cukup sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Sebanyak 22,3 % responden menyatakan materi yang diberikan ketika mengikuti pelatihan sangat sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Sisanya sebesar 8,3 % responden menyatakan bahwa kurang adanya kesesuaian antara materi yang diberikan dalam pelatihan dengan tugas yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat menyatakan antara materi yang disampaikan pada saat pelatihan cukup sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

### 2.3 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merupakan faktor yang turut mempengaruhi profesionalisme aparat. Dengan pengalaman kerja yang dimiliki maka aparat akan menjadi lebih paham dan tahu dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparat bisa dilihat dengan lama waktu dalam pelaksanaan tugas sejenis. Sehingga dengan pengalaman menjalankan tugas yang sejenis dipastikan bahwa aparat akan dapat lebih meningkatkan kinerja.

Tabel 3.8  
Durasi Waktu dalam Pelaksanaan Tugas Sejenis

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
<7,5 tahun	0	-
7,5 - <15 tahun	5	6,9%
15- <22,5 tahun	51	70,8%
>22,5 tahun	16	22,3%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.8



Dari tabel 3.8 di atas sejumlah 70,8% responden memiliki durasi waktu antara 15 - < dari 22,5 tahun dalam menjalankan tugas yang sejenis. Sejumlah 22,3% responden menyatakan telah melalui waktu > dari 22,5 tahun dalam menjalankan tugas sejenis. Sisanya sejumlah 6,9% responden menyatakan telah menjalankan tugas sejenis dalam kurun waktu 7,5 - < dari 15 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat memiliki pengalaman yang cukup lama dalam durasi 15 - < 22,5 tahun dalam melaksanakan tugas yang sejenis.

### **3. Tingkat Kemampuan Aparat**

Kemampuan aparat memang memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebagaimana yang dikatakan Sondang “memang harus diakui bahwa pada umumnya organisasi dihadapkan pada situasi kelangkaan sepanjang menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi situasi kelangkaan itu tidak boleh mengurangi tekad dan kemampuan untuk bekerja keras, malahan salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.” Menurut Miftah Toha “kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan atau pengalaman.

#### **3.1 Tingkat Kemampuan Berkomunikasi**

Kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan oleh aparat di dalam melaksanakan Tupoksi. Kemampuan berkomunikasi aparat dapat dilihat melalui kemampuan di dalam memberikan maupun menerima informasi/pesan sehingga



dapat memperlancar kinerja. Kemampuan berkomunikasi aparat dapat dilihat dari kemampuan aparat dalam memahami dan menerima informasi terkait dengan pelaksanaan Tupoksi.

### 3.2 Tingkat Kemampuan Melaksanakan Tugas sesuai dengan Prosedur yang berlaku

Selain dilihat melalui kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan aparat juga dapat diketahui melalui kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah digariskan maka akan meningkatkan kinerja individu dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja dari instansi tersebut. Kemampuan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat dilihat dari kesesuaian antara tugas yang dilaksanakan dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9  
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Tugas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah Ditetapkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	0	-
Kadang-kadang	1	1,4%
Hampir selalu	48	66,7%
Selalu	23	31,9%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no. 10



Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 66,7% responden menyatakan aparat dalam melaksanakan tugasnya hampir selalu bekerja sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Sebanyak 31,9% responden menyatakan aparat selalu bekerja sesuai dengan SOP. Selain itu, sebanyak 1,4% responden menyatakan kadang-kadang bekerja sesuai dengan SOP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian aparat menyatakan dalam melaksanakan tugasnya hampir selalu bekerja sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku.

Kemampuan aparat dalam memahami tugas dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan memahami tugas yang menjadi tanggungjawab aparat maka akan meningkatkan kinerja aparat dan tidak melenceng dari apa yang telah menjadi prosedur standar dalam pelaksanaan tugas.

#### **4. Perilaku Aparat**

Dalam penyiapan sumber daya aparatur yang profesional maka sangat dibutuhkan kualitas perilaku aparat yang sesuai dengan etika kepegawaian yang ada. Perilaku aparat merupakan perbuatan dan tindakan aparat di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan. Menurut Wignjosoebroto, kerja seorang profesional dapat dilihat melalui kualitas moral yang disepakati di dalam sebuah organisasi. Perilaku aparat dapat dilihat melalui tingkat kedisiplinan aparat dan komitmen aparat di dalam pelaksanaan tugas.



#### **4.1 Tingkat kedisiplinan**

Kedisiplinan merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Kedisiplinan aparat dapat ditunjukkan melalui perilaku aparat yang selalu berusaha tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Selain dapat diketahui melalui perilaku yang tepat waktu dalam melaksanakan tugas, bentuk kedisiplinan aparat juga dapat dilihat melalui tingkat keterlambatan aparat untuk tiba di kantor. Dengan seringnya keterlambatan yang dilakukan aparat untuk tiba di tempat kerja maka akan mempengaruhi kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas.

#### **4.2 Tingkat komitmen pelaksanaan tugas**

Selain dapat dilihat melalui tingkat kedisiplinan, perilaku aparat juga dapat dilihat melalui komitmen yang ditunjukkan oleh aparat di dalam pelaksanaan tugas. Komitmen merupakan suatu bentuk keterokatan aparat baik terhadap bidang pekerjaan yang dilaksanakan maupun terhadap organisasi tempat bekerja. Komitmen merupakan kebutuhan vital dari organisasi agar tiap aparatnya yang dengan kemauannya sendiri dapat memberikan kemampuan terbaiknya dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi. Menurut Greenberg dan Baron, komitmen merupakan refleksi dari identifikasi seseorang yang melibatkan diri dengan organisasinya dan tidak berharap meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen aparat dapat ditunjukkan melalui tanggungjawab yang dimiliki oleh aparat dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.



Tabel 3.10  
Tanggung jawab dalam Menyelesaikan Tugas Sehari-hari

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak memiliki	0	-
Kurang memiliki	8	11,1%
Cukup memiliki	51	70,8%
Sangat Memiliki	13	18,1%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.14

Dari tabel 3.14 di atas sebanyak 70,8% responden mengaku cukup memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sebanyak 18,1% responden menyatakan sangat memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Sisanya sebesar 11,1% responden menyatakan kurang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat cukup memiliki rasa tanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

Untuk dapat melihat komitmen aparat terkait dengan pelaksanaan tugas maka dapat diketahui melalui persentase penyelesaian tugas yang dibebankan kepadanya dalam rentang waktu satu bulan. Semakin tinggi persentase penyelesaian tugas yang dilaksanakan oleh aparat akan semakin memperlihatkan komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3.11  
 Persentase Penyelesaian Tugas dalam Waktu Satu bulan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
<25%	0	-
25% - <50%	5	6,9%
50% - <75%	51	70,8%
>75%	16	22,3%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.15

Dari tabel 3.11 di atas sejumlah 70,8% responden memiliki persentase 50 - < 75% dalam menyelesaikan tugas dalam waktu satu bulan. Sedangkan sebanyak 22,3% responden menyatakan memiliki kemampuan >75% dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu satu bulan. Sisanya, 6,9% responden menyatakan mampu menyelesaikan tugas antara 25 - 50% dalam waktu satu bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparat memiliki kemampuan sebesar 50 - < 75% dalam hal penyelesaian tugas selama satu bulan.

#### **B. Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Variabel X2)**

Menurut Laudon dan Laudon, Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Secara sederhana sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sub informasi yang terdiri dari data yang kemudian diolah dan menghasilkan suatu informasi untuk tujuan tertentu. Pengertian sistem informasi keuangan daerah itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah



adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut untuk selalu akuntabel. Melalui penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang efektif diharapkan akan menjadikan pengelolaan Keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem informasi dapat dilihat melalui kualitas sistem informasi yang ada, kualitas informasi yang ditampilkan serta intensitas penggunaan sistem informasi tersebut.

### **1. Kualitas Sistem**

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Fokusnya adalah performa dari sistem, yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan bagi pengguna. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegunaan sistem dari sudut pandang *users*, apakah mereka merasakan kegunaan dari sistem dalam menyelesaikan pekerjaannya.

#### **1.1 Tingkat Kemudahan untuk Digunakan**

Tingkat kemudahan untuk digunakan dapat diketahui dengan merasakan bahwa sistem informasi membantu aparat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka secara lebih cepat. Aparat juga merasa bahwa





sistem informasi memberi kemampuan bagi mereka untuk bekerja lebih efektif. Hal itu dapat ditunjukkan melalui banyaknya jumlah komputer yang ada sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas, jumlah komputer rusak yang ada di instansi tersebut dan juga melalui kemudahan di dalam mempelajari cara mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi tersebut.

Selain dapat dilihat melalui banyaknya jumlah komputer yang tersedia, tingkat kemudahan untuk digunakan dapat dilihat juga melalui banyaknya jumlah komputer yang rusak pada instansi tersebut. Dengan kondisi komputer yang rusak maka akan mempersulit kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas.

Tingkat kemudahan untuk digunakan juga dapat diketahui melalui kemudahan yang didapatkan oleh aparat di dalam mempelajari cara mengoperasikan komputer aplikasi sistem informasi yang ada. Dengan mampu mengoperasikan komputer tersebut maka akan memudahkan kinerja aparat.

Tabel 3.12  
Kemudahan dalam Mempelajari Cara Mengoperasikan Sistem Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak mudah	0	-
Kurang mudah	21	29,2%
Cukup mudah	51	70,8%
Sangat Mudah	0	-
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.18

Dari tabel 3.12 di atas sebanyak 70,8% responden menjawab cukup mudah dalam mempelajari cara mengoperasikan sistem informasi. Sedangkan sisanya sebesar 29,2% responden mengatakan kurang mudah dalam mempelajari cara



mengoperasikan sistem informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi yang telah diterapkan cukup mudah dipelajari sehingga dapat membantu aparat dalam mengoperasikan sistem informasi.

## 1.2 Tingkat Kemudahan untuk Diakses

Untuk mendapatkan informasi yang baik maka dibutuhkan suatu akses. Fasilitas sistem informasi yang diterapkan dalam pengelolaan sistem informasi keuangan daerah harus mampu memberikan kemudahan untuk diketahui oleh masyarakat atau publik. Dengan memberikan kemudahan untuk diakses akan menunjukkan nilai transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan sistem informasi tersebut.

Tabel 3.13  
Fasilitas Sistem Informasi dalam Menawarkan Kemudahan untuk Diakses

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	0	-
Kadang-kadang	20	27,8 %
Hampir selalu	49	68 %
Selalu	3	4,2 %
Total	72	100 %

Sumber data : kuesioner no.19

Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui bahwa sejumlah 68% responden menyatakan bahwa hampir selalu ada kemudahan dalam mengakses fasilitas sistem informasi yang ada. Sejumlah 27,8% responden menyatakan kadang-kadang saja memberikan kemudahan untuk di akses. Sisanya 4,2% responden menyatakan bahwa fasilitas sistem informasi yang ada selalu mudah untuk di



akses. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas sistem informasi yang ada hampir selalu menawarkan kemudahan untuk di akses.

### 1.3 Tingkat Kecepatan Akses

Untuk memudahkan kinerja aparat dalam menjalankan tugas sehari-hari dibutuhkan perangkat sistem informasi yang menawarkan kecepatan di dalam akses. Dengan tingkat kecepatan akses yang tinggi maka akan mengefektifkan kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.14  
Kecepatan Sistem Informasi saat Digunakan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak cepat	1	1,4%
Kurang cepat	17	23,6%
Cukup cepat	50	69,4%
Sangat cepat	4	5,6%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.20

Berdasarkan tabel 3.14 di atas sebanyak 69,4% responden menyatakan tingkat kecepatan sistem informasi cukup cepat ketika digunakan. Sebanyak 23,6% responden menyatakan kecepatan sistem informasi yang ada kurang cepat untuk dapat digunakan. Kemudian 5,6% responden menyatakan kecepatan sistem informasi yang ada sangat cepat ketika digunakan. Sisanya sebanyak 1,4% responden menyatakan kecepatan sistem informasi saat digunakan adalah tidak cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kecepatan sistem informasi yang tersedia cukup cepat ketika digunakan.



Untuk dapat lebih mengetahui kecepatan akses fasilitas komputer aplikasi sistem informasi yang tersedia di kantor maka dapat dilihat melalui ukuran kecepatan yang dimiliki oleh perangkat komputer tersebut. Semakin tinggi tingkat kecepatan akses komputer maka akan mengefektifkan kinerja aparat.

**Tabel 3.15**  
Kecepatan akses Fasilitas Komputer Aplikasi Sistem Informasi yang Tersedia di Kantor

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
0 – 24 Kbs	1	1,4%
>24 – 64 Kbs	20	27,7%
>64 – 100 Kbs	48	66,7%
>100 Kbs	3	4,2%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.21

Berdasarkan tabel 3.15 di atas dapat dilihat 66,7% responden menyatakan kecepatan akses fasilitas aplikasi sistem informasi yang tersedia memiliki kecepatan akses > 64 – 100 Kbs. Kemudian 27,7% responden di antaranya mengatakan kecepatan aksesnya berkisar > 24- 64 Kbs. Sedangkan 4,2% responden menyatakan kalau kecepatan akses yang tersedia > 100 Kbs. Sisanya 1,4% responden menyatakan kecepatan aksesnya yaitu antara 0 – 24 Kbs. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecepatan akses fasilitas komputer sistem informasi yang tersedia memiliki kecepatan antara > 64 Kbs hingga 100 Kbs.

#### 1.4 Tingkat Ketahanan dari Kerusakan

Tingkat ketahanan dari kerusakan turut mempengaruhi kualitas sistem yang ada. Apabila komputer aplikasi sistem informasi yang ada memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan maka akan meningkatkan kinerja



aparat. Ketahanan komputer aplikasi sistem informasi ini dapat dilihat melalui intensitas komputer tersebut terserang virus komputer dalam rentang waktu satu bulan. Selain juga dapat dilihat melalui program anti virus yang digunakan untuk menangkal serangan virus terhadap komputer yang ada.

Tabel 3.16  
Intensitas Perangkat Komputer Aplikasi Sistem Informasi, terserang Virus  
Komputer dalam Rentang Waktu Satu bulan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	1	1,4%
Kadang-kadang	22	30,6%
Cukup sering	44	61,1%
Sering sekali	5	6,9%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.22

Dari tabel 3.16 di atas dapat dilihat sebanyak 61,1% responden mrngatakan kalau ternyata perangkat komputer yang ada cukup sering terserang virus dalam rentang waktu satu bulan. Sedangkan sebanyak 30,6% responden menyatakan hanya kadang-kadang saja perangkat komputer terserang viris dalam satu bulan. Sedangkan sebanyak 6,9% responden menyatakan kalau perangkat komputer yang ada sering sekali terserang virus dalam satu bulasn. Sisanya sebanyak 1,4% responden mengatakan kalau perangkat komputer yang ada tidak pernah terserang virus. Dari pemaparan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat komputer yang ada di instansi ini cukup sering terserang virus dalam rentang waktu satu bulan.



tugasnya dengan lebih baik. Berikut beberapa atribut sistem yang memiliki kualitas informasi adalah tingkat akurasi informasi, tingkat keyepatwaktuan, kelengkapan informasi dan format penyajian informasi.

### 2.1 Tingkat Keakuratan Informasi

Akurat merupakan cermat dan tepat. Tingkat keakuratan informasi ini untuk menilai apa informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi sehingga dapat memudahkan pengguna/aparat dalam melaksanakan tugas.

Tabel 3.18  
Tingkat Akurasi data Sistem Informasi tersebut

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak akurat	0	-
Kurang akurat	22	30,6%
Cukup akurat	45	62,5%
Sangat akurat	5	6,9%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.24

Dari tabel 3.18 di atas dapat dilihat sebanyak 62,5% responden mengatakan tingkat akurasi data sistem informasi yang ada ternyata cukup akurat. Sedangkan 30,6% responden mengatakan kalau tingkat akurasi data yang ada kurang akurat. Sisanya 6,9% responden mengatakan kalau tingkat akurasi data yang dihasilkan ternyata sangat akurat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi data sistem informasi yang ditampilkan ternyata cukup akurat.



## 2.2 Tingkat Ketepatanwaktu

Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi harus tepat waktu, artinya tidak kadaluarsa dan dapat diperoleh setiap saat pada saat aparat membutuhkan informasi.

Tabel 3.19  
Ketepatanwaktu Informasi pada saat Dibutuhkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak tepat waktu	0	-
Kurang tepat waktu	16	22,2%
Cukup tepat waktu	52	72,2%
Sangat tepat waktu	4	5,6%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.25

Dari tabel 3.19 di atas dapat diketahui bahwa 72,2% responden mengatakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada instansi tersebut cukup tepat waktu ketika di butuhkan. Sedangkan 22,2% responden mengatakan ternyata informasi yang ada kurang tepat waktu pada saat dibutuhkan. Sisanya 5,6% responden menyatakan kalau informasi yang ada ternyata sangat tepat waktu pada saat dibutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatanwaktu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi cukup tepat waktu pada saat dibutuhkan.

## 2.3 Tingkat Kelengkapan Informasi

Untuk mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan bisa diketahui melalui penyajian informasi yang *up to date* sesuai dengan perkembangan terkini yang terjadi pada instansi dan juga dapat diketahui melalui intensitas yang



dilakukan untuk selalu memperbarui data/informasi yang lama dengan data/informasi terkini yang sedang terjadi. Disamping itu juga dapat dinilai dari tingkat kesesuaian informasi yang ditampilkan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Selain itu, dalam hal penyajian data terbaru dari instansi terkait seharusnya selalu diperbarui ketika ada informasi terkini. Dengan selalu menyajikan informasi terbaru mengenai keadaan instansi maka masyarakat akan tahu keadaan dan kondisi dari instansi tersebut sehingga dengan memberikan/menyajikan data terbaru akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari instansi pemerintah.

Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi harus sesuai (relevan) dengan kebutuhan manajemen berdasarkan fungsi dari sistem informasi tersebut. Dengan adanya kesesuaian antara informasi yang dihasilkan dengan kebutuhan manajemen maka akan memudahkan kinerja instansi.

Tabel 3.20  
Tingkat Kesesuaian Informasi dengan Kebutuhan Manajemen

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak sesuai	1	1,4%
Kurang sesuai	23	31,9%
Cukup sesuai	46	63,9%
Sangat sesuai	2	2,8%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.28





Dari tabel 3.20 dapat diketahui sebanyak 63,9% responden mengatakan antara informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi ternyata cukup sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sebanyak 31,9% responden menyatakan kalau informasi yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Selain itu 2,8% responden menyatakan kalau informasi yang dihasilkan sangat sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan ternyata cukup sesuai dengan kebutuhan manajemen.

#### 2.4 Format Penyajian Informasi

Untuk menambah nilai estetika di dalam penyajian informasi sudah tentu dibutuhkan bentuk penyajian informasi secara menarik sehingga tidak menimbulkan kesan membosankan.

Tabel 3.21  
Penyajian Informasi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak menarik	0	-
Kurang menarik	26	36,1%
Cukup menarik	45	62,5%
Sangat Menarik	1	1,4%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.29

Dari tabel 3.21 dapat diketahui sebanyak 62,5% responden mengatakan kalau format penyajian informasi yang ditampilkan cukup menarik. Sebanyak 36,1% responden menyatakan format penyajian informasi kurang menarik dan sisanya 1,4% responden menyatakan kalau format penyajian informasi yang ada



sangat menarik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa format penyajian informasi dari instansi ini cukup menarik.

### 3. Intensitas Penggunaan Sistem Informasi

Intensitas penggunaan informasi mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau sukarela. Variabel ini diukur melalui intensitas penggunaan komputer guna pelaksanaan tugas dalam setiap hari kerja.

#### 3.1 Intensitas penggunaan

Intensitas merupakan suatu tingkatan keadaan. Intensitas merujuk pada sering tidaknya penggunaan komputer aplikasi sistem informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Tabel 3.22  
Penggunaan Komputer Aplikasi Sistem Informasi guna Pelaksanaan Tugas dalam Satu hari

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
<2 jam	4	5,6%
2 - <4 jam	22	30,5%
4 - <6 jam	45	62,5%
>6 jam	1	1,4%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.30

Dari tabel 3.22 di atas dapat diketahui sebanyak 62,5% responden menyatakan intensitas penggunaan perangkat komputer aplikasi sistem informasi dalam pelaksanaan tugas selama sekitar 4-<6 jam dalam satu hari. Sebanyak 30,5% responden menyatakan menggunakan komputer selama 2-<4 jam dalam



sehari. Sedangkan 5,6% responden menyatakan menggunakan komputer < 2 jam dalam sehari. Sisanya 1,4% responden mengaku menggunakan komputer > 6 jam dalam sehari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan komputer aplikasi sistem informasi oleh aparat guna pelaksanaan tugas adalah dalam rentang waktu 4- < 6 jam sehari.

## 2. Variabel Terpengaruh (Y)

### A. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada era otonomi daerah saat ini, setiap pejabat publik diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang yang diamanatkan kepadanya. Akuntabilitas kinerja diterapkan di Indonesia berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut diatur tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem ini tidak lain merupakan suatu tatanan, instrumen metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi secara periodik dan berkelanjutan.

Setiap instansi baik pemerintah pusat, daerah propinsi, maupun kabupaten dan kota sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya



dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing di tiap lembaga, lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya pada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan itu menggambarkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat melalui proses penyusunan rencana strategis yang ada, pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh institusi terkait serta bagaimana pelaporan kinerja pada instansi tersebut.

## **1. Tingkat Penyusunan Rencana Strategik**

### **1.1 Tingkat Keterlibatan dalam Penyusunan Visi dan Misi Penyelenggara Pemerintahan**

Dalam penentuan visi dan misi organisasi tentunya dibutuhkan masukan dari seluruh aparat guna mewujudkan tujuan organisasi. Dalam penentuan visi dan misi organisasi yang dilakukan secara akuntabel maka dibutuhkan adanya keterlibatan seluruh aparat. Keterlibatan seluruh aparat akan memudahkan penyusunan visi dan misi karena telah melalui saluran aspirasi dari seluruh aparatnya.



Tabel 3.23  
Tingkat Partisipasi dalam Penentuan Visi dan Misi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	0	-
Kadang-kadang	10	13,9%
Hampir selalu	53	73,6%
Selalu	9	12,5%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.31

Dari tabel 3.23 di atas dapat diketahui bahwa 73,6% responden menyatakan dalam penentuan visi dan misi organisasi hampir selalu melibatkan partisipasi seluruh aparat/pegawai. Sebanyak 13,9% responden mengaku hanya kadang-kadang saja dilibatkan dalam penentuan visi dan misi organisasi. Sisanya sebanyak 12,5% responden mengaku selalu dilibatkan dalam penentuan visi dan misi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan visi dan misi organisasi hampir selalu melibatkan partisipasi seluruh aparat/pegawai yang ada.

Selain melihat tingkat keterlibatan melalui partisipasi dari seluruh aparat di dalam penyusunan visi dan misi organisasi, faktor lain yang juga dapat dilihat adalah di dalam penentuan keputusan di dalam penetapan visi dan misi. Keputusan yang ditetapkan itu hanya ditentukan Kepala Badan saja ataukah melalui keputusan bersama antar seluruh aparat.



Tabel 3.24  
Penentuan Keputusan di dalam Penetapan Visi dan Misi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Kepala Badan	0	-
Ka.Badan dan Ka.Bidang	4	5,6%
Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka.Subid	28	38,8%
Seluruh aparat	40	55,6%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.32

Dari tabel 3.24 di atas dapat dilihat 55,6% responden menjawab kalau dalam peetapan visi dan misi organisasi diputuskan oleh seluruh aparat yang ada. Sedangkan sebanyak 38,8% responden menyatakan kalau keputusan yang dibuat dalam menentukan visi dan misi organisasi hanya diputuskan oleh Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka.Subbid saja. Sisanya sebanyak 5,6% responden menyatakan kalau keputusan yang ada hanya ditentukan oleh Ka.Badan dan Ka.Bidang saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan visi dan misi organisasi ditentukan oleh seluruh aparat yang ada.

### 1.2 Tingkat Keterlibatan dalam Penentuan Tujuan dan Sasaran strategis

Tujuan dan sasaran strategis dibutuhkan oleh setiap intansi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untu mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap



aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keterlibatan di dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis dapat diketahui melalui partisipasi seluruh aparat instansi tersebut.

Tabel 3.25  
Tingkat Partisipasi dalam Penentuan Tujuan dan Sasaran strategis

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak selalu	0	-
Kadang-kadang	4	5,6%
Hampir selalu	55	76,3%
Selalu	13	18,1%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.33

Dari tabel 3.25 di atas dapat diketahui 76,3% responden mengaku hampir selalu berpartisipasi dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sebanyak 18,1% responden menyatakan kalau selalu berpartisipasi dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sisanya 5,6% responden menyatakan kalau hanya kadang-kadang saja dilibatkan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis organisasi hampir selalu melibatkan partisipasi seluruh aparat/pegawainya.



Untuk mengetahui tingkat keterlibatan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis tidak hanya dilihat melalui tingkat partisipasinya saja tapi juga dapat dilihat melalui siapa yang berperan di dalam penentuan keputusan terkait penetapan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 3.26  
Penentuan Keputusan dalam Penetapan Tujuan dan Sasaran strategis

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Ka.Badan	0	-
Ka.Badan dan Ka.Bidang	4	5,6%
Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka Subbid	26	36,1%
Seluruh aparat	42	58,3%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.34

Dari tabel 3.26 di atas dapat diketahui sebanyak 58,3% responden menyatakan dalam penentuan keputusan terkait penetapan tujuan dan sasaran strategis organisasi melibatkan peranan dari seluruh aparat. Sebanyak 36,1% responden menyatakan hanya Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka.Subbid saja yang berperan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sisanya sebanyak 5,6% responden menyatakan hanya Ka.Badan dan Ka.Bidang saja yang berperan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penentuan keputusan untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi melibatkan peranan seluruh aparat.





### 1.3 Tingkat Keterlibatan dalam Penetapan strategi yang akan dipakai untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan cara dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dari organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Penetapan strategi organisasi ini menjadi sangat penting karena dengan adanya strategi maka organisasi dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.27  
Penetapan Strategi dalam Mencapai Tujuan atau Sasaran

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak selalu	0	-
Kadang-kadang	6	8,3%
Hampir selalu	52	72,3%
Selalu	14	19,4%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.35

Dari tabel 3.27 di atas dapat dilihat 72,3% responden menyatakan hampir selalu menetapkan strategi organisasi. Sebanyak 29,4% responden menyatakan organisasi ini selalu menetapkan strategi organisasi. Sisanya sebanyak 8,3% responden menyatakan hanya kadang-kadang saja organisasi ini menetapkan strategi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instansi ini hampir selalu menetapkan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.



Tabel 3.28  
Keterlibatan dalam penetapan strategi

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Ka.Badan	0	-
Ka.Badan dan Ka.bidang	4	5,6 %
Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka. Subbid	21	29,2 %
Seluruh aparat	47	65,2 %
Total	72	100 %

Sumber data : kuesioner no.36

Dari tabel 3.28 dapat diketahui sebanyak 65,2% responden menyatakan dilibatkan dalam pembuatan keputusan terkait penetapan strategi organisasi. Sebanyak 29,2% responden menyatakan hanya Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka.Subbid saja yang berperan dalam menetapkan strategi organisasi. Sisanya sebanyak 5,6% responden menyatakan yang berperan dalam penetapan strategi organisasi adalah Ka.Badan dan Ka.Bidang saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh aparat memiliki keterlibatan dalam penentuan keputusan terkait penetapan strategi organisasi.

#### **1.4 Tingkat Keterlibatan dalam Perumusan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah**

Indikator kinerja merupakan ukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan. Indikator yang telah ditetapkan dapat mengindikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Untuk mengetahui keterlibatan dalam perumusan indikator



kinerja bisa dilihat melalui kesesuaian antara visi dan misi organisasi dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.29  
Kesesuaian Visi dan Misi Organisasi dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak sesuai	0	-
Kurang sesuai	5	6,9%
Cukup sesuai	45	62,5%
Sangat sesuai	22	30,5%
Total	72	100%

Sumber data : kuesuoner no.37

Dari tabel 3.29 di atas dapat diketahui sebanyak 62,5% responden menyatakan tingkat kesesuaian visi dan misi organisasi dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah cukup sesuai. Sebanyak 30,5% responden menyatakan sangat sesuai antara visi dan misi dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Sisanya sebanyak 6,9% responden menyatakan kurang sesuai antara visi dan misi yang ada dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara visi dan misi organisasi dengan indikator yang ditetapkan cukup sesuai.

Selain dilihat dari kesesuaian antara visi dan misi organisasi dengan indikator kinerja yang ditetapkan, tingkat keterlibatan dalam perumusan indikator kinerja dapat diketahui juga melalui keterlibatan aparat yang bekerja di institusi tersebut di dalam perumusan indikator kinerja.



Tabel 3.30  
Keterlibatan dalam Perumusan indikator kinerja

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Ka.Badan	0	-
Ka.Badan dan Ka.Bidang	1	1,4%
Ka.Badan, Ka.Bidang dan Ka.Subbid	27	37,5%
Seluruh aparat	44	61,1%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber data : kuesioner no.38

Dari tabel 3.30 diketahui 61,1% responden menyatakan kalau seluruh aparat dilibatkan dalam perumusan indikator kinerja organisasi. Sebanyak 37,5% responden menyatakan hanya Ka.badan, Ka.Bidang dan Ka.Subbid saja yang terlibat dalam penentuan indikator kinerja. Sisanya sebanyak 1,4% responden menyatakan hanya Ka.Badan dan Ka.Bidang saja yang berperan dalam perumusan indikator kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh aparat dilibatkan dalam perumusan indikator kinerja organisasi.

## 2. Tingkat Pengukuran Kinerja

Untuk dapat mengetahui kinerja instansi mengalami kegagalan ataupun keberhasilan secara sederhana dapat dilihat dengan cara membandingkan antara kinerja yang telah dilaksanakan saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mengukur kinerja instansi juga dapat dilakukan perbandingan antara kinerja saat ini dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.



## 2.1 Perbandingan Kinerja aktual dengan Rencana atau Target

Dalam setiap instansi pemerintah, sudah tentu memiliki rencana dan target yang harus dicapai. Dalam upaya mewujudkannya setiap instansi memiliki strategi sehingga dengan begitu baik perencanaan yang telah dibuat maupun target-target yang telah disepakati akan dapat dicapai. Hasil yang dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan/program dinamakan kinerja. Hasil kinerja ini yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan melihat perbandingan ini maka akan terlihat apakah suatu organisasi itu berhasil atau tidak.

Tabel 3.31  
Perbandingan Kinerja Saat ini dengan Target yang telah Ditetapkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak sesuai	0	-
Kurang sesuai	3	4,2%
Cukup sesuai	51	70,8%
Sangat sesuai	18	25,0%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.39

Dari tabel 3.31 di atas dapat dilihat 70,8% responden mengaku cukup sesuai antara perbandingan kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Sebanyak 25,0% responden menyatakan kalau perbandingan kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan adalah sangat sesuai. Sisanya sebanyak 4,2% responden menyatakan ternyata kurang sesuai antara kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan antara kinerja saat ini cukup sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi akan memiliki dua parameter, yaitu berhasil ataukah tidak. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari organisasi tersebut bisa dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dari organisasi tersebut dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.32  
Persentase Ketidaksesuaian antara Kinerja aktual dengan Target yang telah Ditetapkan

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
<25 %	0	-
25 - <50 %	11	15,3%
50 - <75 %	40	55,6%
>75 %	21	29,1%
Total	72	100%

Sumber data : kuesuoner no.40

Dari tabel III.32 dapat diketahui sebanyak 55,6% responden menyatakan persentase ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan adalah mencapai 50 - < 75%. Sedangkan sebanyak 29,1% responden menyatakan persentase ketidaksesuaian antara kineja aktual dengan target yang ditetapkan mencapai > 75%. Sisanya sebanyak 15,3% responden menyatakan kalau persentase ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan target yang ditetapkan mencapai 25- <50%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persebtase ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan pada instansi ini mencapai 50 - < 75%.



## 2.2 Perbandingan Kinerja aktual dengan Tahun sebelumnya

Selain dengan membandingkan antara kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk mengukur kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual/saat ini dengan kinerja yang dihasilkan oleh instansi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.33  
Perbandingan Kinerja Saat ini dengan Kinerja Tahun sebelumnya

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	0	-
Kadang-kadang	13	18,1%
Hampir selalu	44	61,1%
Selalu	15	20,8%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.41

Dari tabel 3.33 di atas dapat diketahui sebanyak 61,1% responden menjawab kalau instansi ini hampir selalu membandingkan antara kinerja saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 20,8% responden menjawab kalau instansi ini selalu membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Sisanya sebanyak 18,1% responden menyatakan hanya kadang-kadang saja instansi ini membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instansi ini hampir selalu membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam upaya untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja organisasi dapat dilihat melalui persentase kegagalan yang terjadi di instansi. Persentase itu merupakan perbandingan antara kinerja saat ini dengan



kinerja tahun sebelumnya. Semakin turun persentase kegagalannya maka semakin baik kinerja yang dihasilkan oleh instansi tersebut.

Tabel 3.34  
Perbandingan tingkat Kegagalan antara Kinerja tahun ini (aktual) dengan Kinerja tahun sebelumnya

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Turun <10 %	0	-
Turun 10 - <20 %	16	22,2%
Turun 20 - <30%	47	65,3%
Turun >30 %	9	12,5%
Total	72	100%

Sumber data : kuesuoner no.42

Dari tabel 3.34 dapat dilihat sebanyak 65,3% responden menyatakan perbandingan tingkat kegagalan antara kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya turun mencapai 20 - < 30%. Sedangkan sebanyak 22,2% responden menyatakan tingkat kegagalan antara kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya turun mencapai 10 - < 20%. Sisanya sebanyak 12,5% responden mengakukalau tingkat kegagalan antara kinerja ahun ini dengan tahun sebelumnya mencapai > 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan tingkat kegagalan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya turun mencapai 20 - 30%.

### 3. Tingkat Pelaporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya pelaporan kinerja maka akan memberikan informasi mengenai kinerja instansi terkait. Selain itu juga sebagai





bahan evaluasi kinerja dari instansi tersebut untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam memperbaiki kinerja instansi di masa yang akan datang. Pelaporan kinerja juga diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan instansi agar menjadi lebih akuntabel. Untuk mengetahui pelaporan kinerja dapat dilihat melalui intensitas pelaporan yang dilakukan serta ketepatan waktu di dalam pelaporan.

### 3.1 Intensitas Pelaporan

Intensitas pelaporan merupakan suatu keadaan tingkatan di dalam pelaporan kinerja berdasarkan kurun waktu tertentu. Dalam peraturan yang ada, pelaporan kinerja yang seharusnya dilakukan oleh setiap instansi adalah secara triwulan.

Tabel 3.35  
Intensitas Pelaporan Kinerja Organisasi yang Dibuat dan Dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Sekali dalam setahun	0	-
Dua kali dalam setahun	19	26,4%
Tiga kali dalam setahun	44	61,1%
>tiga kali dalam setahun	9	12,5%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.43

Dari tabel 3.35 di atas dapat diketahui sebanyak 61,1% responden mengaku intensitas pelaporan kinerja organisasi yang dibuat dan dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak tiga kali dalam setahun. Sebanyak 26,4% responden menyatakan dua kali saja dalam setahun instansi ini membuat dan melaporkan pelaporan kinerja organisasi. Sisanya sebanyak 12,5% responden



mengaku intensitas pelaporan kinerja organisasi yang dibuat dan dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak > tiga kali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas pelaporan kinerja organisasi yang di buat dan dilaporkan oleh instansi ini dalam satu tahun sebanyak tiga kali dalam setahun.

### 3.2 Ketepatan waktu

Dalam menyerahkan pelaporan terkait dengan kinerja instansi, maka setiap instansni wajib menyerahkan laporan kinerja tersebut secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.36  
Keterlambatan yang terjadi di dalam Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi dalam rentang waktu satu tahun

Jawaban Item	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah terlambat	0	-
Kadang-kadang terlambat	16	22,2%
Cukup sering terlambat	46	63,9%
Sangat sering terlambat	10	13,9%
Total	72	100%

Sumber data : kuesioner no.44

Dari tabel 3.36 di atas dapat diketahui sebanyak 63,9% responden menyatakan cukup sering terlambat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja instansi dalam rentang waktu satu tahun. Sebanyak 22,2% responden menyatakan kadang-kadang saja terlambat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja instansi dalam rentang waktu satu tahun. Sisanya sebanyak 13,9% responden menyatakan sangat sering terlambat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rentang waktu satu tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan



bahwa instansi ini cukup sering terlambat dalam menyusun dan melaporkan kinerja dalam rentang waktu satu tahun.

### III.2 Analisis Data

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel *independent* (bebas) yaitu profesionalisme aparat ( $x_1$ ) dan sistem informasi keuangan daerah ( $x_2$ ) serta satu variabel *dependent* (terikat) yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $y$ ). Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam analisa ini akan digunakan dua cara, pertama dengan menggunakan tabulasi silang untuk dapat melakukan analisa kuantitatif dan menguraikan hubungan antara variabel-variabel *independent* (bebas) dan *dependent* (terikat). Kedua, dengan menggunakan uji statistik agar diperoleh kajian ilmiah yang lebih cermat terhadap hubungan antar variabel-variabel *independent* (bebas) dan *dependent* (terikat). Uji statistik yang akan digunakan adalah analisa regresi ganda yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Korelasi antara kriterium (variabel  $y$ ) dengan prediktor-prediktornya (variabel  $x_1$  dan  $x_2$ ). Apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak.
2. Persamaan garis regresi.
3. Sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai dengan hasil dari pengujian yang dilakukan.
4. Berapa sumbangan dari masing-masing variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga akan dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan.



Sebelum dilakukan analisa tabulasi silang, terlebih dahulu akan dilakukan deskripsi masing-masing indikator yang terdapat pada masing-masing variabel. Deskripsi ini merupakan perolehan nilai yang didapat dari pengolahan data primer. Untuk deskripsi dari masing-masing indikator akan dikelompokkan berdasarkan hasil dari jawaban yang diberikan responden dan dikategorikan menjadi empat kategori, untuk variabel  $x_1$  dan  $x_2$ :

- Kategori Buruk : Skor dengan nilai "1"
- Kategori Kurang Baik : Skor dengan nilai "2"
- Kategori Cukup Baik : Skor dengan nilai "3"
- Kategori Baik : Skor dengan nilai "4"

Sementara untuk variabel  $y$  dari jawaban yang diberikan responden juga kan dikategorikan menjadi empat kategori ;

- Kategori Rendah : Skor dengan nilai "1"
- Kategori Kurang Tinggi : Skor dengan nilai "2"
- Kategori Cukup Tinggi : Skor dengan nilai "3"
- Kategori Tinggi : Skor dengan nilai "4"

Selanjutnya adalah menentukan pembagian kelas interval dan seperti yang diungkapkan oleh Soetrisno Hadi untuk menghindari adanya bilangan pecahan maka nilai skor yang paling tinggi dan paling rendah dilakukan pembulatan ke atas atau ke bawah.<sup>1</sup> Adapun rumus yang digunakan dalam pembagian kelas interval adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Hadi, Soetrisno, 1996. *Statistik 2*, Andi Offset, Yogyakarta, hal.20.



$$\text{Interval} = \frac{NT-NR}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Keterangan : *NT* : Batas nyata atas

*NR* : Batas nyata bawah

Untuk tabulasi silang dari masing-masing jawaban responden pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*y*) diperoleh nilai (skor total) tertinggi 51 dan terendah 34. Selanjutnya dari skor tertinggi dan terendah tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi dengan batas nyata bawah nilai terendah dan dibagi dengan jumlah interval sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{51,5-33,5}{4} = 4,5 = 5$$

Dari perhitungan di atas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel terikat (*y*), antara lain :

- Skor 34-38 untuk kategori “Rendah”
- Skor 39-43 untuk kategori “Kurang tinggi”
- Skor 44-48 untuk kategori “Cukup tinggi”
- Skor 49-53 untuk kategori “Tinggi”

Untuk variabel bebas pertama yaitu profesionalisme aparat (*x*<sub>1</sub>) diperoleh nilai/skor total tertinggi 53 dan terendah 39. Dari skor tersebut ditetapkan batas



nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi batas nyata bawah dari nilai terendah kemudian dibagi jumlah interval sehingga diperoleh lebar interval sebagai berikut:

$$\frac{53,5-38,5}{4} = 3,75 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 4$$

Dari hasil perhitungan diatas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel bebas pertama, yaitu:

- Skor 39-42 untuk kategori “Buruk”
- Skor 43-46 untuk kategori “Kurang baik
- Skor 47-50 untuk kategori “Cukup baik”
- Skor 51-53 untuk kategori “Baik”

Sedangkan untuk variabel bebas kedua yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah ( $x_2$ ) diperoleh skor total tertinggi 47 dan terendah 34. Dari skor tersebut ditetapkan batas nyata atas dari nilai tertinggi dikurangi batas nyata bawah dari nilai terendah kemudian dibagi jumlah interval sehingga diperoleh lebar interval sebagai berikut

$$\frac{47,5-33,5}{4} = 3,5 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi } 4$$

Dari hasil perhitungan diatas, kemudian ditentukan kategori skor jawaban pada variabel bebas kedua, yaitu:

- Skor 34-37 untuk kategori “Buruk”
- Skor 38-41 untuk kategori “Kurang baik”
- Skor 42-45 untuk kategori “Cukup baik”
- Skor 46-49 untuk kategori “Baik”



Setelah diketahui lebar interval dari masing-masing variabel, terlebih dahulu akan disajikan gambaran jawaban responden terhadap masing-masing variabel berdasarkan kategori melalui tabel frekuensi.

### **1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja suatu organisasi menunjuk pada tingkat penyusunan rencana stratejik yang dapat diukur melalui adanya keterlibatan semua komponen aparat pada suatu instansi dalam penyusunan visi dan misi, keterlibatan seluruh aparat dalam penentuan tujuan dan sasaran stratejik (*strategic objectives*) organisasi, keterlibatan dalam penetapan strategi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan keterlibatan dalam perumusan indikator kinerja instansi pemerintah. Selain menunjuk pada tingkat penyusunan rencana stratejik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat pula dilihat dari tingkat pengukuran kinerja dan tingkat pelaporan kinerja. Tingkat pengukuran kinerja dapat diukur dari perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target dan dari perbandingan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pelaporan kinerja dapat diukur melalui intensitas pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan. Selanjutnya untuk melihat variabel tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.37  
Rekapitulasi Variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah	2	2,7%
Kurang Tinggi	20	27,8%
Cukup Tinggi	40	55,6%
Tinggi	10	13,9%
Total	72	100%

Sumber: Pengolahan data primer.

Berdasarkan tabel 3.37 dapat diketahui bahwa 2,7% responden menyatakan termasuk dalam kategori rendah, sedangkan untuk kategori kurang tinggi sebesar 27,8%. Selanjutnya untuk kategori cukup tinggi sebesar 55,6% dan sisanya sebesar 13,9% termasuk dalam kategori tinggi. Dilihat dari selisih jumlah responden yang menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kurang tinggi dan yang menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah cukup tinggi serta sedikitnya responden yang menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Surabaya tergolong cukup tinggi.

## 2. Tingkat Profesionalisme Aparat

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pengawasan keuangan daerah yang pada setiap proses tersebut dibutuhkan profesionalisme aparat pelaksana sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban instansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Serangkaian





komponen yang terdapat di dalam profesionalisme aparat antara lain berupa pengetahuan dari aparat, keahlian yang dimiliki, kemampuan aparat serta perilaku dari aparat. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden maka berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang telah mencakup indikator dari variabel profesionalisme aparat.

Tabel 3.38  
Rekapitulasi Variabel X1 (Profesionalisme Aparat)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Buruk	5	6,9%
Kurang baik	33	45,8%
Cukup baik	30	41,7%
Baik	4	5,6%
Total	72	100%

Sumber: Pengolahan data primer.

Tabel 3.38 diatas menunjukkan bahwa 45,8% responden menyatakan bahwa tingkat profesionalisme aparat termasuk dalam kategori kurang baik. Selanjutnya sebanyak 41,7% responden menyatakan bahwa administrasi pemungutan termasuk dalam kategori cukup baik. Disamping itu 6,9% responden menyatakan profesionalisme aparat dalam kategori buruk Sisanya sebesar 5,6% responden menyatakan bahwa profesionalisme aparat termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesionalisme aparat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya kurang baik.

### 3. Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada



masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dalam hal implementasi SIKD tersebut di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, digunakan beberapa indikator yaitu tingkat kualitas sistem yang ada, tingkat kualitas informasi serta intensitas penggunaan sistem informasi. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden maka berikut akan disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan gambaran indikator-indikator dari variabel SIKD tersebut.

Tabel 3.39  
Rekapitulasi variabel X2 (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Buruk	5	6,9%
Kurang baik	34	47,2%
Cukup baik	32	44,5%
Baik	1	1,4%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pengolahan data primer.

Tabel 3.39 memberikan gambaran bahwa sebanyak 47,2% responden menyatakan bahwa penerapan SIKD dalam kategori kurang baik. Sedangkan sebanyak 44,5% responden menyatakan penerapan SIKD termasuk dalam kategori cukup baik. Selain itu sebanyak 6,9% responden menyatakan penerapan SIKD buruk dan sisanya sebanyak 1,4% menyatakan bahwa penerapan SIKD pada kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan SIKD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Surabaya kurang baik.



#### **4. Korelasi Variabel Tingkat Profesionalisme Aparat dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Di era otonomi daerah, pelaksanaan manajemen pemerintahan (publik) yang dibarengi dengan perimbangan keuangan yang lebih memadai kepada daerah, merupakan kebijakan publik yang memerlukan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional. Pelaksanaan manajemen otonomi daerah belum tentu mencapai hasil yang diharapkan tanpa adanya kesiapan aparatur yang profesional untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Untuk dapat bermakna positif bagi kehidupan masyarakat, otonomi daerah mensyaratkan terbentuknya sejumlah kondisi kelembagaan yang responsif dalam mengelola kewenangan-kewenangan baru yang diterimanya, aparatur yang terampil, dan masyarakat yang siap serta kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Itulah sebabnya, maka penyerahan kewenangan ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemanfaatannya. Dalam konteks ini, profesionalisme aparatur merupakan faktor kunci. Berkaitan dengan upaya penyediaan aparat profesional tersebut, ada baiknya terlebih dahulu untuk mengetahui makna dari profesionalisme tersebut.

Profesionalisme tersebut bisa dilihat dari pengetahuan seseorang, keahlian dan keterampilan seseorang baik yang didapat melalui jalur pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang non formal atau pengalaman. Selain keterampilan atau keahlian, nilai profesionalisme itu juga bisa dilihat dari aspek moral atau perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan kepadanya. Untuk mengetahui bagaimana korelasi antara variabel tingkat



profesionalisme aparat dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Surabaya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40  
Korelasi antara Variabel X1 dengan Y

AKIP (Y)	Profesionalisme aparat (x1)				Total
	Buruk	Kurang baik	Cukup baik	Baik	
Rendah	2 2,78%	-	-	-	2 2,8%
Kurang Tinggi	3 4,17%	17 23,6%	-	-	20 27,8%
Cukup Tinggi	-	16 22,2%	24 33,3%	-	40 55,5%
Tinggi	-	-	6 8,3%	4 5,6%	10 13,9%
Total	5 6,9%	33 45,8%	30 41,7%	4 5,6%	72 100%

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel 3.40 dapat diketahui dari 72 responden, 2 responden menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rendah, 2,8% responden mengatakan bahwa profesionalisme aparat buruk. Sedangkan dari 20 responden yang menyatakan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kurang tinggi, 4,17% responden menyatakan bahwa profesionalisme aparat buruk, 23,6% responden menyatakan bahwa profesionalisme aparat kurang baik. Untuk 40 responden yang menyatakan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah cukup tinggi, 22,2% responden menyatakan bahwa profesionalisme aparat kurang baik, 33,3% responden menyatakan profesionalisme aparat cukup baik. Untuk 10



responden yang menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tinggi, 8,3% responden menyatakan bahwa profesionalisme aparat cukup baik dan sisanya sebanyak 5,6% responden menyatakan profesionalisme aparat baik.

Langkah berikutnya adalah mencari hubungan antara tingkat profesionalisme aparat dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dilakukan dengan mencari rata-rata hasil pengurangan dari sel a,b,c,d. Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 10 % maka dapat dikatakan ada hubungan antara kedua variabel. Penentuan sel a,b,c dan d ditetapkan berdasar persentase terbesar di margin bebas sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Sel a - sel b} = 6,95 - 45,8\% = 38,85\%$$

$$\text{Sel a - sel c} = 6,95 - 42,13\% = 35,18\%$$

$$\text{Sel a - sel d} = 6,95 - 5,56\% = 1,39\%$$

$$\text{Sel b - sel c} = 45,8 - 42,13\% = 3,67\%$$

$$\text{Sel b - sel d} = 45,8 - 5,56\% = 40,24\%$$

$$\text{Sel c - sel d} = 42,13 - 5,56\% = 36,57\% +$$

$$\underline{\hspace{10em}} \\ 155,9\%$$

Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dicari rata-rata dari keempat sel dan diperoleh hasil 38,98%. Karena 38,98% > dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel profesionalisme aparat dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



## 5. Korelasi Variabel Keefektifan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kegiatan manajemen memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi manajemen suatu organisasi tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan apalagi untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Sebagaimana yang diungkapkan Terry bahwa melalui pengumpulan sistemik, pengolahan dan penyebaran data akan menyediakan informasi bagi organisasi dalam pencapaian tujuan.

Dalam upaya menciptakan *good governance* di dalam tata kelola keuangan daerah maka segala bentuk informasi terkait keuangan daerah menjadi hal yang paling penting. Informasi tersebut sudah selayaknya diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi rasa keingintahuan dan tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terkait penggunaan dana publik dalam setiap aktivitas/kegiatan pemerintahan.

Markus dan Keil, menyatakan bahwa sebuah kesuksesan sistem akan berdampak pada individu dan organisasi penggunanya, dan pada selanjutnya dampak individual tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasional. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, *e-goverment* diimplementasikan dalam sistem informasi. Penerapan Sistem Informasi pada instansi pemerintahan akan menunjang pelaksanaan Pemerintah di daerah, sehingga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Untuk mengetahui bagaimana korelasi antara variabel keefektifan sistem



informasi keuangan daerah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan pada tabulasi silang dibawah ini:

Tabel 3.41  
Korelasi antara Variabel X2 dengan Y

AKIP (Y)	SIKD (X2)				Total
	Buruk	Kurang baik	Cukup baik	Baik	
Rendah	2 2,8 %	-	-	-	2 2,8 %
Kurang Tinggi	3 4,2 %	17 23,6 %	-	-	20 27,8 %
Cukup Tinggi	-	17 23,6 %	23 31,9 %	-	40 55,6 %
Tinggi	-	-	9 12,5 %	1 1,4 %	10 13,8 %
<b>Total</b>	5 6,9 %	34 47,2 %	32 44,5 %	1 1,4 %	72 100 %

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel 3.41 dapat diketahui dari 72 responden, 2 responden menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rendah, 2,8% responden menyatakan keefektifan sistem informasi keuangan daerah buruk.. Sedangkan dari 20 responden yang menyatakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kurang tinggi, 4,2% responden menyatakan bahwa keefektifan sistem informasi keuangan daerah buruk, 23,6% responden mengatakan bahwa keefektifan sistem informasi keuangan daerah kurang baik. Untuk 40 responden yang menyatakan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah cukup tinggi, 23,6% responden menyatakan bahwa keefektifan sistem informasi keuangan daerah dilaksanakan kurang baik, 31,9% responden menyatakan bahwa



keefektifan sistem informasi keuangan daerah dilaksanakan cukup baik. Dari 10 responden yang menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tinggi, 12,5% responden menyatakan bahwa keefektifan sistem informasi keuangan daerah cukup baik dan sisanya sebanyak 1,39% responden menyatakan keefektifan sistem informasi keuangan daerah dilaksanakan dengan baik.

Langkah berikutnya adalah mencari hubungan antara keefektifan sistem informasi keuangan daerah dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dilakukan dengan mencari rata-rata hasil pengurangan dari sel a,b,c,d. Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 10% maka dapat dikatakan ada hubungan antara kedua variabel. Penentuan sel a,b,c, dan d ditetapkan berdasar persentase terbesar di margin bebas sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sel a - sel b} &= 6,95-47,22\% = 40,27\% \\ \text{Sel a - sel c} &= 6,95-44,44\% = 37,49\% \\ \text{Sel a - sel d} &= 6,95-1,39\% = 5,56\% \\ \text{Sel b - sel c} &= 47,22-44,44\% = 2,78\% \\ \text{Sel b - sel d} &= 47,22-1,39\% = 45,83\% \\ \text{Sel c - sel d} &= 44,44-1,39\% = 43,05\% + \\ &\quad \underline{\hspace{1.5cm}} \\ &\quad 174,98\% \end{aligned}$$

Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dicari rata-rata dari keempat sel dan diperoleh hasil 43,75%. Karena 43,75% > dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah dengan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.





Uji statistik korelasi parsial dalam penelitian ini dibantu dengan komputer menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 13.

Dari perhitungan komputer diperoleh hasil :

$$r_{y_1} = 0,258$$

$$r_{y_2} = 0,309$$

$$r_{12} = 0,405$$

sehingga,

$$r_{y_{1-2}} = \frac{0,258 - (0,309)(0,405)}{\sqrt{(1 - (0,309)^2)(1 - (0,405)^2)}}$$

Dari perhitungan komputer diperoleh hasil  $r_{y_{1-2}} = 0,153$

untuk menguji signifikan tidaknya korelasi diatas, maka dicari harga t nya dengan

rumus :

$$t = \frac{r_{y_{1-2}}}{\sqrt{(1 - r_{y_{1-2}}^2) : (N - 3)}}$$

$$r_{y_{1-2}} = 0,153$$

$$r_{y_{1-2}}^2 = 0,0233$$

$$N = 72$$

$$= \frac{0,153}{\sqrt{(1 - 0,0233) : (72 - 3)}}$$

$$= 10,8$$

Kemudian setelah diperoleh nilai t analisis, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan t analisis dengan t tabel, dengan db= N-3, dan taraf signifikansi 5% pada pengujian satu ekor. Apabila nilai t analisis > t tabel maka



dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel tingkat profesionalisme aparat dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah jika variable keefektifan sistem informasi keuangan daerah dikontrol. Dari tabel nilai t dengan db : 69 pada taraf signifikansi 5% diperoleh angka :

	0,05
29	2,045
Inf.	1,96

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa t analisis > t tabel ( 10,8>1,96), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel tingkat profesionalisme aparat dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah jika variable keefektifan sistem informasi keuangan daerah dikontrol.

Selanjutnya untuk korelasi antara x2 dan y jika variabel x1 dikontrol adalah sebagai berikut :

$$r_{y_2 \cdot 1} = \frac{r_{y_2 \cdot y_1} \cdot r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{y_1}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

dari perhitungan komputer diperoleh hasil :

$$r_{y_1} = 0,258$$

$$r_{y_2} = 0,309$$

$$r_{12} = 0,405$$

$$\text{sehingga nilai } r_{y_2 \cdot 1} = \frac{0,215 - (0,055)(0,153)}{\sqrt{(1 - (0,055)^2)(1 - (0,153)^2)}}$$



Dari perhitungan komputer diperoleh hasil  $r_{y_{2-1}} = 0,232$ , kemudian mencari nilai  $t$  analisis dan diperoleh hasil

$$t = \frac{r_{y_{2-1}}}{\sqrt{(1-r_{y_{2-1}}^2) : (N-3)}}$$

$$r_{y_{2-1}} = 0,232$$

$$r_{y_{2-1}}^2 = 0,054$$

$$N = 72$$

$$= \frac{0,232}{\sqrt{(1-0,054) : 69}}$$

$$= 16,91$$

Kemudian setelah diperoleh nilai  $t$  analisis, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan  $t$  analisis dengan  $t$  tabel, dengan  $db = N-3$ , dan taraf signifikansi 5% pada pengujian satu ekor. Nilai  $t$  analisis  $>$   $t$  tabel ( $16,91 > 1,96$ ) maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel keefektifan sistem informasi keuangan daerah dan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apabila variabel tingkat profesionalisme aparat dikontrol.

### B. Analisis Regresi Berganda

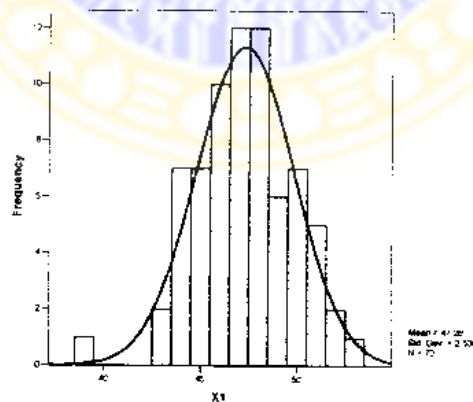
Analisis regresi digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya ditolak atau diterima. Namun dalam melakukan analisis regresi ganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah:



1. Asumsi bahwa sampel diambil secara acak atau secara universal, dalam penelitian ini sampel diambil secara universal.
2. Asumsi *normal distribution of dependent variables* yakni bahwa ubahan taut  $y$  mengikuti sebaran normal. Uji normalitas sebaran berfungsi untuk melihat apakah sebaran data variabel dependen normal atau tidak. Asumsi ini diperlukan karena populasi yang luas variabel yang sedang dianalisis mengikuti hubungan sebaran normal baku dari Gauss. Sebaran itu digambarkan dengan grafik poligon akan menyerupai bentuk bel/genta.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini melalui uji normalitas menggunakan *kolmogorof smirnov test* pada variabel  $X_1$  diperoleh hasil Kolmogorof Smirnov  $Z$  sebesar 0,816 dengan  $p$  (*probability of error*)= 0,518.

Berikut ini akan disajikan histogram dari uji normalitas pada variabel profesionalisme aparat.

Grafik 3.1  
Histogram Variabel  $X_1$



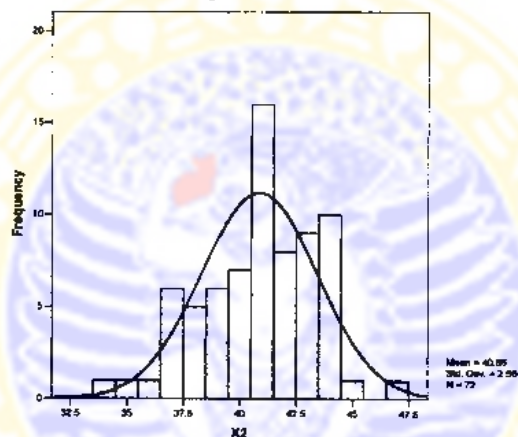
Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data variabel profesionalisme aparat adalah normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk

<sup>2</sup> Op Cit, Hadi, Sutrisno, hal.80.

poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

Pada variabel X2 didapatkan nilai Kolmogorof Smirnov Z sebesar 1,244 dan  $p = 0,091$ . Sedangkan berdasar histogram dari uji normalitas pada variabel sistem informasi keuangan daerah diperoleh gambaran sebagai berikut:

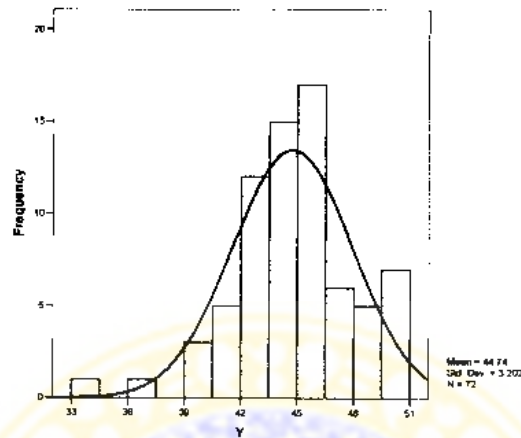
Grafik 3.2  
Histogram Variabel X2



Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa distribusi data pada variabel sistem informasi keuangan daerah berada pada distribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan bentuk poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

Sedangkan pada pengujian variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh nilai Kolmogorof Smirnov Z sebesar 1,197 dan  $p = 0,114$ . Dari uji yang dilakukan diperoleh hasil bahwa distribusi / sebaran adalah normal. Hal ini dapat dilihat pada histogram sebaran data pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bawah ini:

Grafik 3.3  
Histogram Variabel Y



Berdasarkan histogram diatas dapat dilihat bahwa sebaran data pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah normal. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk poligon sebaran datanya yang mengikuti garis normal dan menyerupai genta/bel.

3. Asumsi *linearity of corellation* yaitu bahwa antara sama x dengan y adalah linier. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS versi 13 pada variabel X1 dan Y diperoleh nilai F sebesar 1,140 dengan  $p = 0,349$ , dikarenakan nilai  $p$  lebih besar dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel X1 dan Y mengikuti garis linier. Sedangkan pada variabel X2 diperoleh nilai F sebesar 0,494 dengan  $p = 0,889$ . Dikarenakan nilai  $p$  lebih besar dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel X2 dan Y mengikuti garis linier.
4. Asumsi *non colinearity of the independent variables*, yaitu bahwa antara sesama ubahan bebas x,  $r > 0,080$ . Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas yaitu



variabel X1 dan X2 adalah sebesar 0,405. Jadi asumsi ini dapat terpenuhi karena harga mutlak koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar dari 0,080. Dan juga dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) (lihat lampiran) tiap variabel X yang bernilai 1 sehingga dapat diketahui bahwa antar variabel bebas saling independen.

Setelah asumsi-asumsi tersebut dipenuhi, maka selanjutnya adalah melakukan analisa regresi ganda. Analisa regresi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dibuat diterima atau ditolak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah;

1. Hipotesis Nol

- Tidak ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y (Tidak ada Ada pengaruh antara profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

2. Hipotesa Kerja

- Ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y (Ada pengaruh antara profesionalisme aparat dan keefektifan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Pada penelitian ini taraf signifikansi yang dipakai adalah 5% sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 5% atau sebesar 0.05, sedang keakuratan data yang digunakan adalah 95%.



Berdasarkan analisis SPSS versi 13 diperoleh hasil ;

1. Persamaan garis regresi antara kriterium (variabel y) dan prediktor (variabel  $x_1$  dan  $x_2$ ) adalah ;

$$y = 28,208 + 0,311 x_1 - 0,045 x_2$$

2. Koefisien korelasi antara kriterium y dan prediktor  $x_1$  dan prediktor  $x_2$  ( $R_{y12}$ ) adalah  $R = 0,716$  dan  $R^2 = 0,512$  (lihat lampiran). Dan untuk menentukan apakah koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak maka dicari nilai F regresi dengan rumus;

$$\text{Nilai F reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Nilai  $F_{\text{regresi}}$  sebesar 36,197. Untuk menentukan apakah nilai Freg signifikan atau tidak maka nilai Freg dibandingkan dengan Ftabel berdasarkan db nya. Untuk menemukan db digunakan cara db = m lawan (N-m-1) atau 2 lawan 69. (ket: m adalah jumlah var bebas). Dari tabel F dengan taraf signifikansi 5% diperoleh angka:

	2
60	3,150
69	2,739

Kemudian Freg dibandingkan dengan Ftabel. Karena nilai  $F_{\text{reg}} > F_{\text{tabel}}$  ( $36,197 > 2,739$ ) maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kriterium dan prediktor-prediktor adalah signifikan. Dengan demikian maka ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y.





3. Besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 51,2% (Rsquare). Hal ini dapat berarti bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan X2 memberikan sumbangan / pengaruh sebesar 0,512 terhadap variabel Y. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sumbangan masing-masing variabel dapat dilihat melalui melalui *standardized coefficient* (beta) pada tabel *coefficients*. Dari pengujian komputer dapat dilihat bahwa sumbangan variabel X1 terhadap Y sebesar 64,1%. Sedangkan sumbangan variabel X2 sebesar 34,4%. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 adalah sebesar 51,2% dan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain.
4. Untuk mengetahui kecermatan prediksi regresi ganda yang dilakukan dapat dilihat dengan cara membandingkan Standar deviasi y ( $S_y$ ) dengan Standar *Error* (SEst). Dari hasil analisis regresi ganda yang dilakukan diketahui bahwa  $S_y > SEst$  ( $3,202 > 3,145$ ). Karena nilai  $S_y$  lebih besar dibandingkan SEst maka prediksi regresi ganda dilakukan dengan cermat.